

Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan

Dr. Gyska Indah Harya, SP., M.Agr
Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP
Prof. Dr. Ir. Hamidah Hendrarini, M.Si



PT. GHANI PRESS GROUP

Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan

Penulis:

Dr. Gyska Indah Harya, SP., M.Agr | Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto,
MP | Prof. Dr. Ir. Hamidah Hendrarini, M.Si

Desain Cover:

Umar Khasan

Layouter:

Tyas Dzawil Istiqomah

Editor Naskah:

Prof. Dr. Mohamad Ikbah Bahua, SP., M.Si.

14 x 21 cm, v-146

ISBN: 978-634-05-1620-3 (PDF)

Anggota IKAPI: No. 468/JTI/2026

Diterbitkan oleh: PT GHANI PRESS GROUP



Alamat:

Bumi Permata Raya Blok 8 No. 16 Tanjung, Lamongan
HP. 0896-5710-0105

Email: ptghanipress@gmail.com

Website: <https://ghanipress.com/>

© Hak Cipta 2026 pada penulis

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul “Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Era globalisasi dan liberalisasi pasar, konsumen semakin menuntut produk yang tidak sekadar tersedia, tetapi juga berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Dalam konteks agribisnis dan produksi pangan tuntutan ini menjadi sangat penting agar produk dapat diterima secara luas, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kerangka acuan mutu dan mekanisme penjaminan kualitas agar produk benar-benar memenuhi standar yang diakui.

Buku ini disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan konsep standar mutu dan sertifikasi, regulasi dan kebijakan pemerintah terkait standar mutu dan sertifikasi produk ekspor komoditas perkebunan, dan bagaimana tantangan dan peluang dalam penguatan standar mutu dan sertifikasi produk ekspor komoditas perkebunan. Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi dosen, mahasiswa, dan masyarakat luas tentang arah kebijakan pertanian terintegrasi.

Surabaya, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
Konsep Standar Mutu dan Sertifikasi.....	1
BAB II	
Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional.....	19
BAB III	
Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan	31
BAB IV	
Sistem Manajemen Mutu	47
BAB V	
Proses Sertifikasi	63
BAB VI	
Pengawasan dan Penegakan Produk Ekspor Komoditas Perkebunan.....	75
BAB VII	
Manfaat dan Kontribusi Penguatan Standar Mutu.....	89

BAB VIII

Tantangan dan Peluang Dalam Penguatan Standar Mutu
dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan 105

BAB IX

Panduan untuk Meningkatkan Daya saing dan Kualitas
Produk Perkebunan 113

DAFTAR PUSTAKA 133

BIODATA PENULIS..... 145

BAB I

Konsep Standar Mutu dan Sertifikasi

Era globalisasi dan liberalisasi pasar, konsumen semakin menuntut produk yang tidak sekadar tersedia, tetapi juga berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Dalam konteks agribisnis dan produksi pangan seperti gula merah, hasil pertanian, dan komoditas lainnya tuntutan ini menjadi sangat penting agar produk dapat diterima secara luas, baik di pasar domestik maupun internasional. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kerangka acuan mutu dan mekanisme penjaminan kualitas agar produk benar-benar memenuhi standar yang diakui.

Pengembangan konsep standar mutu dan sertifikasi muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Indonesia menyatakan bahwa standardisasi diperlukan untuk menetapkan kriteria mutu, keamanan pangan, serta aspek teknis produksi agar hasil pertanian dan agro-industri aman dan berkualitas (Trimadya dkk, 2024). Standardisasi ini mencakup proses perumusan, penerapan, hingga revisi standar bersama seluruh pemangku kepentingan pemerintah, produsen, dan konsumen (Ruslin, 2017).

Setelah standar ditetapkan, langkah berikutnya adalah sertifikasi yaitu proses verifikasi bahwa produk, proses, atau sistem telah memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan. Sertifikasi memberikan “jaminan tertulis” kepada konsumen, pasar, dan pemangku kepentingan bahwa produk atau layanan telah diuji, terverifikasi, dan sesuai dengan standar tertentu (Hartini, 2023). Pendekatan ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memberi nilai tambah bagi produsen, terutama jika mereka ingin menembus pasar ekspor atau konsumen yang menuntut kualitas tinggi.

Selain itu dalam konteks daya saing dan efisiensi produksi penerapan standar mutu dan sertifikasi memungkinkan produsen untuk menyederhanakan proses produksi, mengurangi ragam bahan baku serta komponen, dan mempermudah produksi massal dengan kualitas konsisten. Dengan demikian, standar dan sertifikasi tidak hanya penting dari sisi mutu dan keamanan, tapi juga dari sisi ekonomi dan operasional.

➤ **Standar Mutu**

Standar mutu menurut ISO dirumuskan sebagai dokumen yang menyajikan persyaratan, pedoman, atau karakteristik yang dapat digunakan secara konsisten untuk memastikan bahwa material, produk, proses, dan layanan sesuai tujuan mutu yang diharapkan. Keluarga ISO 9000 memberikan kerangka istilah dan prinsip manajemen mutu yang membantu organisasi meningkatkan konsistensi dan kemampuan memenuhi harapan pelanggan. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional sebagai acuan teknis untuk memastikan produk, proses, atau jasa memenuhi persyaratan mutu, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. SNI dapat bersifat

wajib atau sukarela tergantung kebijakan regulator dan jenis produk/jasa. Penerapan SNI bertujuan memberi kepercayaan pada konsumen sekaligus memfasilitasi perdagangan dan perlindungan publik.

Definisi menurut para ahli (Juran, Crosby, Deming ringkasan konsep utama) Para pemikir mutu klasik memberi definisi yang saling melengkapi: Joseph M. Juran menekankan *fitness for use* mutu berarti produk/jasa memenuhi kebutuhan dan berguna bagi pengguna, Philip B. Crosby mendefinisikan mutu sebagai *conformance to requirements* (kesesuaian terhadap persyaratan) dan menekankan pencegahan cacat serta konsep "*zero defects*", W. Edwards Deming menekankan perbaikan sistemik dan peran manajemen dalam meningkatkan mutu melalui pengendalian proses dan data statistik. Kombinasi definisi ini membantu organisasi melihat mutu dari sisi kegunaan, kesesuaian terhadap spesifikasi, dan perbaikan berkelanjutan.

Fungsi standar mutu dalam memastikan keseragaman kualitas produk/jasa Standar mutu berfungsi sebagai tolok ukur yang baku untuk desain, produksi, dan penilaian sehingga produk/jasa yang dihasilkan konsisten dari waktu ke waktu. Fungsi utamanya meliputi: (a) menyediakan kriteria teknis yang jelas untuk pengujian dan sertifikasi, (b) memfasilitasi interoperabilitas dan keselamatan, (c) membantu pengendalian proses sehingga variasi diminimalkan, dan (d) meningkatkan kepercayaan konsumen serta mempermudah akses pasar (domestik dan internasional). ISO 9001 dan SNI adalah contoh kerangka yang digunakan organisasi untuk mencapai fungsi-fungsi ini.

Standar mutu dapat dikategorikan sebagai: (1) Standar Produk spesifikasi teknis dan kriteria mutu untuk benda fisik (mis. dimensi, komposisi, keselamatan), (2) Standar Proses

persyaratan metode atau tahapan produksi yang harus dipenuhi (mis. metode pengujian, tata cara produksi), (3) Standar Sistem kerangka manajemen keseluruhan seperti ISO 9001 yang mengatur kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab organisasi, (4) Standar Layanan kriteria mutu dan performa untuk layanan yang dinilai lewat pengalaman pengguna (mis. aspek kecepatan, ketepatan, keramahan). Masing-masing jenis membantu fokus kontrol mutu pada level yang berbeda dari barang konkret sampai tata kelola organisasi (Juran, 1999).

Dalam menyusun standar mutu perlu diperhatikan prinsip-prinsip ilmiah dan praktis:

- a. Reliabilitas standar dan metode pengukuran harus menghasilkan hasil yang stabil dan dapat direproduksi antar waktu dan pengujian
- b. Validitas standar harus benar-benar mengukur atau menetapkan atribut yang relevan dengan mutu yang dimaksud (mengukur apa yang seharusnya diukur)
- c. Konsistensi bahasa, terminologi, dan persyaratan harus konsisten agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda
- d. Keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan perumusan idealnya melibatkan pakar teknis, industri, konsumen, dan regulator
- e. Keterukuran dan keterapan persyaratan harus dapat diuji/diukur dan dapat diimplementasikan oleh pihak yang menjadi sasaran standar. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam pedoman penyusunan standar internasional (mis. ISO/IEC *Directives*) dan praktik standardisasi nasional.

Penerapan standar mutu mendorong organisasi menerjemahkan persyaratan teknis menjadi prosedur operasional, metrik pengukuran, dan program perbaikan berkelanjutan. Standar sistem seperti ISO 9001 menghubungkan kebijakan tingkat puncak dengan kontrol proses

harian sehingga mutu tidak hanya menjadi atribut produk tetapi juga hasil dari manajemen yang sistematis. Pada tingkat publik, SNI membantu menetapkan baseline keamanan dan mutu yang wajib dipatuhi untuk melindungi konsumen dan lingkungan.

Standarisasi mutu berperan penting dalam menetapkan persyaratan teknis yang mengurangi risiko bahaya bagi pengguna dan lingkungan misalnya spesifikasi keamanan bahan, batas emisi, dan persyaratan pengujian yang harus dipenuhi sebelum produk dipasarkan. Pendekatan standar seperti yang diuraikan dalam ISO 9000 menekankan bahwa manajemen mutu harus mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan dan aspek-aspek keselamatan serta dampak lingkungan sebagai bagian dari tujuan mutu organisasi (ISO, 2015). Dengan acuan standar nasional (SNI), negara juga dapat mewajibkan persyaratan tertentu untuk perlindungan publik dan keberlanjutan.

Standarisasi mutu menyediakan prosedur, metode, dan spesifikasi yang mengurangi variasi proses sehingga pekerjaan menjadi lebih terstandar dan efisien. Prinsip-prinsip pengendalian mutu dan TQM (*Total Quality Management*) menunjukkan bahwa penerapan standar proses serta pengukuran kinerja menghasilkan penurunan cacat, pemborosan, dan kebutuhan perbaikan ulang, yang pada gilirannya menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Standar juga memfasilitasi penggunaan alat statistik dan metodologi kontrol proses yang terbukti mengurangi kesalahan mutu.

Sertifikasi dan kepatuhan terhadap standar (mis. ISO 9001/adopsi SNI yang relevan) menjadi sinyal kualitas bagi konsumen dan mitra dagang. Organisasi yang menerapkan standar sistem mutu lebih mudah membuktikan kesesuaian produknya pada auditor atau pelanggan internasional sehingga

membuka akses ke pasar ekspor dan rantai pasok global. Literatur mutu menyatakan bahwa sertifikasi terhadap standar yang diakui internasional meningkatkan kredibilitas, mengurangi hambatan perdagangan teknis, dan mempercepat penerimaan produk di pasar luar negeri (Juran, 1999).

➤ Konsep Mutu

Joseph M. Juran memandang mutu terutama sebagai *fitness for use* kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna; oleh karena itu mutu terkait dengan kegunaan dan nilai bagi pelanggan serta pengendalian proses agar produk benar-benar dapat dipakai sebagaimana mestinya. W. Edwards Deming menekankan mutu sebagai hasil dari system manajemen mutu diperoleh melalui perbaikan berkesinambungan, pengendalian variasi proses, dan kepemimpinan yang mengarahkan budaya organisasi menuju kualitas. ISO 9000 (keluarga standar manajemen mutu) memberikan definisi operasional dan kosakata mutu serta kerangka prinsip manajemen mutu yang membantu organisasi menerapkan pendekatan sistemik untuk mencapai konsistensi dan pemenuhan persyaratan.

Dimensi-dimensi mutu yang sering dipakai untuk menilai produk/jasa dijelaskan secara sistematis oleh David A. Garvin yang merumuskan delapan dimensi (*performance*/performa, *features*/fitur, *reliability*/ reliabilitas, *conformance*/kesesuaian terhadap spesifikasi, *durability*/ketahanan, *serviceability*/kemudahan perbaikan, *aesthetics*/estetika, *perceived quality*/penilaian yang dirasakan). Dari dimensi-dimensi ini, aspek seperti performa, reliabilitas, ketahanan (*durability*), kesesuaian (*conformance*), estetika, dan kepuasan pelanggan (yang tercerminkan dalam *perceived quality* dan *serviceability*) menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi mutu

produk dan layanan. Pendekatan dimensi membantu organisasi menentukan prioritas perbaikan sesuai harapan pasar dan sifat produk.

Mutu dapat dilihat dari beberapa perspektif teoretis: (a) *user-based* (berbasis pengguna) mutu diukur dari sejauh mana produk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan, (b) *manufacturing-based* mutu dipandang sebagai kesesuaian produk terhadap spesifikasi teknis dan minimnya cacat, (c) *value-based* mutu dinilai sebagai rasio manfaat terhadap biaya (*value for money*). Garvin membahas perbedaan perspektif ini (*user-based, product/manufacturing-based, value-based* dan juga *transcendent/product-based*) sehingga organisasi dapat memilih pendekatan mutu yang paling sesuai dengan strategi pemasaran dan karakter produk. Literatur manajemen mutu modern juga menekankan perlunya memadukan perspektif-perspektif tersebut agar kebijakan mutu relevan untuk pelanggan sekaligus efisien dari sisi operasi (Garvin, 1987).

Mutu memainkan peran sentral dalam membangun keunggulan kompetitif: produk/layanan berkualitas lebih mudah memenuhi ekspektasi pelanggan, mengurangi biaya kegagalan dan perbaikan, memperkuat citra merek, serta membuka akses ke pasar baru (termasuk pasar internasional melalui sertifikasi standar). Juran, Deming, dan literatur TQM/*Quality Management* menunjukkan bahwa pendekatan sistemik terhadap mutu (mis. pengendalian proses, perbaikan berkelanjutan, dan manajemen berbasis data) menurunkan cacat, meng-efisienkan sumber daya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan semua hal ini berkontribusi langsung terhadap daya saing organisasi. Oleh karena itu, investasi dalam sistem mutu dan sertifikasi (mis. ISO 9001) seringkali memberi pengembalian melalui peningkatan ke-percayaan pelanggan dan kinerja bisnis jangka panjang.

➤ Sertifikasi

Sertifikasi menurut ISO didefinisikan sebagai pemberian jaminan tertulis oleh pihak independen (sertifikasi body) bahwa produk, layanan, sistem atau personel memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam standar atau dokumen normative lain; dengan kata lain sertifikat adalah bukti tertulis tentang kesesuaian dengan persyaratan standar. Dokumen-dokumen CASCO/ISO menjelaskan proses penilaian kesesuaian dan peran badan sertifikasi dalam memberikan keyakinan pihak ketiga. Di tingkat nasional, BSN (Badan Standardisasi Nasional) juga menjelaskan sertifikasi produk/sistem sebagai mekanisme penilaian pihak ketiga untuk membuktikan bahwa suatu produk atau penerapan SNI memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan; BSN menerbitkan pedoman dan PSN yang mengatur model sertifikasi produk, akreditasi lembaga sertifikasi, serta pemberlakuan SNI.

Secara umum, sertifikasi dibedakan menjadi beberapa kategori praktis:

- a. Sertifikasi Produk, penilaian bahwa produk tertentu memenuhi persyaratan standar (SNI/ISO) dan aman untuk digunakan BSN menyediakan model dan pedoman untuk sertifikasi produk oleh pihak ketiga.
- b. Sertifikasi Sistem Manajemen, meliputi sertifikasi terhadap sistem manajemen mutu (mis. ISO 9001) dan sistem manajemen lingkungan (mis. ISO 14001). ISO menjelaskan bahwa organisasi dapat *seek certification/registration* terhadap standar seperti ISO 9001/ISO 14001 melalui badan sertifikasi terakreditasi untuk membuktikan penerapan sistem manajemen sesuai persyaratan standar. Dokumen pengenalan ISO 14001 dan teks ISO 9001 menjelaskan ruang lingkup dan tujuan kedua standar ini serta kemungkinan

organisasi memilih audit eksternal untuk mendapatkan sertifikat.

- c. Sertifikasi Kompetensi/Personel, penilaian dan pengakuan atas kemampuan individu (*competence*) sesuai skema kompetensi; jenis ini sering dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi personel yang terakreditasi. (Prinsip pengakuan kompetensi juga tercantum dalam cakupan penilaian kesesuaian).

Proses sertifikasi umumnya terdiri dari serangkaian tahapan berurutan: pemohon mengajukan permohonan dan menyerahkan dokumen awal, lembaga sertifikasi melakukan audit dokumen untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian bukti tertulis, dilanjutkan dengan audit lapangan (*on-site*) untuk verifikasi penerapan praktik/ ketentuan, kemudian evaluator menilai temuan audit dan menyusun rekomendasi, sehingga lembaga sertifikasi mengeluarkan keputusan penerbitan atau penolakan sertifikat; setelah sertifikat diterbitkan diadakan audit surveillance berkala untuk memastikan kesinambungan penerapan standar hingga masa berlakunya berakhir. Rangkaian tahapan ini tercantum dalam pedoman proses sertifikasi lembaga kompetensi dan juga praktik umum badan sertifikasi di Indonesia.

Audit (baik audit dokumen maupun audit lapangan) berfungsi sebagai mekanisme pembuktian objektif bahwa organisasi/produk/persona memenuhi persyaratan standar yang relevan auditor mengumpulkan bukti obyektif (dokumen, wawancara, observasi, catatan) untuk menilai kesesuaian, efektivitas penerapan sistem, dan konsistensi praktik. Audit internal dan eksternal saling melengkapi: audit internal membantu organisasi menyiapkan bukti dan memperbaiki ketidaksesuaian, sedangkan audit sertifikasi oleh badan independen memberikan pengakuan eksternal atas kesesuaian.

Prinsip, teknik, dan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan standar (mis. ISO 9001) dan praktik audit lembaga sertifikasi di Indonesia (Ichsan, 2020).

Masa berlaku sertifikat diatur baik oleh kebijakan badan sertifikasi maupun oleh peraturan teknis/khusus (mis. SNI, ISPO, atau ketentuan lembaga non-SNI). Pada praktik umum sertifikasi sistem manajemen, sertifikat diterbitkan untuk periode tertentu (sering 3 tahun untuk banyak sistem manajemen) dengan kewajiban *surveillance* periodik (mis. 1–2 kali per tahun) dan sertifikasi ulang di akhir periode agar validitas tetap terjaga. Ketentuan rinci tentang masa berlaku dan persyaratan perpanjangan atau pembatasan ruang lingkup biasanya tercantum dalam syarat & ketentuan badan sertifikasi dan peraturan teknis kementerian terkait.

Persyaratan administratif meliputi pengajuan formulir, identitas pemohon, lingkup sertifikasi, kontrak/perjanjian layanan, serta bukti pembayaran; persyaratan teknis mencakup dokumen sistem (manual mutu, prosedur, instruksi kerja), catatan pelaksanaan, rekaman audit internal, hasil pengukuran/kalibrasi, dan bukti pemenuhan klausul standar (mis. klausul ISO yang relevan). Lembaga sertifikasi juga menetapkan kriteria tambahan seperti kompetensi personel, pengendalian perubahan ruang lingkup, dan persyaratan fasilitas/alat yang terkait. Kelengkapan dokumen administratif dan teknis menjadi dasar pemeriksaan pada tahap audit dokumen dan poin acuan saat verifikasi lapangan.

➤ **Hubungan Standar Mutu dan Sertifikasi**

Standar mutu seperti standar sistem manajemen mutu *International Organization for Standardization* (ISO) 9001 menyediakan kerangka normatif yang jelas mengenai persyaratan kualitas, prosedur, dokumentasi, dan proses

pengendalian mutu. Organisasi yang ingin mendapatkan sertifikasi harus terlebih dahulu menerapkan sistem, proses, dan dokumentasi sesuai persyaratan standar tersebut. Dalam literatur mengenai penerapan SM–ISO 9001 di berbagai institusi (termasuk pendidikan atau layanan) disebutkan bahwa penerapan sistem mutu berdasarkan standar ISO 9001 / SNI menjadi acuan utama dalam persiapan audit dan sertifikasi. Dengan demikian, standar mutu berfungsi sebagai “landasan” tanpa standar yang jelas dan terdokumentasi, proses sertifikasi tidak dapat berlangsung secara konsisten dan objektif (Nafis, 2025).

Sertifikasi muncul sebagai mekanisme formal yang memberikan pengakuan bahwa organisasi, produk, atau layanan telah memenuhi persyaratan standar mutu tertentu. Sebagai contoh, organisasi yang lolos audit eksternal terhadap standar ISO 9001 mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu mereka konsisten memenuhi standar internasional, menunjukkan bahwa produk/jasa dihasilkan dengan prosedur yang terstandar. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan ISO 9001 dan sertifikasi terkait membantu lembaga menjaga konsistensi mutu, dokumentasi, dan prosedur serta memberi penghargaan formal berupa sertifikat. Dengan demikian, sertifikasi berfungsi sebagai “pembuktian resmi” bahwa organisasi telah menjalankan standar mutu sehingga dapat digunakan sebagai alat legitimasi kepada pelanggan, regulator, atau mitra usaha.

Adanya sertifikasi mendorong organisasi untuk melakukan kontrol mutu secara lebih sistematis karena audit eksternal maupun internal menuntut dokumentasi, prosedur, pengukuran, evaluasi, dan perbaikan ber-kelanjutan. Misalnya, pada perusahaan yang menerapkan ISO 9001 menunjukkan bahwa sertifikasi membantu mengidentifikasi kekurangan

proses, me-minimalkan kesalahan mutu, meningkatkan efisiensi, dan menguatkan komitmen manajemen terhadap kualitas. Selain itu, sertifikasi meningkatkan kredibilitas dan citra merek (*brand image*) karena pelanggan atau pemangku kepentingan melihat sertifikat sebagai jaminan bahwa produk/jasa diproduksi/pengelolaan secara profesional dan sesuai standar. Hal ini penting terutama di pasar yang kompetitif atau ketika kualitas dan reputasi sangat diutamakan. Literatur manajemen mutu menyebut bahwa kepercayaan eksternal baik pelanggan maupun regulator sering meningkat setelah organisasi mem-peroleh sertifikasi resmi (Putra dkk., 2023).

Sistem manajemen mutu (*Quality Management System / QMS*) seperti yang ditetapkan oleh ISO 9001 bertindak sebagai struktur organisasional untuk menerjemahkan standar mutu ke dalam proses nyata, prosedur, kontrol, dokumentasi, dan evaluasi. Ketika QMS dijalankan secara konsisten dan kemudian diaudit untuk sertifikasi, maka kombinasi antara standar, implementasi manajemen, serta sertifikasi formal menghasilkan sistem mutu menyeluruh yang selaras dengan filosofi *Total Quality Management* (TQM). Studi di berbagai organisasi pendidikan, konstruksi, layanan menunjukkan bahwa penerapan SM-ISO 9001 disertai audit dan sertifikasi membantu institusi menegakkan prosedur mutu, mengontrol proses, meningkatkan transparansi, dan melakukan perbaikan berkesinambungan.

➤ **Konsep Standar Mutu dan Sertifikasi**

Standar mutu dan sertifikasi menjadi krusial bagi komoditas perkebunan karena membantu menjamin keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan akses pasar baik pasar domestik maupun ekspor. Bagi komoditas strategis seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao, penerapan standar memperbaiki nilai tambah produk, mengurangi risiko penolakan di pasar

internasional, dan mendorong praktik budidaya yang berkelanjutan sehingga mendukung keberlanjutan rantai nilai perkebunan. Trimadya, (2024) pentingnya standarisasi yaitu untuk meningkatkan daya saing, mutu, dan keamanan maka pelaku usaha didorong untuk menerapkan dan mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi agar komoditas yang dihasilkan dapat dibubuhkan Tanda SNI. Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi berfungsi tidak hanya sebagai alat perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan daya saing sektor pertanian (Rouf, 2025). Standar mutu adalah dokumen teknis yang merumuskan persyaratan, spesifikasi, atau kriteria (mis. kualitas fisik, kandungan residu, metode uji) yang harus dipenuhi produk atau proses agar dianggap layak edar dan aman. Sertifikasi adalah proses penilaian independen oleh lembaga terakreditasi yang mem-verifikasi dan membuktikan bahwa produk, sistem, atau unit produksi memenuhi standar yang ditetapkan; hasilnya berupa sertifikat yang menjadi bukti kepatuhan. Di Indonesia, SNI (Standar Nasional Indonesia) dan mekanisme penilaian oleh BSN serta lembaga sertifikasi menjadi rujukan utama dalam menetapkan dan menguji kepatuhan mutu.

Prinsip utama meliputi kesesuaian (*conformity*) terhadap persyaratan teknis, konsistensi mutu antar *batch*, keselamatan dan pelestarian lingkungan, serta perbaikan berkelanjutan melalui monitoring dan audit berkala. Dalam konteks perkebunan, prinsip tersebut berarti penerapan praktik budidaya yang terukur (mis. pengendalian residu pestisida, tata kelola lahan), pencatatan yang transparan, dan mekanisme audit yang memverifikasi kepatuhan sosial-lingkungan semua bertujuan menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mengurangi risiko pasar. Literatur Indonesia juga menekankan

peran MSTQ (Pengukuran, Standardisasi, Pengujian, Jaminan Mutu) untuk menjamin akurasi penilaian mutu (Setyowati, 2006). Dalam konteks perkebunan, prinsip tersebut diwujudkan melalui penerapan praktik budidaya yang terukur (mis. pengendalian residu pestisida, tata kelola lahan), pencatatan yang transparan, dan mekanisme audit yang memverifikasi kepatuhan sosial-lingkungan sejalan dengan konsep *Good Agricultural Practices* (GAP) yang menuntut pemantauan, pencatatan dan audit untuk menjamin produk aman dan ramah lingkungan.

Jenis standar yang relevan meliputi: (a) Standar produk/SNI (mis. SNI untuk produk olahan atau metode uji), (b) standar sistem manajemen mutu dan lingkungan seperti ISO 9001 dan ISO 14001, (c) standard dan sertifikasi keberlanjutan sektor perkebunan seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan RSPO untuk sawit, serta (d) sertifikasi organik / GAP (*Good Agricultural Practices*) yang mengatur praktik budidaya tanpa input terlarang. Di lapangan, kombinasi beberapa jenis sertifikasi ini sering dipakai perusahaan perkebunan untuk memenuhi tuntutan pasar, regulasi, dan preferensi pembeli internasional (Hadi dkk., 2023).

➤ **Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional**

Standar mutu dan sertifikasi internasional memegang peranan penting dalam memastikan produk perkebunan Indonesia memenuhi persyaratan pasar global meliputi aspek mutu fisik, residu kimia, keterlacakan, serta praktik keberlanjutan sosial-lingkungan. Kepatuhan terhadap standar seperti Global G.A.P., RSPO (untuk sawit), *Rainforest Alliance*, *Fairtrade*, dan standar organik menjadi syarat masuk ke sejumlah pasar premium dan ritel internasional; studi pada sektor kopi dan kelapa sawit menunjukkan bahwa adopsi sertifikasi meningkatkan peluang

akses pasar dan mengurangi risiko penolakan ekspor (Putro dkk., 2024). Indonesia menyoroti bahwa untuk komoditas seperti kopi dan CPO, kepatuhan terhadap standar internasional meningkatkan daya saing tapi juga menimbulkan biaya tambahan bagi produsen dan kelompok tani yang harus dikelola melalui dukungan kebijakan dan pembiayaan.

Beberapa organisasi dan mekanisme sertifikasi internasional yang relevan bagi komoditas perkebunan meliputi:

- a. GlobalG.A.P. fokus pada praktik pertanian baik (GAP) dan keselamatan pangan
- b. RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) standar sukarela untuk keberlanjutan kelapa sawit yang menekankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola
- c. *Rainforest Alliance* / UTZ, *Fairtrade* sertifikasi yang menekankan kesejahteraan petani, harga minimum, dan praktik berkelanjutan
- d. Standar organik internasional (mis. EU Organic, USDA Organic) untuk pasar organik
- e. ISO (mis. ISO 22000 untuk keamanan pangan, ISO 14001 untuk manajemen lingkungan) yang sering digunakan untuk sistem manajemen perusahaan.

Studi kasus singkat pada perusahaan perkebunan yang menerapkan sertifikasi menunjukkan langkah-langkah implementasi, hasil, dan tantangannya. Misalnya, perusahaan yang awalnya hanya memegang sertifikasi nasional (ISPO) memulai program peningkatan mutu dan keterlacakan untuk memenuhi persyaratan RSPO: standardisasi prosedur panen dan pengolahan, pen-catatan digital keterlacakan, pelatihan petani plasma, serta investasi infrastruktur laboratorium untuk pengujian mutu CPO (moisture, FFA, dirt). Hasil setelah 12–24 bulan meliputi peningkatan area tersertifikasi, pengurangan

klaim kualitas, dan akses ke pembeli Eropa yang mensyaratkan RSPO tetapi diiringi biaya awal yang signifikan dan kebutuhan dukungan teknis bagi petani kecil. Kombinasi sertifikasi nasional dan internasional dapat memperkuat akses pasar bila disertai kebijakan pendukung dan mekanisme pembiayaan (Hadi dkk., 2023).

➤ **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**

Pemerintah Indonesia memainkan peran sentral dalam menetapkan regulasi dan kebijakan yang mengatur standar mutu serta mekanisme sertifikasi bagi komoditas perkebunan untuk tujuan ekspor; kebijakan ini mencakup pembuatan dan penegakan Standar Nasional Indonesia (SNI), skema sertifikasi sektoral (mis. ISPO untuk kelapa sawit), serta harmonisasi regulasi dengan persyaratan mitra dagang internasional. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 mewajibkan penerapan sistem sertifikasi ISPO untuk rantai pasok kelapa sawit sebagai upaya meningkatkan legalitas, tata kelola, dan keberlanjutan produksi kebijakan yang diperkuat dengan peraturan sektoral berikutnya dan program percepatan sertifikasi untuk pekebun kecil. Selain itu, BSN dan kementerian terkait mendorong penyusunan SNI, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, dan sinkronisasi SNI dengan standar internasional agar produk perkebunan Indonesia lebih mudah diterima di pasar ekspor; literatur Indonesia menyoroti bahwa kebijakan ini meningkatkan daya saing sekaligus menimbulkan tantangan pembiayaan dan kesiapan petani kecil yang memerlukan dukungan teknis.

Pemerintah memegang peran kunci dalam penguatan standar mutu dan mekanisme sertifikasi melalui pembuatan regulasi, penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI), akreditasi lembaga sertifikasi, serta fasilitas dukungan teknis

dan pembiayaan untuk pelaku usaha. Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertanggung jawab merumuskan dan mempromosikan SNI sebagai acuan teknis yang menjadi rujukan pelaku industri dan eksportir; sementara kementerian terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan) menyusun peraturan sektoral, pedoman sertifikasi, serta program pendampingan agar produsen dapat memenuhi standar tujuan ekspor. Kebijakan pemerintah juga mencakup upaya harmonisasi SNI dengan standar internasional, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, dan skema insentif untuk mendorong adopsi sertifikasi, yang bersama-sama dimaksudkan untuk meningkatkan akses pasar dan melindungi konsumen.

Kebijakan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) menjadi contoh nyata peran pemerintah dalam mengatur standar sektoral; ISPO yang dirancang melalui peraturan menteri dan diperkuat oleh Peraturan Presiden No.44/2020 mewajibkan sertifikasi bagi pelaku usaha sawit untuk menegakkan legalitas, tata kelola, aspek lingkungan, dan aspek sosial dalam produksi kelapa sawit. Implementasi ISPO di lapangan memperlihatkan langkah-langkah kebijakan seperti penetapan pedoman sertifikasi, audit kepatuhan, serta program percepatan sertifikasi untuk mendukung petani plasma dan perusahaan kecil namun studi menunjukkan tantangan seperti kebutuhan harmonisasi ISPO dengan persyaratan mitra dagang (mis. EUDR), beban biaya sertifikasi bagi petani kecil, dan kebutuhan peningkatan kapasitas pengawasan (Husna dkk, 2023). Kebijakan penguatan SNI dan upaya harmonisasi standar juga tercatat sebagai strategi pemerintah untuk memperkuat posisi tawar produk ekspor Indonesia.

➤ Ringkasan

Standar mutu dan sertifikasi memegang peran strategis dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan, terutama untuk memenuhi tuntutan pasar ekspor yang semakin ketat terhadap aspek keamanan pangan, kualitas, serta keberlanjutan lingkungan. Regulasi pemerintah melalui SNI, ISPO, serta kebijakan harmonisasi dengan standar internasional menjadi instrumen penting untuk memastikan kepatuhan, meningkatkan kredibilitas produk, dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Studi kasus pada industri sawit menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi memberi manfaat signifikan seperti peningkatan tata kelola dan akses pasar, namun tetap menghadapi tantangan berupa kapasitas teknis, pembiayaan sertifikasi, dan dukungan bagi petani kecil. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan standar mutu dan sertifikasi memerlukan kombinasi regulasi yang kuat, dukungan teknis, dan komitmen pelaku usaha dalam menjaga konsistensi mutu produk.

BAB II

Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional

Dalam era globalisasi, arus perdagangan internasional semakin terbuka dan kompetitif. Produk dari berbagai negara bersaing memasuki pasar global dengan me-nawarkan kualitas, keamanan, dan keunggulan masing-masing. Kondisi ini menuntut setiap pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, untuk mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu yang diakui secara internasional. Tanpa adanya pe-menuhan standar tersebut, produk akan sulit diterima, bahkan dapat ditolak di pasar internasional akibat tidak terpenuhinya persyaratan teknis, kesehatan, keamanan, maupun lingkungan.

Standar mutu dan sertifikasi internasional hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi kriteria tertentu yang disepakati oleh lembaga standardisasi global. Standar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga konsistensi kualitas, tetapi juga sebagai bentuk jaminan kepada konsumen dan mitra dagang bahwa produk yang dihasilkan aman, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa standar internasional yang sering diterapkan meliputi ISO 9001 untuk manajemen mutu, HACCP untuk keamanan pangan, hingga sertifikasi komoditas khusus seperti RSPO untuk minyak sawit berkelanjutan.

Dalam konteks perdagangan komoditas, khususnya sektor perkebunan, standar mutu memainkan peran krusial. Banyak negara tujuan ekspor menerapkan regulasi ketat terhadap komoditas impor untuk melindungi konsumen dan menjaga persaingan usaha. Oleh karena itu, negara produsen seperti Indonesia wajib memastikan bahwa komoditas perkebunannya seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh telah memenuhi standar internasional sehingga dapat diterima dan memiliki daya saing tinggi di pasar global. Penerapan standar ini juga berdampak positif terhadap efisiensi produksi, pengurangan risiko, peningkatan kepercayaan investor, hingga peningkatan keberlanjutan usaha.

Implementasi standar mutu dan sertifikasi internasional memberikan banyak manfaat karena dapat menjamin keamanan produk dengan pengawasan standar mutu yang ketat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai jenis standar mutu dan sertifikasi internasional untuk produk ekspor komoditas perkebunan, organisasi standar mutu dan sertifikasi internasional, serta studi kasus standar mutu dan sertifikasi internasional untuk produk ekspor komoditas perkebunan agar mampu bersaing di pasar global.

➤ **Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional**

Standar merupakan persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Penerapan standar dilakukan dengan melibatkan piranti penilaian kesesuaian untuk membuktikan kesesuaian

dengan standar tersebut (Susanto, 2024). Oleh karenanya, standar mutu berarti persyaratan teknis berdasarkan ketentuan yang dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat mutu tertentu untuk memperoleh manfaat sebesar besarnya.

Sertifikasi internasional merupakan bentuk pengakuan untuk perusahaan dari lembaga sertifikasi untuk perdagangan global karena membantu perusahaan memenuhi regulasi, meningkatkan reputasi, mengakses pasar baru, dan mengelola risiko.

Standar mutu dan sertifikasi internasional merupakan pedoman atau ketentuan yang dibuat secara universal dan berlaku untuk seluruh dunia, yang bertujuan untuk memastikan keseragaman keamanan dan kualitas dalam berbagai aspek produk, jasa atau sistem manajemen. Standar ini dikembangkan oleh badan standar internasional seperti ISO (*International Organization for Standardization*) dan digunakan sebagai acuan oleh organisasi di berbagai negara untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka hasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diakui secara global (Aisyah dkk, 2025).

➤ **Manfaat Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional**

Menurut Radiyyah dkk, (2024), standar mutu dan sertifikasi internasional memberikan banyak manfaat diantaranya:

- a. Kualitas yang Konsisten: Standarisasi mutu dan sertifikasi internasional memastikan kualitas yang konsisten dari barang dan layanan. Dengan adopsi standar yang sama, produsen dapat memastikan bahwa setiap unit produk yang diproduksi memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan konsistensi dalam kualitas yang diberikan kepada konsumen. Ini memperkuat kepercayaan konsumen terhadap merek dan produk yang mereka beli.

- b. Efisiensi Produksi: Dengan Standarisasi mutu dan sertifikasi internasional, proses produksi menjadi lebih efisien. Produsen dapat menggunakan metode produksi yang seragam untuk berbagai pasar, mengurangi kebutuhan akan variasi produk yang signifikan. Ini menghemat biaya produksi dan distribusi serta meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan.
- c. Perluasan Pasar: Standarisasi mutu dan sertifikasi internasional memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah memasuki pasar internasional. Dengan memenuhi standar yang diakui secara global, produk lebih mudah diterima oleh pasar internasional tanpa harus menghadapi hambatan teknis atau persyaratan kualitas yang berbeda.
- d. Keselamatan dan Keamanan: Standarisasi mutu dan sertifikasi internasional juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan lingkungan. Standar keselamatan produk memastikan bahwa produk tidak hanya efektif, tetapi juga aman digunakan. Ini melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan tertentu.
- e. Inovasi yang Terarah: Standarisasi mutu dan sertifikasi internasional mendorong inovasi yang terarah. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai standar kualitas atau kinerja yang diterima, perusahaan didorong untuk terus mengembangkan teknologi baru atau metode produksi yang dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar yang ada.
- f. Harmonisasi Internasional: Standarisasi mutu dan sertifikasi internasional juga memfasilitasi harmonisasi internasional. Dengan memiliki standar yang serupa di berbagai negara, proses perdagangan lintas batas menjadi lebih lancar, mengurangi hambatan teknis dan administratif.

Dalam keseluruhan, standarisasi produk membawa kepastian, efisiensi, keamanan, dan kesesuaian global, yang pada akhirnya menguntungkan produsen, konsumen, dan perekonomian keseluruhan.

➤ **Tantangan Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional**

Menurut Wardana (2023), standar mutu dan sertifikasi internasional terdapat beberapa tantangan dalam proses implementasinya diantaranya:

a. Biaya tinggi.

Setelah Bagi perusahaan besar, biaya tersebut mungkin tidak menjadi masalah signifikan. Namun, bagi usaha kecil dan menengah, biaya yang tinggi sering menjadi hambatan utama sehingga mereka sulit memperoleh sertifikasi. Akibatnya, akses mereka ke pasar ekspor menjadi terbatas karena banyak negara atau mitra dagang hanya menerima produk bersertifikat. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan daya saing antara perusahaan besar dan kecil.

b. Kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi.

Setiap standar internasional memiliki persyaratan yang cukup rinci dan ketat. Misalnya, ISO 9001 mengharuskan perusahaan memiliki dokumentasi prosedur, sistem pemantauan mutu, pelatihan SDM, manajemen risiko, dan audit internal. Sementara sertifikasi pangan seperti HACCP mewajibkan identifikasi titik bahaya kritis, higienitas ketat, serta pengendalian mutu yang konsisten. Jika perusahaan tidak memiliki pengalaman dalam sistem manajemen mutu, memenuhi seluruh persyaratan menjadi tantangan besar dan memerlukan waktu panjang untuk menyesuaikan.

c. Perubahan yang diperlukan dalam proses produksi

Penerapan standar dan sertifikasi internasional tidak hanya sebatas penyusunan dokumen, tetapi sering kali menuntut

perubahan nyata dalam proses produksi. Perubahan-perubahan ini sering menuntut biaya tambahan, waktu, tenaga, dan komitmen manajemen. Bagi perusahaan yang sudah lama beroperasi dengan metode lama, penyesuaian proses produksi bisa dianggap menyulitkan atau mengganggu ritme kerja yang sudah terbentuk.

➤ **Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional untuk Produk Ekspor Komoditas Perkebunan**

Standar mutu dan sertifikasi internasional untuk produk ekspor komoditas perkebunan (seperti kopi, teh, kakao, kelapa sawit, dan karet) bertujuan memastikan kualitas, keamanan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi global. Beberapa standar utama meliputi:

ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu):

Penerapan ISO 9001 di Sektor Perkebunan menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, menjaga standar kualitas yang ketat, menjaga daya saing, serta memperkuat kepercayaan konsumen di pasar internasional.

Menurut Multi Sertifikasi Indonesia, Sertifikasi ISO 9001 menjadi salah satu syarat penting bagi perusahaan perkebunan sawit untuk menembus pasar global. Dengan memenuhi standar ini, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan internasional.

HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*)

HACCP merupakan sertifikasi yang mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya spesifik, yang merupakan standar jaminan mutu dan keamanan pangan yang diakui secara internasional. Penerapan HACCP bagi ekspor komoditas perkebunan sangat penting karena merupakan per-syaratan

utama untuk memastikan keamanan pangan dan memenuhi regulasi di pasar internasional seperti Uni Eropa, AS, dan Asia.

GMP (*Good Manufacturing Practices*)

Penerapan GMP sangat penting dan sering kali wajib untuk ekspor komoditas perkebunan seperti teh, karena ini adalah standar fundamental untuk menjamin keamanan, mutu, dan konsistensi produk pangan. Kepatuhan terhadap GMP membantu produsen memenuhi persyaratan regulasi pasar internasional dan membangun kepercayaan konsumen global.

Menurut Prayitno (2022), GMP yang diterapkan PTPN XII untuk mengendalikan proses produksi melalui produksi makanan yang baik dengan melibatkan beberapa faktor dan pengawasan yang ketat untuk menghasilkan makanan yang berkualitas atau bermutu sesuai dengan standar keamanan makanan, dan juga digunakan untuk mendukung misi perusahaan meningkatkan nilai & daya saing perusahaan.

Standar Keberlanjutan: *Fairtrade*, *Rainforest Alliance*, dan RSPO

Sertifikasi *Fairtrade*, *Rainforest Alliance*, RSPO merupakan sertifikasi penting terutama di pasar Eropa dan Amerika, yang menekankan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Sertifikasi ini bukanlah kewajiban regulasi pemerintah Indonesia, melainkan persyaratan pasar global untuk menunjukkan praktik produksi yang bertanggung jawab.

Sertifikasi Fairtrade berfokus mengatasi ketidaksetaraan sistemik dalam perdagangan global dengan memastikan produsen dan petani kecil menerima harga yang adil dan stabil (jaminan harga minimum). Fairtrade menawarkan harga kopi yang lebih tinggi dan lebih stabil bagi petani, membantu mereka mengatasi perubahan harga pasar dan memastikan mereka mendapatkan pendapatan yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka. Ini adalah bukti komitmen Fairtrade terhadap praktik perdagangan yang adil dan keberlanjutan jangka panjang bagi petani kopi (Felix, 2024).

Rainforest Alliance merupakan sertifikasi yang mendorong keberlanjutan pertanian secara luas melalui intervensi yang mencakup tiga pilar (lingkungan, sosial, dan ekonomi), dengan penekanan kuat pada konservasi ekosistem dan ketertelusuran.

Sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) adalah sistem sertifikasi global untuk minyak sawit berkelanjutan yang menjamin bahwa produk minyak sawit dan turunannya berasal dari perkebunan yang memenuhi standar lingkungan dan sosial tertentu. Sistem ini bertujuan untuk mendorong praktik produksi minyak sawit yang berkelanjutan dengan melindungi lingkungan, masyarakat, karyawan, dan satwa liar.

Menurut Wisnubroto (2025), Di Eropa, konsumen semakin menuntut produk bersertifikat ramah lingkungan seperti *Fair Trade*, *Rainforest Alliance*, atau RSPO. Hal ini memaksa eksportir dari negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam untuk mengadopsi standar keberlanjutan agar produk mereka dapat diterima di pasar global.

➤ **Organisasi Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional**

Berbagai organisasi internasional mengembangkan dan mengawasi standar ini untuk memfasilitasi perdagangan global. Organisasi utama meliputi:

ISO (International Organization for Standardization)

Berbasis di Jenewa, mengembangkan standar seperti ISO 22000 untuk keamanan pangan, yang relevan untuk komoditas perkebunan. Lebih dari 160 negara anggota.

Codex Alimentarius Commission (CAC)

Dibentuk oleh FAO dan WHO, menetapkan standar global untuk pangan, termasuk batas residu pestisida pada produk perkebunan seperti kopi dan teh.

FAO (Food and Agriculture Organization)

Bagian dari PBB, menyediakan panduan untuk sertifikasi keberlanjutan, seperti dalam program *Better Cotton Initiative* untuk kapas atau *Sustainable Agriculture Network* untuk kakao.

WTO (World Trade Organization)

Mengawasi perjanjian seperti SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*), yang memastikan standar kesehatan dan keamanan untuk ekspor komoditas.

Organisasi Sertifikasi Khusus

Fairtrade International, *Rainforest Alliance*, dan *GlobalGAP (Good Agricultural Practices)*, yang fokus pada aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, *Rainforest Alliance* mensertifikasi lebih dari 4 juta hektar lahan perkebunan global. Organisasi ini berkolaborasi untuk harmonisasi standar, seperti melalui kerja sama FAO-WTO, me-mudahkan eksportir Indonesia atau negara berkembang mematuhi regulasi.

➤ Studi Kasus: Standar Mutu dan Sertifikasi Internasional untuk Produk Ekspor Komoditas Perkebunan

PTPN IV Regional 7 menghadapi tantangan berupa ketatnya standar kualitas dan keberlanjutan dari negara tujuan ekspor. Negara-negara importir mensyaratkan bahwa produk sawit harus aman dikonsumsi, diproduksi secara berkelanjutan, memenuhi standar teknis dan keamanan pangan, dan telusur asal-usulnya (*traceability*). Karena itu, PTPN IV wajib memenuhi

berbagai sertifikasi mutu internasional yang diakui secara global (Pratiwi dkk, 2024).

Dalam kegiatan ekspor komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, standar mutu dan sertifikasi internasional menjadi aspek sangat penting untuk memastikan produk dapat diterima di pasar global. Berdasarkan studi kasus PTPN IV Regional 7, perusahaan ini telah menerapkan berbagai sertifikasi untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk sawitnya.

PTPN Group (termasuk PTPN IV Regional 7) memperoleh sejumlah sertifikasi internasional untuk memastikan produknya diterima di pasar dunia. Sertifikasi tersebut mencakup:

a. ISO 9001 – Sistem Manajemen Mutu

Sertifikasi ISO 9001 menjamin proses produksi dilakukan secara konsisten dan terkontrol, serta mengatur standar kualitas dari hulu hingga hilir. Sertifikasi ISO 9001 disebut sebagai langkah strategis PTPN IV untuk memastikan kualitas CPO yang stabil sebelum masuk ke pasar global, sehingga dapat membantu PTPN IV Regional 7 menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan stabil dan memenuhi ekspektasi pasar.

b. ISO 22000 – Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Sertifikasi ISO 22000 menjamin bahwa produk CPO yang dihasilkan aman digunakan sebagai bahan pangan maupun industri, bebas dari kontaminasi dan risiko bahaya makanan, serta mengikuti prinsip HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*). Mengatur keamanan pangan pada rantai produksi CPO dan produk turunan. ISO 22000 memperkuat kepercayaan pembeli internasional karena banyak negara importir yang menuntut *traceability* dan keamanan konsumsi.

- c. *ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)*
Sertifikasi ISCC merupakan sertifikasi keberlanjutan global yang memastikan produk telah memenuhi prinsip keberlanjutan, tidak berasal dari lahan deforestasi, emisi karbon dipantau dan dikurangi, serta mematuhi aspek sosial seperti hak pekerja. PTPN IV menggunakan ISCC untuk memenuhi tuntutan Eropa yang memiliki regulasi keberlanjutan paling ketat.
- d. *Rainforest Alliance Certification*
Sertifikasi ini menunjukkan bahwa produk sawit diproduksi tanpa merusak hutan, menghormati hak tenaga kerja, dan memperhatikan keanekaragaman hayati. Rainforest Alliance memperkuat citra brand sawit Indonesia di pasar premium global.
- e. *GMP (Good Manufacturing Practices)*
Sertifikasi ini mendukung pengolahan produk yang higienis, pengendalian proses produksi, dan pencegahan kontaminasi selama produksi CPO/PKO. Good Manufacturing Practices menjadi standar penting bagi PTPN IV.
- f. *ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)*
Sertifikasi nasional yang dirancang pemerintah Indonesia untuk memastikan keberlanjutan industri sawit nasional, mendukung kepatuhan hukum perusahaan, dan meningkatkan daya saing secara global. Walaupun lokal, ISPO semakin diakui di pasar internasional.
- g. *Halal Certification*
Halal *Certification* dibutuhkan karena banyak negara tujuan ekspor (terutama Timur Tengah dan Asia) mewajibkan produk pangan memiliki status halal.

BAB III

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi besar terhadap lapangan pekerjaan dan pendapatan petani. Komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet menjadi penyumbang utama dalam nilai ekspor nonmigas Indonesia. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa produk perkebunan memiliki daya saing tinggi dan permintaan yang stabil di pasar global. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan kompetitif dari negara lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Brazil. Persaingan global ini menuntut Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas dan standar produk perkebunannya (Irham dkk, 2024).

Dalam perdagangan internasional, negara tujuan ekspor menetapkan berbagai persyaratan mutu yang harus dipenuhi agar produk dapat diterima di pasar mereka. Standar mutu seperti SNI, ISO, GAP, dan HACCP diperlukan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan konsistensi produk perkebunan.

Sertifikasi berfungsi sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan tersebut dan layak masuk ke pasar global. Tanpa pemenuhan standar ini, produk Indonesia berisiko ditolak atau dibatasi aksesnya di negara tujuan. Oleh karena itu, pemenuhan standar mutu dan sertifikasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekspor komoditas perkebunan (Hamid dkk, 2025).

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun dan menerapkan regulasi untuk menjamin kualitas dan keamanan produk ekspor perkebunan. Melalui berbagai kebijakan standarisasi dan sertifikasi, pemerintah memastikan bahwa produk Indonesia sesuai dengan persyaratan global. Regulasi ini juga berfungsi melindungi konsumen dan meningkatkan reputasi produk Indonesia di pasar internasional. Selain itu, kebijakan tersebut membantu pelaku usaha memahami prosedur ekspor yang benar. Dengan adanya regulasi yang kuat, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produk perkebunannya di tingkat global.

Implementasi regulasi dan standar mutu seringkali menghadapi kendala di level petani dan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami pentingnya standarisasi serta prosedur sertifikasi yang harus dijalankan. Selain itu, biaya sertifikasi yang relatif tinggi menjadi hambatan bagi petani kecil untuk memperoleh sertifikat. Minimnya fasilitas pendukung seperti laboratorium uji mutu dan lembaga sertifikasi juga menghambat proses pemenuhan standar. Tidak hanya itu, koordinasi antarinstansi pemerintah yang belum optimal turut memperlambat efektivitas regulasi yang sudah diterapkan.

Peran pemerintah menjadi semakin penting untuk memperkuat mutu dan sertifikasi agar produk perkebunan Indonesia mampu bersaing di pasar global. Pemerintah perlu

memberikan pendampingan, sosialisasi, dan fasilitas teknis kepada petani agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan perlu diperkuat sebagai bentuk respons terhadap perubahan persyaratan dari negara tujuan ekspor. Evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah diterapkan sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut bekerja di lapangan. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat memastikan peningkatan kualitas produk perkebunan secara berkelanjutan.

➤ **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan**

Konsep Standar Mutu dalam Perdagangan Internasional

Standar mutu dalam perdagangan internasional merupakan seperangkat ketentuan yang digunakan untuk memastikan suatu produk memenuhi persyaratan tertentu. Standar ini mencakup aspek keamanan, kualitas, kesehatan, dan keberlanjutan. Dalam perdagangan global, standar mutu sangat penting karena menentukan diterima atau ditolaknya suatu produk di negara tujuan ekspor. Negara pengimpor biasanya menerapkan standar yang ketat untuk melindungi konsumen dan lingkungan. Oleh karena itu, produk perkebunan yang tidak sesuai standar memiliki risiko besar ditolak (Nasution dkk, 2022).

Jenis standar mutu yang berlaku mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar negara tujuan ekspor. Selain itu, terdapat standar internasional seperti ISO, HACCP, GAP, dan GMP yang umum digunakan dalam perdagangan global. Setiap standar memiliki kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sebagai contoh, HACCP mengatur aspek keamanan pangan, sedangkan GAP fokus pada praktik budidaya yang baik. Pemenuhan standar ini menjadi bukti

bahwa produk memenuhi persyaratan yang diakui secara internasional (Astagia dkk, 2022).

Kerangka Regulasi Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar pengaturan kualitas komoditas perkebunan. SNI berfungsi sebagai panduan teknis untuk memastikan produk perkebunan memiliki kualitas yang sesuai kebutuhan pasar. Penerapan SNI dapat bersifat wajib maupun sukarela tergantung pada komoditas dan regulasi yang berlaku. Selain itu, SNI memastikan adanya keseragaman mutu produk nasional. Hal ini membuat produk Indonesia mampu berkompetisi di pasar global (Trimadya dkk, 2024).

Selain SNI, pemerintah juga mengeluarkan berbagai Peraturan Menteri yang mengatur mutu dan keamanan produk ekspor. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BPOM. Aturan-aturan ini mencakup ketentuan budidaya, pascapanen, pengolahan, hingga distribusi produk. Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan agar produk yang diekspor aman dikonsumsi masyarakat internasional. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan ekspor.

Sistem Sertifikasi Produk Perkebunan

Sertifikasi produk perkebunan terdiri dari beberapa jenis seperti sertifikasi mutu, sertifikasi keberlanjutan, dan sertifikasi keamanan pangan. Masing-masing sertifikasi memiliki tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan pasar. Sertifikasi mutu memastikan kualitas fisik dan teknis produk sesuai standar. Sertifikasi keberlanjutan menilai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sementara sertifikasi keamanan pangan memastikan produk aman dikonsumsi dan bebas dari kontaminan.

Mekanisme sertifikasi dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pendaftaran, audit lapangan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat. Proses ini harus dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakui dan memiliki kompetensi teknis. Pelaku usaha perlu mempersiapkan berbagai dokumen dan bukti penerapan standar. Setelah sertifikat diterbitkan, pihak perusahaan wajib mengikuti audit berkala untuk memastikan kepatuhan tetap terjaga. Prosedur ini bertujuan memastikan konsistensi mutu produk yang diekspor.

Di Indonesia, terdapat berbagai lembaga sertifikasi yang berperan mendukung proses sertifikasi produk perkebunan. Lembaga-lembaga ini dapat berasal dari sektor pemerintah maupun swasta. Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi lembaga yang menetapkan standar dan mengakreditasi lembaga sertifikasi. Selain itu, lembaga sertifikasi internasional juga turut beroperasi untuk komoditas tertentu seperti kelapa sawit dan kopi. Keberadaan lembaga tersebut membantu memastikan sertifikasi dilakukan secara profesional dan sesuai standar global (Notohamijoyo, 2023).

➤ **Peran Pemerintah dalam Penguatan Standar Mutu dan Sertifikasi**

Peran Regulator

Pemerintah berperan sebagai regulator yang menyusun aturan dan standar mutu produk perkebunan untuk memandu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan kualitas. Regulasi yang disusun melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sehingga menghasilkan kepastian hukum dalam ekspor. Aturan ini menjadi dasar penting untuk menjaga mutu produk nasional. Pemerintah juga menetapkan persyaratan ekspor seperti dokumen teknis, sertifikasi mutu, dan pemeriksaan fisik

produk. Langkah ini dilakukan agar produk tidak ditolak negara tujuan dan tidak merugikan petani maupun eksportir.

Selain itu, pemerintah melakukan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional untuk memastikan produk Indonesia mampu bersaing secara global. Harmonisasi memudahkan pelaku usaha menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan pasar dunia. Pemerintah secara berkala meninjau dan mem-perbarui standar sesuai perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditas perkebunan. Dengan demikian, peran regulatif pemerintah menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas dan kelancaran ekspor (Kusumastuti, 2022).

Peran Fasilitatif

Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang standar mutu. Pelatihan ini mencakup teknik budidaya, penanganan pascapanen, dan manajemen usaha tani. Penyuluh sering dilibatkan untuk memberikan bimbingan langsung di lapangan. Pendampingan tersebut mem-bantu petani menyesuaikan praktik dengan standar internasional. Dengan demikian, petani dan pelaku usaha menjadi lebih siap menghadapi tuntutan pasar global (Maulani dkk, 2025).

Pemerintah juga menyediakan akses pembiayaan seperti subsidi dan kredit untuk membantu petani kecil menjalani sertifikasi. Kebijakan ini penting karena biaya sertifikasi sering menjadi hambatan bagi UMKM. Pemerintah juga membangun laboratorium uji mutu untuk memastikan produk memenuhi standar sebelum diekspor. Keberadaan laboratorium ter-akreditasi meningkatkan kepercayaan negara tujuan. Fasilitas ini mempercepat proses pengujian dan men-dukung peningkatan kualitas produk ekspor.

Peran Pengawasan dan Penegakan

Pemerintah berperan penting dalam mengawasi kualitas produk perkebunan sebelum ekspor melalui pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan verifikasi dokumen. Pengawasan ini memastikan produk memenuhi standar dan tidak menimbulkan masalah di pasar internasional. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah dapat menunda izin ekspor sebagai langkah pencegahan. Mekanisme ini menjaga mutu produk yang dikirim ke luar negeri. Dengan demikian, fungsi pengawasan menjadi bagian strategis dalam menjaga kualitas ekspor.

Pemerintah melakukan penindakan terhadap pelanggaran standar melalui sanksi administratif hingga pelarangan ekspor. Penegakan hukum ini penting untuk meningkatkan disiplin pelaku usaha. Pemerintah juga melakukan monitoring berkala untuk memastikan pelaku usaha konsisten menjaga mutu produk. Audit dan pemeriksaan rutin dilakukan agar standar tidak hanya dipenuhi pada saat sertifikasi. Melalui monitoring yang berkelanjutan, kualitas produk ekspor dapat terjaga dengan baik.

Peran Peningkatan Kapasitas

Pemerintah mengembangkan kelembagaan petani seperti kelompok tani dan koperasi untuk memperkuat organisasi dan akses informasi, teknologi, serta pembiayaan. Kelembagaan yang kuat membantu petani mengikuti program sertifikasi dengan lebih mudah. Pemerintah juga memberikan bimbingan manajemen untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan. Langkah ini mendukung kemandirian petani dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan demikian, kapasitas petani meningkat secara menyeluruh (Irawan dkk, 2024).

Selain itu, pemerintah memperkuat rantai pasok melalui dukungan infrastruktur, informasi pasar, dan teknologi pascapanen. Penguatan ini memastikan kualitas produk tetap terjaga dari hulu hingga hilir. Pemerintah juga memfasilitasi kerja sama antara petani, industri, dan eksportir untuk menciptakan rantai pasok yang saling menguntungkan. Melalui kemitraan yang adil, petani dapat memperoleh harga yang lebih kompetitif. Upaya ini membentuk ekosistem ekspor yang inklusif dan berkelanjutan.

➤ **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terkait Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan**

Regulasi Pemerintah Indonesia terkait Mutu Produk Perkebunan

Regulasi pemerintah Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Perdagangan. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai landasan hukum untuk menetapkan standar mutu dan mekanisme pengawasan produk perkebunan. Regulasi tersebut memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi dan diperdagangkan memenuhi prinsip keamanan, kualitas, dan kelayakan konsumsi. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan kerangka untuk mencegah peredaran produk yang tidak layak atau tidak sesuai standar. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, pemerintah dapat menjaga kualitas dan keberlanjutan industri perkebunan nasional.

Pemerintah juga mengeluarkan berbagai Peraturan Menteri dan pedoman lembaga terkait ekspor dan standardisasi. Peraturan ini mencakup tata cara pengujian mutu, persyaratan ekspor, dan ketentuan teknis bagi pelaku usaha.

Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) berperan penting dalam mengatur standar kualitas produk. Regulasi tersebut juga me-mastikan pelaku usaha memahami prosedur ekspor yang benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara mitra dagang. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses ekspor dapat berjalan lebih tertib dan terstruktur.

Pengaturan Sertifikasi Produk Perkebunan Ekspor

Sertifikasi produk perkebunan merupakan proses yang diperlukan untuk membuktikan bahwa produk telah memenuhi standar mutu yang berlaku. Prosedur sertifikasi mencakup tahap pemeriksaan dokumen, audit lapangan, hingga evaluasi kesesuaian dengan standar. Jenis-jenis sertifikasi meliputi sertifikasi mutu, sertifikasi keberlanjutan, dan sertifikasi keamanan pangan. Contohnya adalah sertifikasi HACCP, ISO 22000, RSPO, *Rainforest Alliance*, dan berbagai standar global lainnya. Dengan sertifikasi ini, produk perkebunan Indonesia memperoleh pengakuan kualitas dari pasar internasional (Astagia dkk, 2022).

Dalam proses sertifikasi, lembaga sertifikasi dan badan standardisasi memiliki peran penting dalam me-lakukan verifikasi dan validasi. Lembaga seperti BSN, KAN, dan lembaga sertifikasi independen bertugas me-mastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan sesuai prosedur. Mereka juga melakukan audit rutin untuk menjamin bahwa perusahaan mempertahankan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Melalui peran lembaga-lembaga ini, kualitas produk dapat tetap terjaga dan ditingkatkan. Keberadaan lembaga sertifikasi yang kredibel menjadi faktor penting untuk me-ningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk Indonesia.

Dampak Regulasi terhadap Pelaku Usaha

Regulasi pemerintah memberikan dampak yang signifikan bagi petani dalam memenuhi standar mutu ekspor. Beberapa regulasi memberikan kemudahan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan sertifikasi. Namun, regulasi juga dapat menjadi tantangan bagi petani kecil karena keterbatasan pengetahuan dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi standar. Petani harus beradaptasi dengan teknologi dan metode budidaya yang sesuai dengan persyaratan mutu. Dengan demikian, regulasi pemerintah memiliki dampak ganda: membuka peluang sekaligus menuntut peningkatan kapasitas petani.

Bagi eksportir dan industri pengolahan, regulasi membantu memastikan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi standar global, sehingga mengurangi risiko penolakan di pasar tujuan. Namun, perusahaan juga harus menanggung biaya tambahan untuk sertifikasi, audit, dan perbaikan proses produksi. Di sisi lain, regulasi meningkatkan nilai tambah produk karena konsumen lebih percaya pada produk yang tersertifikasi. Perusahaan yang mampu memenuhi regulasi cenderung lebih kompetitif di tingkat internasional. Oleh karena itu, regulasi menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi industri perkebunan Indonesia di pasar global (Pandang & Pawenang, 2025).

➤ Peran Pemerintah dalam Penguatan Standar Mutu dan Sertifikasi

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator dalam memastikan standar mutu produk perkebunan yang diekspor memenuhi persyaratan internasional. Dalam fungsi ini, pemerintah menyusun kebijakan yang berorientasi pada

peningkatan kualitas dan keamanan produk. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BSN. Aturan yang dibuat mencakup standar mutu teknis, prosedur penanganan, serta persyaratan dokumen ekspor. Regulasi ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan proses produksi agar sesuai tuntutan pasar global.

Selain menyusun kebijakan, pemerintah juga menetapkan mekanisme ekspor yang didasarkan pada kepatuhan terhadap standar mutu. Mekanisme ini mengatur prosedur verifikasi, pengecekan dokumen, dan persyaratan sertifikasi yang wajib dipenuhi pelaku usaha. Penetapan mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penolakan produk di negara tujuan. Pemerintah memastikan bahwa setiap produk telah melalui proses pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kualitas produk perkebunan Indonesia dapat terjaga dan daya saing di pasar internasional semakin meningkat (Kusumastuti, 2022).

Peran Fasilitator dalam Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan pelatihan dan edukasi kepada petani dan pelaku usaha terkait standar mutu. Pelatihan ini mencakup praktik budidaya yang baik, penanganan pascapanen, hingga pemenuhan persyaratan sertifikasi internasional. Program edukasi dilakukan melalui penyuluh pertanian, lembaga pelatihan, dan kerja sama dengan sektor swasta. Dengan adanya pelatihan tersebut, petani menjadi lebih memahami standar yang harus mereka penuhi. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mendorong kualitas produk semakin konsisten (Maulani dkk, 2025).

Selain pelatihan, pemerintah juga memberikan bantuan fasilitas seperti subsidi sertifikasi dan pembangunan laboratorium uji mutu. Bantuan ini bertujuan mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi kendala utama bagi petani kecil dan UMKM. Pemerintah juga memperkuat kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok, koperasi, dan kemitraan rantai pasok. Penguatan kelembagaan membantu petani dalam mengakses teknologi, pembiayaan, serta pasar yang lebih luas. Melalui langkah ini, pemerintah memastikan bahwa pelaku usaha siap bersaing di tingkat global.

Peran sebagai Pengawas dan Penjamin Mutu

Dalam peran sebagai pengawas, pemerintah memastikan mutu produk terjaga sejak titik produksi hingga proses ekspor. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan, audit mutu, dan pengujian laboratorium. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa produk benar-benar memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Pengawasan juga mencakup pengecekan higiene, keamanan pangan, serta kelengkapan dokumen sertifikasi. Dengan pengawasan yang ketat, risiko penolakan produk di luar negeri dapat diminimalkan.

Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjamin mutu dan integritas produk ekspor. Pemerintah memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar standar mutu atau memalsukan sertifikat. Selain itu, pemerintah melakukan monitoring terhadap keberlanjutan sertifikasi agar proses produksi tetap mengikuti standar yang berlaku. Monitoring dilakukan secara berkala melalui evaluasi dan audit sertifikasi. Langkah ini memastikan bahwa standar mutu tidak hanya dipenuhi pada saat inspeksi awal, tetapi terus dipertahankan.

Analisis Efektivitas Peran Pemerintah

Analisis efektivitas peran pemerintah dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana kebijakan yang ada sesuai dengan kebutuhan pasar global. Permintaan pasar yang semakin ketat membutuhkan kebijakan yang adaptif dan responsif. Pemerintah dinilai efektif apabila kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Kesesuaian kebijakan dengan tren global seperti keberlanjutan dan traceability menjadi indikator penting. Evaluasi ini membantu pemerintah dalam memperbaiki regulasi agar lebih tepat sasaran.

Efektivitas juga dapat dinilai melalui evaluasi peran instansi terkait seperti BSN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BPOM. Setiap instansi memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam penguatan standar mutu. Evaluasi mencakup koordinasi antarinstansi, ketersediaan fasilitas uji mutu, dan pengawasan lapangan. Apabila koordinasi berjalan baik, implementasi standar mutu menjadi lebih efisien dan tidak tumpang tindih. Hal ini pada akhirnya memengaruhi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan kualitas komoditas perkebunan di pasar ekspor.

➤ Studi Kasus: Regulasi dan Kebijakan Pemerintah di Indonesia

Pemerintah menerapkan kebijakan mutu dan sertifikasi pada berbagai komoditas perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa sawit, teh, lada, dan rempah. Setiap komoditas memiliki standar teknis terkait kualitas, keamanan, dan keberlanjutan sesuai kebutuhan pasar global. Contohnya, kopi dan kakao memiliki standar kadar air dan cacat biji, sedangkan kelapa sawit memerlukan sertifikasi ISPO. Standar tersebut disusun untuk menjaga mutu produk sekaligus meningkatkan daya saing.

Kebijakan ini memastikan komoditas Indonesia mampu memenuhi persyaratan ketat negara tujuan (Nasution & Ningsih, 2025).

Implementasi kebijakan mutu di lapangan bergantung pada tingkat kepatuhan petani dan pelaku usaha. Sebagian petani sudah menerapkan praktik sesuai standar, tetapi banyak yang masih kesulitan karena minim pengetahuan. Rendahnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi menjadi hambatan utama. Selain itu, sarana pendukung seperti laboratorium, lembaga sertifikasi, dan penyuluh belum merata di seluruh daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan standar mutu belum optimal di beberapa wilayah.

Faktor penghambat implementasi kebijakan men-cakup tingginya biaya sertifikasi yang memberatkan petani kecil dan UMKM. Kurangnya sosialisasi membuat petani tidak memahami manfaat ekonomi dari sertifikasi. Akses informasi dan teknologi yang terbatas juga membuat praktik budidaya jauh dari standar. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memperburuk ketidakkonsistenan penerapan di lapangan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan implementasi standar mutu berjalan lambat.

Kebijakan mutu dan sertifikasi memberikan dampak positif terhadap kualitas dan kinerja ekspor komoditas perkebunan. Produk bersertifikat menunjukkan peningkatan mutu dan penurunan penolakan ekspor. Peningkatan kualitas ini juga mempermudah akses ke pasar premium dan industri pengolahan internasional. Pemerintah melakukan reformulasi kebijakan, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan pendampingan untuk mengatasi tantangan. Melalui dukungan pembiayaan, pelatihan, fasilitas laboratorium, dan kerja sama lintas sektor, efektivitas kebijakan mutu semakin diperkuat.

➤ Ringkasan

Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait standar mutu dan sertifikasi berperan penting dalam menjamin kualitas, keamanan, dan daya saing produk ekspor komoditas perkebunan Indonesia. Melalui peran sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas, pemerintah membantu memastikan bahwa produk perkebunan memenuhi persyaratan internasional. Namun, penerapan kebijakan di lapangan masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman petani, tingginya biaya sertifikasi, keterbatasan fasilitas uji mutu, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Meskipun demikian, kebijakan standar mutu terbukti mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar global.

BAB IV

Sistem Manajemen Mutu

Perkembangan aktivitas ekonomi global menuntut setiap sektor untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Konsumen menunjukkan kecenderungan yang semakin ketat dalam menilai mutu produk, terutama terkait konsistensi, keamanan, dan keandalan hasil produksi. Perusahaan perlu menerapkan pendekatan secara sistematis melalui manajemen mutu yang baik untuk memastikan hasil produksi yang sesuai dengan standar. Manajemen mutu berperan sebagai instrumen yang mengarahkan untuk menjalankan aktivitas produksi secara terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dikendalikan sehingga kualitas produk tetap stabil meskipun kondisi lapangan sering berubah. Perusahaan yang memiliki kualitas produk yang baik akan mampu bersaing dengan produk lainnya dan akan tetap eksis dengan profitabilitas yang meningkat di masa mendatang. Kualitas produk dan kualitas pelayanan mempunyai nilai positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Munafis, 2024). Manajemen mutu berperan dalam pengendalian kualitas sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas produknya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Sektor pertanian menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan sektor industri lain karena adanya ketergantungan pada faktor biologis, iklim, teknologi, dan kondisi lingkungan. Variabilitas hasil produksi, potensi kontaminasi, fluktuasi mutu bahan baku, dan risiko kerusakan pascapanen menjadikan pengendalian mutu sebagai aspek

penting dalam menjamin kualitas produk pertanian. Manajemen mutu membantu pelaku usahatani dalam mengurangi ketidakpastian melalui standarisasi kegiatan budidaya, pemantauan proses, pengendalian bahan baku, dan evaluasi hasil. Upaya penguatan mutu dalam aktivitas pertanian juga berkontribusi pada stabilitas produksi, peningkatan nilai jual, serta keberlanjutan usaha di tengah perubahan kebutuhan konsumen dan tuntutan rantai pasok (Rosminah dkk, 2024).

Sistem manajemen mutu mengambil peranan penting dalam setiap rangkaian agribisnis mulai dari tahap pengolahan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Kebutuhan akan produk yang memenuhi standar keamanan pangan mendorong perusahaan dan petani untuk menerapkan sistem mutu yang mampu menelusuri asal-usul produk, meminimalkan kesalahan proses, dan memastikan keseragaman kualitas. Pelaksanaan sistem manajemen mutu dapat mendeteksi potensi ketidaksesuaian dan menjadi dasar tindakan korektif yang efektif, sehingga mendukung daya saing produk di pasar global (Yusron & Asro, 2025). Agroindustri yang menerapkan sistem manajemen mutu mendapatkan keuntungan berupa peningkatan kepercayaan pasar, pengurangan biaya produksi akibat proses yang lebih efisien, serta peningkatan akses ke pasar ekspor yang mensyaratkan standar mutu ketat. Implementasi prinsip manajemen mutu seperti fokus pada pelanggan, keterlibatan seluruh pelaku usaha, dan pendekatan berbasis proses menjadi pendorong utama tercapainya agribisnis yang berdaya saing tinggi.

Perhatian terhadap mutu dalam pertanian bukan hanya terkait pemenuhan standar pasar, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem produksi yang berkelanjutan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan usaha. Agribisnis yang menerapkan pendekatan

mutu memperoleh kesempatan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menekan potensi kerugian, serta meningkatkan efisiensi proses melalui pengendalian dan evaluasi berbasis data. Ketersediaan sistem kerja yang terstruktur membantu pelaku usaha pertanian mempertahankan kualitas hasil dan memperkuat posisi bersaing di tengah tuntutan konsumen yang semakin kompleks. Pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan penerapan sistem manajemen mutu berperan penting dalam menunjang peningkatan kualitas produk, efisiensi proses, dan keberlanjutan usaha pertanian di era modern.

➤ **Mutu**

Mutu merupakan salah satu kunci penting dalam memenangkan persaingan pasar karena kemampuan perusahaan menyediakan produk yang bermutu menjadi fondasi untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Pemahaman mengenai mutu dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya karena setiap orang memiliki sudut pandang sendiri dalam menilai dan mengartikan kualitas. Mutu dapat ditemukan baik pada barang maupun jasa, sehingga konsepnya diterapkan pada berbagai bentuk produk dengan makna yang disesuaikan dengan pengalaman masing-masing individu. Keberagaman persepsi tersebut menyebabkan munculnya berbagai definisi mutu yang kerap membingungkan bagi mereka yang berusaha memahami makna mutu secara tepat. Peningkatan mutu dimulai dengan kajian pasar, membangun persyaratan- persyaratan yang benar untuk produk dan pelayanan serta kebutuhan-kebutuhan yang benar dari pelanggan. Menurut Ibrahim & Rusdiana (2021) mutu dapat diartikan sebagai suatu karakteristik-karakteristik produk atau layanan yang dirancang untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan nyata pada kondisi-kondisi spesifik.

Mutu merupakan konsep fundamental dalam manajemen modern dan menjadi dasar dalam penilaian kualitas produk maupun layanan. Mutu sering dipahami sebagai derajat atau tingkat keunggulan suatu produk yang mampu memenuhi atau melampaui kebutuhan pelanggan. Mutu atau kualitas (*quality*) memiliki definisi bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti performa (*performance*), keandalan (*reliability*), mudah dalam menggunakan, estetika (*aesthetics*), dan sebagainya. Definisi strategis dari kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*) (Jauhar Winarto & Mahmudah El Madja, 2021). Menurut Riyono & Budiharja (2016) terdapat beberapa dimensi mutu pada suatu produk yaitu:

Kinerja (*Performance*)

Kinerja berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Kinerja juga berkaitan dengan aspek fungsional produk dan data menjadi karakteristik utama bagi pelanggan dalam melakukan pembelian produk. Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya, misalnya isi, berat, kekentalan, komposisi, kekuatan, lama hidup penggunaan.

Daya Tahan (*Durability*)

Durability atau daya tahan menunjukkan daya tahan masa pakai suatu produk. Dimensi ini menunjukkan berapa lama suatu produk dapat bertahan hingga harus diganti. Besar frekuensi pemakaian pada suatu produk menunjukkan besarnya daya tahan produk pula.

Kesesuaian dengan Spesifikasi (*Conformance to Specifications*) Dimensi ini mengukur sejauh mana karakteristik dasar suatu produk dapat memenuhi spesifikasi yang telah

ditentukan. Aspek ini memastikan bahwa dalam suatu produk tidak ditemukan kecacatan atau kerusakan.

Fitur (*Features*)

Features ini dapat berarti sebagai ciri-ciri atau keistimewaan sebagai tambahan atau pelengkap dari suatu produk. Fitur dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk sehingga menambah nilai daya tarik bagi konsumen terhadap produk tersebut.

Reabilitas/Keandalan (*Reliability*)

Produk yang bermutu baik adalah produk yang mempunyai kinerja yang konsisten baik dalam batas-batas perawatan normal. *Reliability* menunjukkan bahwa produk dapat berfungsi dengan semestinya dan sesuai dengan standar yang ada. Semakin kecil kemungkinan kerusakan pada produk dapat terjadi maka produk tersebut semakin dapat diandalkan.

Estetika (*Aesthetics*)

Dimensi ini berhubungan dengan penampilan suatu produk yang dapat dilihat dari tampilan, rasa, aroma, dan bentuk dari produk.

Kesan Kualitas (*Perceived Quality*)

Kesan kualitas merupakan persepsi atau pandangan konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk. Persepsi terhadap suatu produk dapat diperoleh melalui harga, merek, iklan, reputasi dan produsen.

Mutu dalam pertanian menggambarkan tingkat kesesuaian suatu komoditas dengan standar kualitas yang mencakup aspek fisik, kimia, dan keamanan pangan sehingga produk dapat diterima oleh konsumen maupun pasar. Mutu adalah keseluruhan karakteristik dan atribut yang dimiliki oleh

suatu produk, termasuk hasil pertanian. Mutu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti varietas, lingkungan, pengolahan, dan penyimpanan. Mutu yang terjamin menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar, memenuhi persyaratan sertifikasi, serta mendukung keberlanjutan usaha pertanian di tengah meningkatnya tuntutan konsumen dan persaingan global.

➤ **Konsep Manajemen Mutu**

Manajemen berasal dari kata management dalam bahasa Inggris yang artinya mengurus. Manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis (Widiana, 2020). Kegiatan manajemen biasa dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen membantu dalam melakukan pencapaian tujuan atau hasil dengan teratur dan terarah. Perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Manajemen mengorganisasikan aspek yang terintegrasi untuk mencapai sasaran secara tepat sesuai dengan target waktu serta ukuran atau standart yang berlaku.

Pengelolaan mutu pada suatu produk diintegrasikan dalam suatu pola manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun berdasarkan konsep kualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan (Ramlawati, 2020). Serangkaian tindakan dalam manajemen mutu disusun secara terencana dan sistematis untuk memastikan kualitas produk dan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Manajemen mutu pada era modern berorientasi pada tindakan pencegahan terjadinya

kerusakan dan kecacatan yang mungkin terjadi, hal ini dilakukan melalui teknik pengendalian yang efektif sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan selama produk tersebut digunakan. Manajemen mutu yang efektif dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing di pasar (Maulidta dkk, 2024).

Manajemen mutu terpadu merupakan suatu teori ilmu manajemen yang mengarahkan pimpinan organisasi dan personelnya untuk melakukan program perbaikan mutu secara berkelanjutan yang terfokus pada pencapaian kepuasan para pelanggan. Manajemen mutu terpadu terfokus pada pengerjaan sesuatu yang benar sejak pertama kali, dan setiap waktu. Manajemen mutu merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berfokus pada penetapan serta penerapan kebijakan kualitas dalam organisasi guna memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Upaya memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dengan biaya yang efisien menuntut seorang manajer proyek untuk mengintegrasikan pelatihan dan penerapan manajemen kualitas dalam setiap tahapan pekerjaan. Kualitas yang dimaksud mencakup mutu produk, pelayanan, dan proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk efektivitas proses manajemen proyek yang diterapkan (Chynthia Ferdiana dkk, 2023). Tuntutan perkembangan zaman dan persaingan yang semakin ketat mendorong setiap individu maupun organisasi untuk memahami konsep manajemen mutu secara lebih mendalam agar mampu menerapkan sistem yang terencana dan terukur di lapangan. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting bagi keberhasilan pelaksanaan proyek serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

➤ Definisi Sistem Manajemen Mutu

Sistem manajemen mutu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Sistem manajemen mutu juga adalah kemampuan suatu organisasi dalam menjaga kualitas mutu dari jasa atau barang yang dilayankan. Salah satu jenis sistem manajemen mutu yang sangat populer dan mungkin paling banyak diterapkan di seluruh dunia adalah sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh Organisasi Standar Internasional (*International Standard Organization/ISO*). Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik standar manajemen yang menjamin kesesuaian proses dan produk (barang atau jasa) dengan kebutuhan atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pelanggan maupun organisasi. ISO 9000:2015 mendefinisikan sistem manajemen mutu sebagai rangkaian kebijakan, proses, prosedur, dan catatan terdokumentasi yang dirancang untuk mencapai tujuan mutu serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten (Yusron & Asro, 2025). Pada dasarnya, sistem manajemen mutu adalah sekumpulan kebijakan, prosedur, dan praktik terdokumentasi yang diterapkan secara sistematis guna memastikan bahwa proses dan produk senantiasa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, sehingga tujuan mutu dapat tercapai secara berkelanjutan.

Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan (ISO, 2015). Manfaat potensial suatu organisasi yang mengimplementasikan sistem manajemen kualitas berdasarkan standar internasional adalah:

- a. Kemampuan untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku.
- b. Memfasilitasi peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
- c. Menangani risiko dan peluang yang terkait dengan konteks dan tujuannya.
- d. Kemampuan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan sistem manajemen mutu yang ditentukan.

Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktik-praktik standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu (Christanto dkk, 2020). Beberapa komponen yang ada dalam sistem manajemen mutu antara lain struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses- proses dan sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen mutu. Sistem manajemen mutu pertanian berperan penting dalam memastikan setiap tahapan produksi berjalan konsisten dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Penerapan manajemen mutu membantu petani meminimalkan risiko kontaminasi, meningkatkan efisiensi proses, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Setiap aktivitas produksi diarahkan pada pencapaian mutu yang stabil melalui prosedur kerja yang terdokumentasi dan evaluasi berkala. Praktik ini menjadi dasar keberlanjutan usaha tani karena mampu meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, serta menjaga kualitas komoditas pertanian di pasar.

➤ **Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu**

Prinsip-prinsip manajemen mutu merupakan pedoman yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan kualitas yang lebih baik dan lebih baik. Prinsip-prinsip ini membantu dalam membangun budaya perusahaan yang berfokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, dan peningkatan berkelanjutan (Wulandari dkk, 2024). ISO 9000:2015 mendefinisikan sistem manajemen mutu sebagai rangkaian kebijakan, proses, prosedur, dan catatan terdokumentasi yang dirancang untuk mencapai tujuan mutu serta memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten. Menurut ISO (2015) sistem manajemen mutu dilaksanakan dengan memperhatikan 7 prinsip yang tercantum dalam standarisasi meliputi:

Fokus kepada pelanggan

Konsep mengenai mutu dan pelanggan diperluas. Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan. Fokus utama dari manajemen mutu adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan pelanggan. Prinsip ini menekankan pemenuhan kebutuhan konsumen sebagai dasar peningkatan mutu. Pada bidang pertanian prinsip ini mengarahkan kegiatan usaha tani untuk menghasilkan produk yang sesuai permintaan pasar, misalnya komoditas yang aman, beragam, dan memiliki tingkat kesegaran tinggi.

A. Kepemimpinan

Prinsip ini menuntut pemimpin untuk memberi arah dan memastikan seluruh kegiatan berorientasi pada kualitas. Salah satu contohnya yaitu melalui bentuk kepemimpinan kelompok tani atau manajer kebun menjaga konsistensi

standar produksi melalui pendampingan dan pengawasan terhadap setiap aktivitas budidaya.

B. Keterlibatan orang

Keterlibatan orang berarti bahwa personil yang berada di dalam institusi secara bersama-sama menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, hal ini juga menekankan pentingnya peran seluruh anggota organisasi. Tenaga kerja pertanian menjalankan tugas dengan kompetensi yang memadai agar setiap tahap produksi tetap terkontrol dan menghasilkan komoditas berkualitas.

C. Pendekatan proses

Prinsip ini memandang kegiatan produksi sebagai rangkaian proses yang saling berhubungan. Alur usaha tani yang jelas memudahkan pengendalian mutu mulai dari penyiapan sarana, budidaya, panen, hingga penanganan hasil.

D. Peningkatan

Peningkatan dari kinerja secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Prinsip ini menuntut perbaikan berkelanjutan untuk memaksimalkan mutu. Praktik budidaya ditingkatkan melalui penggunaan teknologi tepat guna, varietas unggul, atau metode pengendalian hama yang lebih efektif.

E. Pengambilan keputusan berbasis bukti

Keputusan yang efektif adalah berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Prinsip ini menempatkan data sebagai dasar keputusan. Catatan produktivitas, penggunaan pupuk, dan kondisi lingkungan menjadi landasan penentuan strategi budidaya agar hasil lebih optimal.

F. Manajemen hubungan

Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama dengan pihak yang memengaruhi mutu. Hubungan baik dengan pemasok, penyuluh, dan mitra pasar membantu menjaga kelancaran produksi serta memastikan kualitas input dan output.

➤ **Implementasi Sistem Manajemen Mutu dalam Produksi Komoditas Perkebunan**

Implementasi sistem manajemen mutu dalam produksi komoditas perkebunan adalah langkah strategis untuk memastikan produk (misalnya, minyak sawit mentah/CPO, lateks karet, teh, kopi) memenuhi standar kualitas, keamanan pangan, dan persyaratan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Sistem manajemen mutu yang umum diterapkan di industri perkebunan adalah standar internasional ISO 9001:2015. Penerapan ini seringkali dilengkapi dengan standar lain seperti *Good Agricultural Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP) untuk budidaya, dan *Good Manufacturing Practices* (GMP) serta *Good Hygiene Practices* (GHP) untuk proses pengolahan hasil.

Pelaksanaan sistem manajemen mutu dilakukan secara sistematis dan terpadu. Menurut (Ibrahim & Rusdiana, 2021) manajemen mutu mendasarkan pekerjaannya pada siklus Demings yang dikenal dengan sebutan PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Seluruh aktivitas pekerjaan harus dilakukan perencanaan (*Plan*) terlebih dahulu. Perencanaan yang sudah dibuat tidak boleh langsung dipakai sebagai standar pelaksanaan, tetapi harus terlebih dahulu dilakukan pengujian (*Do*) untuk menghindari kesalahan yang fatal. Seluruh proses yang dilakukan dalam proses manajemen mutu juga harus mendasarkan pada data yang kuat. Data yang dihasilkan dari proses pengujian (*Check*) tersebut kemudian digunakan

sebagai dasar untuk melakukan modifikasi dan pengembangan pada desain. Hasil modifikasi tersebut itulah yang kemudian dijadikan pijakan dalam pelaksanaan proses manajemen (*Act*). Konsep inti dari pelaksanaan system manajemen mutu adalah konsep tentang sistem manajemen dengan mendasarkan fakta dan proses manajemen pada siklus PDCA (Ibrahim & Rusdiana, 2021).

Pengimplementasian sisistem manajemen mutu dapat dilakukan dalam berbagai bidang industri. Hal ini juga yang diterapkan dalam bidang pertanian. Pertanian memiliki berbagai ruang lingkup dan berbagai komoditas. Karakteristik komoditas pertanian yang khas menguatkan peran manajemen mutu dalam proses produksinya. Salah satu dari ruang lingkup pertanian yang luas ini adalah perkebunan. Implementasi sistem manajemen mutu pada komoditas perkebunan menjadi langkah strategis untuk memastikan hasil produksi memiliki konsistensi kualitas sesuai standar pasar. Penerapan prinsip-prinsip mutu membantu pelaku usaha mengontrol setiap tahap proses, mulai dari budidaya, panen, hingga pascapanen. Pengelolaan mutu yang baik memberikan jaminan bahwa produk perkebunan mampu bersaing dan memenuhi tuntutan konsumen maupun industri pengolahan.

➤ **Studi Kasus Implementasi Sistem Manajemen Mutu dalam Produksi Komoditas Perkebunan**

Pengimplementasian system manajemen mutu dalam produksi komoditas perkebunan salah satunya dapat dilihat dalam studi kasus Manajemen Mutu Hasil Panen Buah Kelapa Sawit PT. Bakrie Sumatera Plantation TBK (*Gurach Batu Estate*). PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk merupakan usaha agro terpadu berkelanjutan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan produk minyak sawit serta turunannya. Pada

studi kasus ini dibahas implementasi manajemen mutu panen buah kelapa sawit di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk

Pelaksanaan sistem manajemen mutu dilakukan dengan beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Berikut adalah tahapan dalam pelaksanaan manajemen mutu panen buah kelapa sawit di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk (Harahap dkk, 2023).

Perencanaan

Perencanaan dalam panen buah kelapa sawit di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk dapat melibatkan beberapa komponen, beberapa komponen yang dapat menjadi bagian dari perencanaan tersebut seperti:

A. Persiapan Panen

Pada tahap persiapan panen perusahaan menentukan jadwal panen yang mencakup waktu yang tepat untuk memulai dan mengakhiri panen pada setiap afdeling.

B. Menentukan Jumlah

Tenaga Kerja Panen PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk melakukan analisis ketersediaan tenaga kerja untuk memastikan bahwa jumlah pemanen yang cukup tersedia untuk melaksanakan panen.

C. Alat yang digunakan

PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk merencanakan penggunaan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan panen. Ini termasuk peralatan seperti alat yang digunakan pemanen, alat bantu pengumpulan buah, dan alat pengangkutan buah. Perusahaan telah memastikan peralatan dalam kondisi baik dan siap digunakan sebelum panen dimulai.

Organisasi

Berikut adalah beberapa langkah yang telah dilakukan oleh PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk:

A. Menentukan Pemanen

Perusahaan menunjuk beberapa pemanen disetiap afdeling. Pemanen dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan afdeling atau ancak yang akan dipanen, mandor panen akan bertanggung jawab atas panen atau area panen.

B. Menentukan jumlah yang akan dipanen

Perusahaan memiliki target produksi yang diinginkan untuk setiap periode panen. Target produksi ini dapat berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jumlah rata-rata panen di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk sekitar 35-40 Ton per periode panen.

C. Menentukan kriteria panen

Perusahaan menentukan kriteria yang akan dipanen. Kriteria yang digunakan untuk menentukan hasil yang dipanen untuk memanen buah kelapa sawit, seperti buah mentah, buah normal, buah mengkal, buah terlalu masak, buah busuk dan buah tangkai panjang.

Action (Pelaksanaan)

A. Panen

Pelaksanaan panen di Pt Bakrie Sumatera Plantation Tbk dilakukan berdasarkan tahun tanam, kemudian dari situ perusahaan menetapkan basis tenaga kerja panen berdasarkan tahun tanam pohon buah kelapa sawit.

B. Sortasi

Setelah panen terlaksana, perusahaan melakukan kegiatan sortasi, dimana dari hasil sortasi itu didapatkan hasil panen yang sesuai kriteria ataupun yang tidak sesuai kriteria panen yang ditetapkan PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk.

C. Grading

Perusahaan sudah melakukan kegiatan grading, dan dari kegiatan grading perusahaan telah melakukan kegiatan mengklasifikasikan buah kelapa sawit berdasarkan kriteria yang telah ditentukan seperti buah mentah, buah normal, buah mengkal, buah terlalu masak, buah busuk dan buah tangkai panjang.

D. Kriteria Buah Kelapa Sawit

Perusahaan sudah menetapkan kriteria hasil pemanenan buah kelapa sawit, dimana kriteria tersebut selalu digunakan sebagai acuan dalam proses panen di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk.

Controlling (Pengendalian)

Perusahaan sudah melakukan pengendalian/pangawasan dalam kegiatan panen, namun dalam praktiknya pengawasan terhadap panen belum maksimal, diukur dari hasil panen yang didapat setiap bulannya masih banyak yang tidak sesuai standar mutu hasil panen yang ditetapkan oleh PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk.

BAB V

Proses Sertifikasi

Sertifikasi dirancang untuk membalikkan proses dengan meningkatkan pengetahuan konsumen tentang proses produksi pangan (Lang & Conroy, 2022). Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, sertifikasi telah menjadi komponen yang sangat penting untuk memastikan bahwa suatu produk dapat diterima dan bersaing di pasar internasional. Negara-negara tujuan ekspor memiliki persyaratan standar yang semakin kompleks terkait mutu, keamanan, keberlanjutan, dan ketertelusuran produk. Pemenuhan standar tersebut bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi keharusan yang menentukan keberhasilan suatu produk memasuki rantai pasok global. Sertifikasi berfungsi sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi persyaratan tersebut melalui penilaian pihak ketiga, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra dagang.

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan. Komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan teh menjadi penyumbang devisa yang signifikan bagi perekonomian nasional. Namun, tingginya aktivitas ekspor tidak terlepas dari tuntutan untuk memastikan bahwa produk perkebunan tersebut diproduksi melalui proses yang bertanggung jawab dan memenuhi standar internasional.

Isu-isu lingkungan dan sosial seperti deforestasi, konflik lahan, dan ketidakpastian legalitas lahan menjadi sorotan utama (Hardinata dkk, 2025). Sertifikasi menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan peluang pasar, tetapi juga menjadi strategi nasional untuk meningkatkan keberlanjutan sektor perkebunan.

Sertifikasi petani perkebunan di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup berat, terutama petani swadaya yang tidak terintegrasi dengan perusahaan mana pun. Kegagalan dalam sertifikasi akan berisiko menjadikan petani swadaya yang luas arealnya mencapai 40,8% dari total areal perkebunan, dianggap ilegal (Pramudya dkk, 2022). Kondisi ini menyebabkan banyak kelompok tani tidak mampu memenuhi persyaratan sertifikasi tanpa dukungan pembinaan atau program pemerintah. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai proses sertifikasi, lembaga yang terlibat, serta implementasinya pada komoditas perkebunan sangat penting untuk memastikan bahwa sertifikasi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas produk dan keberlanjutan sektor perkebunan Indonesia.

➤ Definisi Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses eksplisit dan formal untuk memvalidasi bahwa suatu produk telah memenuhi standar tersertifikasi. Sertifikasi memberikan informasi yang terlihat dan menonjol yang memungkinkan proses yang tidak terlihat untuk mendapatkan kredibilitas. Dengan kata lain, sertifikasi adalah simbol atribut yang tidak berwujud. Akibatnya, skema sertifikasi semakin populer sebagai alat tata kelola rantai pangan dan alat kebijakan konsumen (Lang & Conroy, 2022).

➤ Jenis-Jenis Sertifikasi

Sertifikat Mutu (*certificate of quality*)

Sertifikasi mutu berfokus pada pemenuhan spesifikasi teknis suatu produk berdasarkan standar nasional maupun internasional. Sertifikasi jenis ini mencakup aspek seperti ukuran, kadar air, tingkat kemurnian, kadar kontaminan, serta karakteristik fisik/kimia produk perkebunan. Mutu yang distandardisasi membantu meningkatkan konsistensi produk dan kepercayaan buyer. Penerbitan dokumen ini juga menjadi salah satu dokumen yang biasanya dipersyaratkan dalam kontrak L/C. Pada umumnya sertifikat mutu diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri atau Badan-badan sejenis yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal-hal yang dinyatakan dalam sertifikat adalah hasil analisa dan hasil test atas produk di unit-unit penelitian dan/atau laboratorium (Yasa dkk, 2022).

Ketentuan sertifikasi mutu produk ekspor Indonesia diatur oleh Departemen Perdagangan khusus untuk produk-produk tertentu, yang dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu sertifikat kesesuaian mutu dan sertifikat produk. Sertifikat kesesuaian mutu wajib dipenuhi untuk produk ekspor berupa: karet, karet konvensional, gaplek, minyak sereh, minyak nilam, minyak kenanga, minyak akar wangi, lada putih, lada hitam, pala, fuli, casia indonesia, kopi, teh hitam, minyak kayu putih, minyak daun cengkeh, minyak pala, minyak fuli, minyak cendana, vanili, kayu lapis, biji kakao, biji pinang bukan untuk obat (Yasa dkk, 2022).

Sertifikasi Keamanan Pangan

Sertifikasi keamanan pangan dirancang untuk memastikan bahwa produk pangan aman dikonsumsi dan risiko biologis, kimia, serta fisik dapat dikendalikan sepanjang rantai pasok. Dua skema yang paling umum diadopsi oleh pelaku usaha

pengolahan pangan adalah HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) sebuah pendekatan berbasis risiko yang fokus pada identifikasi titik kritis pengendalian, dan ISO 22000 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan) yang mengintegrasikan prinsip HACCP ke dalam kerangka manajemen sistem yang lebih luas (Liu dkk, 2021).

Sertifikasi ini semakin penting bagi produsen untuk memiliki sertifikasi keamanan pangan guna memastikan tingkat keamanan tertinggi dalam bidang ekonomi yang lebih mendunia (Njatrijani, 2021). Manfaatnya bagi komoditas perkebunan yang diolah (mis. kakao olahan, kopi *roasted*, produk olahan sawit) meliputi peningkatan kepercayaan pembeli, akses ke retailer internasional, dan pengurangan risiko recall. Namun, tantangannya meliputi kebutuhan akan dokumentasi terstruktur, pelatihan personel, dan biaya audit/implementasi yang relatif tinggi untuk UMKM.

Sertifikasi Lingkungan dan Berkelanjutan

Sertifikasi keberlanjutan adalah jenis sertifikasi yang paling banyak diterapkan pada komoditas perkebunan, terutama yang berorientasi ekspor. Sertifikasi ini menilai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proses produksi. Sertifikasi ini menilai isu seperti konservasi lingkungan, hak pekerja, penggunaan pestisida, ketertelusuran, dan pemberdayaan petani. Adapun contoh sertifikasi keberlanjutan yang umum di Indonesia:

- A. RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) merupakan sertifikasi berbasis standar global yang merupakan inisiasi negara-negara timur, terutama Uni Eropa.
- B. ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) merupakan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia yang dirumuskan oleh pemerintah yaitu Kementerian Pertanian dengan tujuan

untuk meningkatkan daya saing dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia serta berpartisipasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (Liana *et.al.*, 2023).

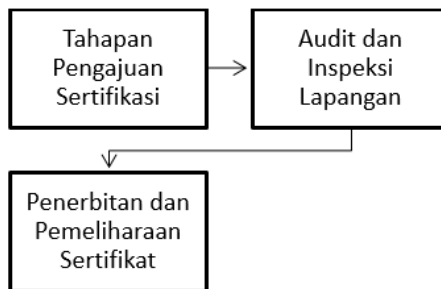
- C. *Rainforest Alliance* mencakup kriteria tentang isu-isu lingkungan, seperti keanekaragaman hayati dan konservasi hutan, dan hasil ekonomi bagi petani kecil.
- D. *Fair Trade Certification* untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mendukung perusahaan yang bertanggung jawab, memberdayakan petani, pekerja, dan nelayan, serta melindungi lingkungan.
- E. *Organic Certification* merupakan proses verifikasi resmi yang menjamin produk pertanian (tanaman, ternak, olahan) diproduksi sesuai standar organik yang ketat, tanpa bahan kimia sintesis, pestisida, atau rekayasa genetik, menggunakan metode ramah lingkungan, serta memastikan integritas dari lahan hingga produk akhir, memungkinkan produsen menjualnya dengan label "organik" yang dipercaya konsumen.

➤ Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu sektor perekonomian utama di Indonesia. Perkebunan memberikan arti yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perkebunan adalah kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan Masyarakat (Widodo & Mahagiyani, 2022).

➤ **Proses Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan**

Mendapatkan sertifikasi bukanlah proses sekali jadi, melainkan sebuah siklus manajemen yang terstruktur dan berkelanjutan. Meskipun detailnya dapat bervariasi antar lembaga sertifikasi dan skema yang berbeda, secara umum proses dan prosedurnya mengikuti alur yang logis, mulai dari persiapan awal hingga pemeliharaan sertifikat. Memahami alur ini sangat penting bagi petani atau produsen yang berencana untuk mengajukan sertifikasi agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mengelola prosesnya secara efisien (Astiti, 2025).



Gambar 1. Proses sertifikasi ekspor produk Perkebunan

Identifikasi kebutuhan pasar & standar yang diperlukan

Proses sertifikasi produk ekspor komoditas perkebunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan memastikan bahwa produk yang akan diperdagangkan ke pasar internasional memenuhi persyaratan mutu, keamanan pangan, kelestarian lingkungan, dan ketentuan kesehatan tumbuhan dari negara tujuan. Tahapan ini diawali dengan kegiatan identifikasi kebutuhan pasar, yaitu analisis standar dan jenis sertifikasi yang dipersyaratkan oleh importir ataupun regulasi negara tujuan. Pada tahap ini,

eksportir atau pelaku usaha harus memahami apakah pasar memerlukan sertifikasi tertentu seperti GAP atau Prima untuk buah dan sayuran, RSPO atau ISPO untuk minyak sawit, sertifikasi organik, sertifikasi halal, atau dokumen wajib seperti *Phytosanitary Certificate*.

Tahap berikutnya adalah persiapan internal, yaitu proses penyesuaian praktik budidaya maupun pengolahan dengan standar sertifikasi yang dituju. Tahap ini mencakup penyusunan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), pencatatan penggunaan input seperti pestisida dan pupuk, pengelolaan lingkungan, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyusunan dokumen legalitas lahan dan rantai pasok (*traceability*). Pada komoditas tertentu, seperti kopi, kakao, atau sawit, dokumentasi ini juga mencakup bukti praktik keberlanjutan seperti perlindungan kawasan konservasi, pengelolaan limbah, dan keterlibatan masyarakat.

Setelah persiapan internal dianggap memadai, pelaku usaha umumnya melakukan pre-assessment atau gap analysis, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pendamping profesional. Pre-assessment ini bertujuan mengidentifikasi celah antara kondisi aktual di lapangan dengan persyaratan standar sertifikasi. Hasil pre-assessment biasanya berupa daftar temuan dan rencana aksi korektif yang perlu diselesaikan sebelum audit resmi dilakukan. Tahap ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sertifikasi karena semakin sedikit temuan yang muncul dalam audit formal, semakin cepat sertifikat dapat diterbitkan.

Audit dan Inspeksi Lapangan

Audit sertifikasi merupakan tahap inti dalam proses ini. Audit dilakukan oleh badan sertifikasi independen yang terakreditasi dan melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan

petani atau pekerja, serta inspeksi lapangan secara langsung. Auditor memverifikasi kesesuaian praktik dengan setiap indikator standar sertifikasi, seperti penggunaan pestisida yang sesuai aturan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, manajemen limbah, legalitas lahan, serta sistem traceability. Dalam audit, temuan dapat dikategorikan sebagai minor atau major non-conformity. Temuan minor biasanya dapat diperbaiki dalam jangka waktu tertentu, sedangkan temuan major dapat menyebabkan penundaan bahkan kegagalan sertifikasi jika tidak segera ditindaklanjuti.

Sejalan dengan audit, sebagian besar komoditas perkebunan yang akan diekspor juga memerlukan pemeriksaan laboratorium dan proses karantina tumbuhan. Pemeriksaan laboratorium diperlukan untuk memastikan bahwa produk memenuhi batas maksimum residu pestisida, parameter mutu fisik dan kimia, serta bebas dari kontaminasi mikroba berbahaya. Sementara itu, pemeriksaan karantina dilakukan oleh otoritas pemerintah dan merupakan persyaratan wajib untuk mendapatkan *Phytosanitary Certificate*. Sertifikat ini merupakan dokumen resmi yang membuktikan bahwa komoditas yang diekspor bebas dari organisme pengganggu tumbuhan dan aman masuk ke negara tujuan. Tanpa sertifikat ini, sebagian besar negara tidak akan mengizinkan produk masuk ke wilayah mereka.

Penerbitan dan Pemeliharaan Sertifikat

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, termasuk lulus audit dan memenuhi parameter uji laboratorium, badan sertifikasi akan menerbitkan sertifikat resmi. Pada tahap ini eksportir juga harus mengurus dokumen pelengkap lainnya seperti *Certificate of Origin*, *invoice*, *packing list*, dan dokumen kepabeanaan. Setelah sertifikasi diterbitkan, pelabelan produk dan dokumentasi pengiriman harus disesuaikan dengan ketentuan standar,

termasuk pencantuman nomor sertifikat, logo (jika diizinkan), serta informasi traceability agar importir dapat menelusuri asal produk dengan jelas. Pemenuhan aspek traceability menjadi semakin penting seiring meningkatnya tuntutan pasar global terhadap transparansi rantai pasok.

Tahap akhir dari proses sertifikasi adalah surveillance atau audit pengawasan yang dilakukan secara berkala sesuai ketentuan masing-masing skema sertifikasi, biasanya setiap satu tahun sekali. Surveillance bertujuan memastikan bahwa penerapan standar tetap konsisten setelah sertifikat diterbitkan. Pada masa akhir periode sertifikat, pelaku usaha juga harus mengikuti recertification audit untuk memperpanjang masa berlaku sertifikasi. Dengan demikian, proses sertifikasi bukanlah kegiatan satu kali, tetapi upaya berkelanjutan yang menuntut konsistensi, pencatatan yang rapi, dan komitmen terhadap praktik budidaya dan pengolahan yang bertanggung jawab.

➤ **Lembaga Sertifikasi dan Akreditasi**

Lembaga sertifikasi dan akreditasi memainkan peran sentral dalam memastikan kredibilitas proses sertifikasi produk ekspor komoditas perkebunan, dengan fokus pada standar global yang diterapkan oleh organisasi internasional. Di tingkat global, lembaga seperti *Rainforest Alliance*, *Fairtrade International*, dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) menyediakan sertifikasi keberlanjutan, yang menilai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. *Rainforest Alliance*, misalnya, mensertifikasi produk seperti kopi dan kakao dengan kriteria seperti perlindungan biodiversitas dan pengurangan emisi karbon, sementara RSPO khusus untuk kelapa sawit, memerlukan verifikasi deforestasi nol dan hak asasi manusia. Lembaga ini sering kali bekerja sama dengan badan akreditasi seperti *International Accreditation Forum* (IAF) atau *International*

Organization for Standardization (ISO), yang mengakreditasi auditor untuk memastikan konsistensi dan imparzialitas.

Di Indonesia, Badan Karantina Pertanian (Barantan) di bawah Kementerian Pertanian bertindak sebagai lembaga utama untuk sertifikasi ekspor, mengeluarkan *Phytosanitary Certificate* (Sertifikat Karantina Tumbuhan) yang wajib untuk produk perkebunan. Barantan terakreditasi oleh *International Plant Protection Convention* (IPPC) dan bekerja sama dengan lembaga internasional seperti SGS, Bureau Veritas, atau TÜV Rheinland untuk audit spesifik. Akreditasi ini memastikan bahwa lembaga sertifikasi memenuhi standar ISO/IEC 17065 untuk kompetensi dan independensi. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memperkuat peran lembaga ini melalui program akreditasi nasional, seperti Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yang terintegrasi dengan standar ASEAN, untuk meningkatkan kepercayaan eksportir global.

➤ Studi Kasus

Studi kasus diambil dari jurnal yang berjudul “Peran RSPO dan ISPO Pada Keberlanjutan Industri Minyak Kelapa Sawit di Indonesia: Studi Kasus Indofood”. Artikel tersebut mencoba mengevaluasi peran dua sistem sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam mewujudkan keberlanjutan pada industri minyak kelapa sawit di Indonesia, dengan fokus pada kasus perusahaan besar: Indofood. Penulis menyatakan bahwa meskipun global demand terhadap minyak sawit terus meningkat, aspek keberlanjutan (lingkungan, sosial, dan hukum) terus menjadi sorotan. RSPO dan ISPO dihadirkan sebagai upaya responsif terhadap kritik global tersebut: RSPO sebagai standar internasional sukarela, dan ISPO sebagai regulasi nasional wajib.

Dari studi kasus Indofood, artikel ini mengungkap bahwa penerapan sertifikasi saja belum cukup menjamin keberlanjutan secara menyeluruh. Terdapat kendala serius terkait pemantauan (*monitoring*), penegakan hukum (*law enforcement*), serta perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan yang kadang masih diabaikan meskipun sertifikasi telah diperoleh. Dengan demikian, sertifikasi bukan akhir dari proses, melainkan awal dari tantangan implementasi: tanpa pengawasan yang konsisten dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, sertifikasi cenderung menjadi “kotak centang” administratif belaka.

Artikel ini menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan pihak ketiga (misalnya lembaga sertifikasi, LSM, komunitas lokal) untuk memperkuat efektivitas sertifikasi. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang tegas dan insentif atau dukungan finansial, serta memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Produsen dan perusahaan minyak sawit seperti Indofood harus berkomitmen untuk menjadikan sertifikasi sebagai bagian dari praktik bisnis jangka panjang, bukan sekadar alat pemasaran atau pemenuhan formalitas. RSPO dan ISPO memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen transformasi dari industri kelapa sawit biasa menuju industri “kelapa sawit berkelanjutan.” Namun, potensi itu hanya akan tercapai jika sertifikasi disertai dengan implementasi nyata: pelaksanaan praktik berkelanjutan di kebun dan pabrik, perlindungan lingkungan dan tenaga kerja, serta mekanisme audit dan pemantauan independen yang jujur dan akuntabel. Tanpa aspek-aspek ini, sertifikasi berisiko menjadi simbol formalitas semata, tanpa membawa perubahan substansial.

BAB VI

Pengawasan dan Penegakan Produk Ekspor Komoditas Perkebunan

Komoditas perkebunan merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan pada lahan perkebunan dimana hasil panennya memiliki nilai ekonomi tinggi, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun tujuan ekspor. Komiditas perkebunan berasal dari tanaman tahunan atau tanaman semusim yang dikelola melalui sistem budidaya yang lebih intensif dan terencana dibandingkan dengan pertanian biasa, mencakup proses penanaman, pemeliharaan yang melibatkan proses sertifikasi, dan panen hingga proses pengolahan. Perkebunan memiliki peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia karena tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga menopang kesejahteraan jutaan petani di wilayah pedesaan. Komoditas perkebunan termasuk komoditas ekspor unggulan. Komoditas pertanian yang berhasil mendominasi pasar dunia adalah kopi, kelapa sawit, teh, kakao, dan karet.

Pada tahun 2022, nilai ekspor komoditas perkebunan Indonesia mencapai sekitar 40 miliar dolar AS yang menjadikannya sektor vital bagi pembangunan ekonomi (Purrohman dkk, 2025). Namun persaingan global yang ketat

dan kebijakan pemerintah serta tuntutan konsumen internasional terhadap produk berkualitas tinggi serta ramah lingkungan mendorong terciptanya pengawasan yang semakin ketat terhadap produk ekspor. Pengawasan tersebut membantu mencegah masuknya produk dengan mutu rendah ke rantai pasok yang berkaitan dengan citra reputasi Indonesia sebagai negara penghasil komoditas perkebunan berkualitas.

Pengawasan dalam kegiatan usaha perkebunan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan operasional perkebunan berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini tidak berfokus pada produktivitas dan hasil perkebunannya saja, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan yang terkait dengan aktivitas perkebunan. Usaha perkebunan memerlukan pengawasan untuk menciptakan kegiatan usaha yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dalam proses pengawasan perlu melibatkan berbagai pihak baik yang berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya (Wulandari & Diloa, 2025). Pengawasan dan penegakan produk ekspor melibatkan penerapan standar mutu dan sertifikasi sebagai instrument utama untuk menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk sesuai dengan persyaratan internasional. Produk diuji dan diverifikasi agar layak masuk pasar global, serta untuk mengurangi risiko penolakan ekspor dari negara tujuan.

➤ **Pengawasan**

Pengawasan memiliki fungsi yang berkaitan erat dengan efektivitas hukum, dimana efektivitas harus diawasi dan diamati agar kita dapat menilai apakah suatu peraturan berjalan sesuai prosedur atau tata cara. Pengawasan merupakan sesuatu yang

bersifat kodrati dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia dan kehidupan berorganisasi. Pengawasan dalam kegiatan ekspor produk komoditas perkebunan diterapkan bukan untuk mencari kesalahan atau siapa yang melakukan kesalahan, tetapi digunakan untuk memahami sesuatu yang salah demi perbaikan di masa depan. Jika pengawasan terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan dapat berjalan dengan baik, dengan artian, tidak ada halangan dalam pelaksanaannya. Pengawasan ini akan menciptakan suasana tenang, berkeadilan, dan aman (Harwina, 2022).

Peningkatan dalam fungsi pengawasan sangat melekat di lingkungan aparatur negara bertolak dari motivasi dalam menaikkan efisiensi dan efektivitas pada tugas-tugas umum dalam pemerintahan dan pembangunan, dengan cara seminimal mungkin mencegah timbulnya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan maupun melaksanakan tugas. Pengawasan terdapat beberapa jenis atau macam yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* di tempat kerja dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa menjawab *on the spot*. Pengawasan tidak langsung dalam kegiatan perdagangan ekspor bisa meliputi pengawasan atau pengecekan dokumen pendukung seperti perizinan dan persyaratan lainnya yang bersifat tertulis (Agustina, 2016).

➤ **Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk memastikan bahwa standard an peraturan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten dan ditaati oleh seluruh subjek hukum. Penegakan hukum dalam situasi ini meliputi perilaku atau tindakan represif seperti sanksi terhadap pelanggaran tetapi juga upaya pencegahan seperti pengawasan, pem-binaan, dan penyuluhan untuk mengurangi pelanggaran. Berdasarkan literature hukum kontemporer, penegakan hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu aturan yang jelas, lembaga atau aparat yang memiliki otoritas, dan tingkat kepatuhan masyarakat atau bisnis terhadap aturan yang ditetapkan. Dengan demikian, penegakan hukum didefinisikan sebagai proses memastikan bahwa aturan yang berlaku tidak hanya ditulis tetapi juga diterapkan dalam praktik untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepentingan publik (Candra, 2021).

Penegakan hukum dalam kegiatan ekspor produk perkebunan dipahami sebagai proses memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum mulai dari standar mutu, sertifikasi keberlanjutan, legalitas lahan, hingga prosedur kepabeanan dilaksanakan secara konsisten oleh pelaku usaha dan aparat terkait. Menurut Yahman (2024) penegakan hukum tidak hanya mencakup pemberian sanksi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, verifikasi, serta koordinasi antar lembaga untuk memastikan kepatuhan di seluruh rantai pasok ekspor. Dalam sektor perkebunan, penegakan hukum berperan penting karena sertifikasi seperti ISPO dan RSPO berfungsi sebagai instrument regulative yang menentukan akses pasar internasional. Menurut Suryanto (2021) efektivitas penegakan bergantung pada kejelasan regulasi, kapasitas institusi, serta kemampuan negara untuk menghadapi pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Penegakan hukum dalam ekspor perkebunan berfungsi sebagai pedoman yang menjamin kepatuhan normatif, dan menjaga reputasi dagang Indonesia, serta keberlanjutan industri secara menyeluruh.

➤ **Studi Kasus Ekspor Produk Pertanian Indonesia**

Era globalisasi saat ini, hambatan perdagangan tidak lagi menggunakan instrument tarif, namun banyak negara yang memanfaatkan regulasi teknis untuk menghalangi perdagangan sebagai upaya untuk melindungi produk lokal. Produsen dan eksportir produk pertanian diwajibkan untuk mematuhi berbagai kebijakan dengan standard peraturan teknis yang telah ditetapkan oleh berbagai institusi pemerintah atau organisasi perdagangan termasuk retail di negara tujuan ekspor. Standar kebijakan ini disusun untuk menjaga kualitas produk, keamanan pangan, dan perlindungan lingkungan serta kesehatan konsumen.

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir produk pertanian. Berdasarkan data statistic tahun 2024, volume ekspor komoditas perkebunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Kementerian Pertanian (2025) pada tahun 2024 sektor perkebunan di Indonesia berhasil menunjukkan dominasinya sebagai penggerak utama ekspor nasional. Kontribusi signifikan dari komoditas unggulan perkebunan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Komoditas tersebut antara lain adalah minyak kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas terbesar dengan volume ekspor mencapai 11,73 ton yang mampu memperoleh nilai Rp 209,9 triliun. Produk minyak kelapa sawit (CPO) ini tidak hanya untuk ekspor ke negara utama seperti China, Jepang, dan Selandia Baru, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Komoditas unggulan lainnya yang mampu mengukuhkan Indonesia sebagai salah

satu eksportir dunia adalah komoditas kopi. Pada tahun 2024, kopi Indonesia berhasil mencapai volume ekspor sebesar 177.799 ton dengan nilai Rp 14,41 triliun yang mana diekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat, Mesir, dan Malaysia. Komoditas lainnya seperti biji pinang juga menunjukkan performa ekspor yang bagus yaitu dengan volume sebesar 150.100 ton yang bernilai Rp 5,32 triliun berhasil dipasarkan ke negara Iran, India dan China.

Berdasarkan peningkatan volume ekspor produk perkebunan Indonesia pada tahun 2024 menjelaskan bahwa proses perdagangan di Indonesia berhasil menunjukkan capaian yang positif dan mencerminkan efektivitas proses perdagangan nasional. Namun, proses perdagangan ekspor tersebut tidak semudah kenyataannya. Menurut Badan Karantina Indonesia (2018) produk ekspor dari Indonesia sering mengalami hambatan berupa notifikasi ketidaksesuaian (*Notification of Non-Compliance/NNC*) dari negara tujuan yang mengakibatkan terjadinya penahanan atau penolakan oleh negara tujuan ekspor dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan keamanan pangan dan persyaratan dokumen yang telah ditetapkan negara tujuan. Untuk menganggulagi peristiwa tersebut, Badan Karantina Indonesia menerapkan program akselerasi ekspor dan pengawasan keamanan pangan produk pertanian, baik pangan segar ekspor maupun ekspor.

➤ **Pengawasan dan Penegakan Produk Ekspor Perkebunan**

Pengawasan dan penegakan pada produk ekspor komoditas perkebunan di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ke pasar internasional sudah memenuhi standar mutu, keamanan, legalitas, serta keberlanjutan yang berlaku. Upaya ini sangat penting untuk

diterapkan mengingat sektor komoditas perkebunan merupakan salah satu penyumbang utama devisa negara, sehingga kualitas dan kepatuhan terhadap persyaratan kebijakan internasional menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan ekspor. Menurut Badan Karantina Indonesia (2018) objek pengawasan produk ekspor komoditas perkebunan yaitu mulai dari alur produksi pengolahan, penerapan sistem mutu dan keamanan pangan, hingga pada proses pengujian laboratorium terhadap sampel produk yang dihasilkan, serta pemenuhan persyaratan dokumen keamanan pangan yang diminta negara tujuan seperti *Health Certificate*, persyaratan *Fit for Human Consumption*, *Free Aflatoxin*, dan lainnya.

Proses pengawasan produk ekspor komoditas perkebunan dimulai dengan pemantauan kualitas dan keamanan produk oleh petugas pengawas kualitas dan keamanan produk perkebunan. Tahapan ini mencakup pengambilan sampel produk, pengujian kualitas sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI), dan dokumentasi serta audit sistem mutu. Penerapan pengawasan produk ini bertujuan untuk memastikan standar mutu dan keamanan produk, mencegah penolakan produk di negara tujuan, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengawasan mutu melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Menurut Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Ambon (2025) pengawasan mutu produk ekspor komoditas perkebunan agar sesuai dengan standar internasional seperti *Good Agricultural Practices* (GAP) dimulai dengan melakukan pengujian mutu di laboratorium, pengawasan peredaran, dan kunjungan lapangan ke perusahaan ekspor untuk memantau penyimpanan dengan kadar air di bawah 10%, mencegah kontaminasi yang mengakibatkan penolakan di pasar global.

Proses pengawasan ini melibatkan pengawasan berjenjang oleh pemerintah, termasuk ditingkat pengolahan dan peredaran guna memastikan konsistensi cita rasa, keamanan produk, dan efisiensi produksi bagi industri. Pengawasan menjadi tolak ukur wajib bagi komoditas perkebunan seperti kakao dan kopi supaya memenuhi standar internasional dan menghindari keluhan dari negara importir (Pitri dkk, 2025). Pengawasan mutu produk ekspor komoditas perkebunan akan memperoleh hasil yang baik jika didampingi dengan pelaksanaan monitoring yang melibatkan bimbingan teknis dan pelatihan pascapanen.

Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 merupakan kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang pengawasan terpadu oleh tim lintas lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri untuk melakukan verifikasi ekspor produk perkebunan dan residu. Persetujuan ini melibatkan persetujuan ekspor, verifikasi dokumen, dan koordinasi antar kementerian guna sinkronisasi kebijakan. Kebijakan dari Permendag tersebut termasuk salah satu upaya penegakan standar ekspor produk perkebunan. Peraturan menteri perdagangan berperan untuk menekankan kewajiban eksportir dalam memenuhi standar, dengan pengawasan ketat untuk menjaga ketertiban niaga dan perlindungan konsumen internasional. Proses penegakan dalam ekspor produk perkebunan mencakup penerbitan sertifikat *phytosanitary* dari Badan Karantina Pertanian, fumigasi, dan surat izin pengeluaran untuk memenuhi persyaratan negara. Penegakan berperan penting dalam reputasi Indonesia karena berfungsi sebagai upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir utama, meningkatkan nilai tambah, dan kesejahteraan petani melalui kepatuhan mutu yang adaptif (Kementerian Pertanian, 2025).

➤ Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran

Sanksi dan konsekuensi terhadap pelanggaran dalam pengawasan dan penegakan ekspor produk perkebunan di Indonesia mencakup sanksi administratif, pidana, serta konsekuensi perdagangan yang berdampak langsung pada akses pasar.

Pelanggaran dalam proses ekspor seperti persyaratan mutu, legalitas, dokumen ekspor maupun sertifikasi akan mengakibatkan semakin rumitnya pemeriksaan karena akan menjadi lebih ketat, bahkan bisa menyebabkan terjadinya penahanan barang maupun pencabutan izin ekspor hingga pengenaan denda administratif. Manahamaru dkk, (2024) menjelaskan bahwa pelanggaran persyaratan ekspor seperti pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian standar mutu, atau pelanggaran aturan karantina dapat dikenakan tindakan pemeriksaan, penahanan barang, dan penegakan hukum oleh bea cukai sebagai bagian dari mekanisme kepabeanan. Menurut Saputra (2023) pelanggaran pada aspek perizinan usaha perkebunan seperti penyalahgunaan izin atau operasional tanpa izin yang sah akan berdampak negatif karena bisa menimbulkan sanksi administratif berupa pembekuan, pencabutan, atau penghentian izin. Dengan demikian, penegakan hukum administratif dalam pengelolaan usaha juga penting untuk diperhatikan ketika melakukan perdagangan ekspor.

Perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan tata kelola perkebunan seperti pembukaan lahan tanpa izin atau praktik yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga dapat dijerat melalui hukum pidana lingkungan maupun kehutanan bahkan dalam kasus penyalahgunaan izin perkebunan sawit, terdapat potensi tindak pidana korupsi yang berdampak pada kerugian negara dan menimbulkan risiko hukum bagi pelaku

usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, pemberlakuan sanksi pidana dalam proses pemasaran hasil perkebunan dapat terjadi apabila ada pihak yang melaksanakan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melakukan pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan, penggunaan bahan penolong atau bahan tambahan untuk pengolahan, maupun untuk campuran hasil perkebunan dengan alat atau benda yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Kansil, 2021).

Selain sanksi formal, juga terdapat sanksi non-formal yaitu sanksi non-hukum yang berdampak pada reputasi dan daya saing produk (Rahmawati, 2021). Produk yang tidak memenuhi standar mutu atau tidak mempunyai sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO atau RSPO akan berisiko ditolak di negara tujuan sehingga akan menyebabkan kerugian finansial, turunnya kepercayaan pasar, serta berdampak pada citra negatif terhadap komoditas perkebunan Indonesia di pasar global. Widyatmoko dkk, (2023) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam akses pasar internasional, terutama di negara-negara yang menetapkan regulasi ketat terkait *traceability* dan keberlanjutan.

➤ Studi Kasus

Permintaan global pada kelapa sawit yang semakin meningkat telah menimbulkan keprihatinan tentang keberlanjutan produksi kelapa sawit di Indonesia yang berperan sebagai produsen terbesarnya. Kondisi ini terjadi karena Indonesia masih mengalami tantangan dalam hal praktik pertanian sawit

secara berkelanjutan dan sertifikasi seperti RSPO dan ISPO. Kasus yang terjadi pada Indofood ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar keberlanjutan perkebunan di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat *structural* maupun operasional (Erina 2024).

Indofood saat ini menjadi isu kritis di Indonesia, karena sering mengalami masalah dalam pengawasan, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan lingkungan tata kelola lahan, padahal perusahaan Indofood sudah memiliki sertifikasi RSPO dan ISPO. Permasalahan lingkungan seperti deforestasi, degradasi lahan, dan tidak optimalnya penerapan prinsip konservasi menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pembukaan dan peneglolaan lahan belum efektif dan kurang diperhatikan. Masalah mengenai status hak tanah yang tidak jelas dan peran lembaga lokal yang terbatas dalam menangani sengketa kerap muncul hingga menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal. Selain itu, regulasi kebijakan dari pemerintah yang masih tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan tidak konsistennya pelaksanaan sertifikasi ISPO. Hal ini menjadi pemicu utama pada penegakan hukum yang lemah karena komite ISPO tidak memiliki otoritas untuk memberi sanksi langsung. Permasalahan lainnya adalah pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan yang terjadi di Indofood yakni pemberian upah yang tidak sesuai, kondisi kerja yang tidak aman atau tidak layak, dan minimnya perlindungan bagi pekerja kontrak maupun harian. Selain itu, petani swadaya juga kerap menghadapi tantangan dalam memenuhi standar ekspor yang disebabkan karena biaya sertifikasi yang tinggi. Permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan kepatuhan antara bisnis besar dan bisnis kecil sehingga dapat menghambat proses perdagangan kelapa sawit di Indonesia maupun luar negeri.

Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh Indofood tersebut dapat dilakukan dengan cara mengupayakan dan melakukan koordinasi antara pemerintah, perusahaan, lembaga sertifikasi, dan masyarakat yang lebih terarah. Penguatan audit dan verifikasi independen menjadi kunci agar pelanggaran dapat terdeteksi secara akurat disertai dengan peningkatan penegakan hukum melalui kewenangan yang lebih tegas bagi ISPO untuk menjatuhkan sanksi langsung. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah juga penting dilakukan agar pelaksanaan pengawasan lebih konsisten, sedangkan penyelesaian konflik lahan dapat diselesaikan dengan cara menerapkan prinsip FPIC dan mekanisme mediasi inklusif. Selain itu, kemitraan petani swadaya, subsidi sertifikasi, dan bantuan teknis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kepatuhan. Transparansi dapat ditingkatkan dengan teknologi seperti sistem pelaporan digital dan pemantauan satelit. Penerapan solusi ini dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan ekspor komoditas perkebunan di Indonesia.

➤ Ringkasan

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk ekspor komoditas perkebunan merupakan elemen kunci dalam menjaga mutu, keamanan, legalitas, dan keberlanjutan komoditas Indonesia di pasar global. Pengawasan dilakukan melalui serangkaian proses mulai dari pemantauan kualitas, pengujian laboratorium, pemeriksaan dokumen, hingga verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian standar nasional maupun internasional. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme administratif, pidana, dan kepabeanan yang bertujuan mencegah pelanggaran serta menjaga stabilitas perdagangan ekspor. Namun, masih ditemukan berbagai kendala seperti lemahnya koordinasi lintas lembaga,

ketidakefisienan audit dan sertifikasi, konflik kepentingan, serta kesenjangan kepatuhan antara perusahaan besar dan petani swadaya. Studi kasus Indofood memperlihatkan bahwa sertifikasi keberlanjutan (ISPO dan RSPO) belum sepenuhnya menjamin kepatuhan operasional karena masih terjadi pelanggaran terkait lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata kelola lahan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas regulasi, kapasitas institusi, serta komitmen pelaku usaha dalam memenuhi standar keberlanjutan.

BAB VII

Manfaat dan Kontribusi Penguatan Standar Mutu

Penguatan standar mutu dan sertifikasi pada komoditas perkebunan menjadi salah satu agenda strategis yang mendapatkan perhatian luas dalam literatur perdagangan internasional, terutama karena semakin ketatnya persyaratan pasar global terhadap jaminan kualitas, keamanan pangan, serta aspek keberlanjutan produk yang diperdagangkan. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan untuk memperkuat standar mutu semakin mendesak karena komoditas perkebunan seperti kopi, teh, kakao, dan kelapa sawit masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi kualitas, keterbatasan fasilitas pengujian, serta rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap mekanisme sertifikasi. Pasar internasional secara konsisten meningkatkan tuntutan terhadap standar teknis, sehingga negara pengekspor wajib membangun sistem jaminan mutu yang kredibel agar mampu mempertahankan akses pasar dan bersaing dengan negara lain (Manalu, 2022).

Selain berfungsi sebagai instrumen regulasi teknis, standar mutu dan sertifikasi berperan meningkatkan nilai tambah produk perkebunan melalui pembentukan persepsi positif mengenai keandalan, keamanan, dan konsistensi mutu di mata importir. Penerapan standar secara komprehensif mulai

dari praktik budidaya, penanganan pascapanen, hingga proses pengolahanmendorong terbentuknya rantai produksi yang lebih efisien, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar global. Ibnu (2023) menegaskan bahwa penerapan standar dalam rantai nilai komoditas perkebunan tidak hanya meningkatkan kualitas fisik dan organoleptik produk, tetapi juga memperluas peluang pemasaran ke negara tujuan dengan permintaan ketat seperti Uni Eropa dan Amerika Utara yang mensyaratkan sertifikasi tertentu sebagai prasyarat ekspor.

Di sisi lain, sertifikasi mutu baik sertifikasi wajib berbasis SNI maupun sertifikasi sukarela seperti sertifikasi keberlanjutan terbukti mampu memperkuat kredibilitas dan daya saing komoditas perkebunan Indonesia. Sertifikasi dianggap menjadi bukti kepatuhan terhadap standar internasional, termasuk praktik produksi yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan ke-amanan pangan. Beberapa temuan empiris menunjukkan bahwa eksportir bersertifikat memiliki peluang lebih besar memasuki pasar bernilai tinggi, memperoleh kontrak jangka panjang, serta mengakses pembeli yang menerapkan *quality screening* ketat. Sitompul (2023) menunjukkan bahwa harmonisasi standar dan meningkatnya adopsi sertifikasi berkorelasi dengan peningkatan kinerja ekspor, terutama setelah adanya perubahan regulasi yang menekankan pentingnya jaminan mutu.

Pentingnya penguatan standar mutu tidak hanya menyangkut proses produksi, tetapi juga mencakup pembangunan kelembagaan yang mendukung, seperti keberadaan laboratorium pengujian yang terakreditasi, lembaga sertifikasi yang kredibel, serta ketersediaan standar nasional yang selaras dengan standar internasional. Trimadya (2024) menyebutkan bahwa sistem standardisasi nasional yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pasar, menurunkan risiko

penolakan produk di pelabuhan tujuan, dan memberikan kepastian bagi eksportir dalam memenuhi persyaratan teknis. Penguatan infrastruktur mutu ini menjadi prasyarat agar Indonesia dapat mengurangi hambatan teknis perdagangan (*technical barriers to trade*) yang sering kali menjadi penghalang ekspor komoditas perkebunan.

Pelaku usaha kecil, termasuk petani dan kelompok tani, masih menghadapi kendala signifikan dalam memenuhi standar dan memperoleh sertifikasi. Kendala tersebut meliputi biaya sertifikasi yang relatif tinggi, kompleksitas prosedur, serta keterbatasan kapasitas teknis. Hadi (2023) menekankan bahwa tanpa dukungan kebijakan berupa pelatihan, skema sertifikasi kolektif, dan pendampingan teknis yang terstruktur, standar mutu justru dapat menjadi hambatan baru bagi petani skala kecil untuk berpartisipasi dalam pasar ekspor. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan agar sertifikasi tidak hanya diakses oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku hulu yang memegang peran penting dalam menjaga kualitas produk.

➤ **Konsep Standar Mutu dalam Perdagangan Internasional**

Standar mutu dipahami sebagai seperangkat kriteria teknis yang digunakan untuk menilai kesesuaian produk terhadap persyaratan kesehatan, keselamatan, dan kualitas yang diterima secara internasional. Dalam konteks perdagangan internasional, standar ini memainkan peranan ganda: sebagai mekanisme perlindungan konsumen sekaligus sebagai *non-tariff measure* (NTM) yang bisa mempengaruhi akses pasar (Hariyadi, 2014). Literatur hukum dan kebijakan menegaskan bahwa organisasi internasional seperti WTO memfasilitasi penerapan standar dan persyaratan teknis melalui kerangka SPS/TBT, sehingga negara pengekspor perlu menyesuaikan standar nasionalnya

agar tidak tersingkir dari pasar global (Putri dalam Hariyadi, 2014).

Dari perspektif ekonomi, standar mutu berfungsi mengurangi *information asymmetry* antara produsen dan konsumen sehingga membangun kepercayaan pasar. Dengan adanya standar yang jelas dan mekanisme penilaian kesesuaian (conformity assessment), eksportir dapat menunjukkan bukti bahwa produknya memenuhi spesifikasi yang diminta pembeli asing (Trimadya, 2024). Hal ini menjadi penting terutama untuk produk agrikultural dan perkebunan yang rawan variasi mutu akibat faktor musim, penanganan pascapanen, dan rantai distribusi sebab tanpa standar yang diakui, pembeli cenderung menolak atau memberikan harga diskon.

Namun, standar juga dapat menjadi hambatan teknis bagi negara berkembang bila kapasitas domestik untuk memenuhi standar tersebut lemah, misalnya ketiadaan laboratorium terakreditasi atau lembaga penilaian kesesuaian yang kredibel (Trimadya, 2024). Beberapa kajian nasional menekankan perlunya sinkronisasi antara standar nasional (SNI) dan standar internasional agar tidak timbul duplikasi yang membingungkan pelaku usaha serta agar proses ekspor menjadi lebih efisien (BSN; Trimadya, 2024). Tanpa harmonisasi ini, biaya penyesuaian produk dan proses bisa meningkat sehingga menurunkan daya saing produk ekspor.

Akhirnya, tinjauan teori menunjukkan bahwa kebijakan standardisasi harus dipandang sebagai bagian dari strategi perdagangan nasional: pembangunan kapasitas kelembagaan standar, transparansi prosedur, dan dukungan teknis bagi pelaku usaha merupakan elemen penting untuk menjadikan standar sebagai peluang, bukan sekadar hambatan (Hariyadi, 2014; Trimadya, 2024). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan fasilitasi

perdagangan, tujuan yang harus diupayakan oleh pembuat kebijakan agar standar berkontribusi pada peningkatan ekspor.

➤ **Standar Mutu Produk Perkebunan**

Komoditas perkebunan mempunyai karakteristik mutu yang spesifik, misalnya kadar air, ukuran fisik, tingkat fermentasi (pada kakao & kopi), residu pestisida, dan parameter organoleptik—yang menjadi fokus standar mutu untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Kajian teknis mengenai mutu fisik produk pertanian menegaskan bahwa penerapan parameter SNI pada produk pertanian membantu menstandarkan penilaian mutu sehingga memudahkan transaksional perdagangan domestik dan internasional (Lestari, 2021). Dalam pengertian ini, standar produk bukan hanya dokumen administratif tetapi acuan teknis bagi produsen dan pemeriksa mutu.

Tuntutan pasar ekspor sering lebih ketat dibanding pasar domestik; oleh karena itu, SNI dan standar internasional seperti Codex atau standar komersial harus diterjemahkan ke dalam praktik budidaya dan pascapanen yang operasional, misalnya melalui Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP) (Botutihe, 2020). Implementasi pedoman teknis tersebut mencakup prosedur pemanenan, pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan yang berpengaruh langsung pada parameter mutu yang dinilai pada saat ekspor. Studi-studi lapangan menunjukkan bahwa produsen yang menerapkan prosedur ini cenderung memiliki produk dengan distribusi mutu lebih stabil.

Selain aspek fisik dan kimia, ketertelusuran (traceability) menjadi bagian tak terpisahkan dari standar mutu modern, terutama untuk pasar yang menuntut transparansi asal usul dan praktik produksi. Traceability memberi kemampuan untuk

menelusuri asal produk dan rekam jejak perlakuan selama rantai pasok, yang membantu respons cepat terhadap kejadian kontaminasi atau perselisihan mutu (Botutihe, 2020). Untuk komoditas perkebunan, sistem ketertelusuran seringkali memerlukan dokumentasi pada level petani ini menuntut investasi administrasi serta kapasitas pencatatan yang belum dimiliki oleh banyak petani kecil.

Kesenjangan kapasitas di hulu produksi, termasuk kurangnya pengetahuan teknis tentang pengendalian residu atau standar pengemasan, menyebabkan produk sering tidak memenuhi kriteria teknis pada saat pemeriksaan pra-ekspor. Oleh karena itu literatur domestik merekomendasikan program pembinaan teknis, penyediaan fasilitas pengolahan pascapanen bersama, dan akses ke laboratorium pengujian sebagai upaya memastikan produk perkebunan memenuhi parameter SNI dan persyaratan pasar tujuan.

➤ **Sertifikasi Produk dalam Perdagangan Internasional**

Sertifikasi produk berfungsi sebagai bukti formal bahwa suatu produk atau proses memenuhi kriteria tertentu, baik itu kepatuhan terhadap standar keamanan pangan (mis. HACCP, ISO 22000), praktik pertanian yang baik (GAP), maupun kriteria keberlanjutan (mis. RSPO, ISPO). Dalam literatur, sertifikasi dipandang sebagai alat pengurangan risiko bagi importir karena menyediakan verifikasi pihak ketiga atas klaim mutu atau praktik produksi (Hariyadi, 2014). Peran pihak ketiga ini menjadi krusial dalam pasar internasional yang semakin mengedepankan bukti objektif atas kualitas dan keberlanjutan.

Perbedaan antara sertifikasi wajib (diatur oleh regulasi nasional atau negara tujuan) dan sertifikasi sukarela (didorong oleh preferensi pasar atau pembeli) memiliki implikasi

kebijakan: sertifikasi wajib mem-butuhkan dukungan kelembagaan negara, sementara sertifikasi sukarela seringkali menuntut kompensasi harga (*price premium*) agar pelaku usaha mau menanggung biaya tambahan sertifikasi (Wulandari, 2021). Bagi eksportir besar, biaya ini relatif dapat diinternalisasi, namun bagi pelaku usaha kecil, pembiayaan sertifikasi menjadi hambatan utama yang memerlukan intervensi subsidi atau skema kolektif.

Bukti empiris dari literatur Indonesia menunjukkan kombinasi hasil: sertifikasi dapat membuka akses pasar bernilai tambah namun tidak selalu menjamin pe-ningkatan pendapatan bagi setiap pelaku efektivitasnya bergantung pada harga premium yang diberikan pasar dan struktur rantai pasok (Nainggolan, 2024). Selain itu, manfaat lingkungan dan sosial dari sertifikasi seringkali memerlukan waktu untuk terwujud secara nyata pada tingkat petani, sehingga program pendukung jangka panjang diperlukan untuk memastikan bahwa sertifikasi juga berdampak pada kesejahteraan petani.

Kritik terhadap praktik sertifikasi juga muncul, misalnya terkait kompleksitas administrasi, frekuensi audit, dan kecenderungan menjadi formalitas tanpa perubahan substansial pada praktik lapangan apabila pendampingan teknis kurang memadai (Aisyah, 2024). Oleh karena itu, kajian kebijakan menekankan perlunya model sertifikasi yang inklusif menggabungkan dukungan finansial, pelatihan, dan mekanisme kolektif agar sertifikasi menjadi instrumen yang benar-benar menambah daya saing ekspor, bukan beban tambahan bagi pelaku kecil.

➤ **Sertifikasi Produk Perkebunan di Indonesia**

Indonesia telah mengembangkan sejumlah skema sertifikasi yang relevan untuk perkebunan; di antaranya ISPO untuk minyak sawit, sertifikasi organik lokal, serta penerapan HACCP/GAP pada produk olahan pangan. Studi-studi nasional mendokumentasikan proses adopsi skema ini serta tantangan implementasinya, terutama dalam memastikan kesesuaian antara regulasi, kapasitas pengawasan, dan kebutuhan pasar (Wulandari, 2021; Permana, 2024). Meski ISPO dirancang untuk menegaskan praktik berkelanjutan di sektor sawit, literatur menunjukkan perdebatan mengenai efektivitas dan persepsi pasar terhadap ISPO dibandingkan skema internasional seperti RSPO.

Penerapan sertifikasi di Indonesia juga menghadapi kendala praktis: biaya sertifikasi dan audit berkala, persyaratan dokumentasi, serta kebutuhan perbaikan praktik teknis di lapangan. Pemahaman petani terhadap prinsip sertifikasi mengindikasikan bahwa petani kecil seringkali memiliki pemahaman yang terbatas dan membutuhkan fasilitasi teknis berkelanjutan (Nainggolan, 2024). Ini memunculkan kebutuhan akan program pendampingan yang tidak sekadar menyerahkan standar tetapi juga membantu implementasi di lapangan melalui pelatihan dan pilot project.

Selain itu, peran lembaga penilai kesesuaian dan laboratorium terakreditasi menjadi vital untuk menjaga kredibilitas sertifikasi nasional. Studi standardisasi mencatat bahwa ketiadaan fasilitas pengujian yang memadai pada beberapa daerah menyebabkan ketergantungan pada fasilitas eksternal sehingga menambah biaya dan waktu verifikasi (Trimadya, 2024). Oleh karena itu, penguatan infrastruktur mutu nasional (termasuk SNI, KAN, dan laboratorium) menjadi bagian

integral dari strategi memperluas akses produk perkebunan ke pasar ekspor.

Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi juga terus berkembang; kebijakan yang memfokuskan pada inklusi pelaku kecil, misalnya model sertifikasi kelompok atau *shared-cost schemes* agar sertifikasi tidak meningkatkan ketimpangan akses pasar antara perusahaan besar dan petani kecil (Permana, 2024). Rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa keberhasilan sertifikasi sebagai alat peningkatan ekspor sangat bergantung pada desain institusional dan mekanisme pembiayaan yang adil.

➤ **Hubungan Standar Mutu dengan Daya Saing Ekspor**

Secara teoretis, peningkatan mutu produk merupakan salah satu jalan untuk melakukan *quality upgrading* yang pada akhirnya dapat meningkatkan pangsa pasar dan nilai ekspor suatu negara (Porter-inspired policy literatures; Botutihe, 2020). Di sektor perkebunan, produk yang secara konsisten memenuhi standar mutu lebih mungkin mendapatkan akses ke segmen pasar bernilai tambah, menegosiasikan kontrak jangka panjang, dan memperoleh harga premium semua itu berkontribusi pada perbaikan kinerja ekspor. Evaluasi empiris di konteks Indonesia memperlihatkan korelasi positif antara kepatuhan pada standar dan performa ekspor pada beberapa komoditas.

Namun hubungan ini tidak bersifat otomatis: standar perlu diikuti oleh kemampuan produksi yang dapat menjaga mutu secara konsisten, serta dukungan logistik dan pemasaran untuk memonetisasi peningkatan mutu menjadi keuntungan ekonomi (Pratama & Wijayanti, 2023). Dengan kata lain, peningkatan mutu tanpa strategi pemasaran atau akses ke pembeli yang menghargai mutu tidak akan serta-merta meningkatkan pendapatan ekspor. Literatur domestik

menekankan perlunya linkages antara sertifikasi, strategi pemasaran, dan kebijakan perdagangan untuk mewujudkan efek positif terhadap ekspor.

Beberapa studi kasus sektoral menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang menguatkan infrastruktur mutu (laboratorium, akreditasi, fasilitasi ekspor) serta program pendampingan teknis kepada petani dapat mengurangi kegagalan ekspor karena non- compliance dan meningkatkan proporsi produk yang lolos pemeriksaan mutu (Botutihe, 2020; Umbara, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan daya saing berbasis mutu memerlukan pendekatan sistemik bukan hanya fokus pada standar dokumen tetapi pada seluruh rantai nilai.

Manfaat standar terhadap ekspor dapat berbeda antar komoditas dan konteks. Faktor- faktor seperti struktur pasar dunia, preferensi konsumen di negara tujuan, dan keberadaan pemain domestik yang mampu memenuhi standar menentukan sejauh mana peningkatan mutu dapat diterjemahkan menjadi keuntungan ekspor (Pratama & Wijayanti, 2023; Umbara, 2023). Oleh karena itu rekomendasi kebijakan cenderung menekankan pendekatan berbasis komoditas dan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik rantai pasok lokal. (Sitasi inti: Botutihe, 2020; Pratama & Wijayanti, 2023; Umbara, 2023)

➤ **Optimasi Produksi Pertanian**

Optimasi produksi pertanian merupakan tahapan awal yang sangat menentukan dalam upaya penguatan standar mutu komoditas perkebunan. Pada tahap hulu ini, kualitas produk sudah mulai terbentuk sejak proses budidaya, mulai dari pemilihan bibit, pengelolaan lahan, hingga teknik pemeliharaan tanaman (Djafri dkk, 2016). Dalam konteks perdagangan internasional, konsistensi mutu bahan baku menjadi prasyarat

utama agar produk perkebunan dapat memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan pasar ekspor.

Penerapan praktik pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices* (GAP) menjadi instrumen utama dalam mendorong efisiensi sekaligus peningkatan mutu di tingkat petani. GAP mengatur aspek teknis seperti penggunaan input produksi yang tepat, pengendalian hama terpadu, serta pengelolaan residu pestisida agar sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan. Melalui penerapan GAP, risiko produk tidak lolos uji mutu dapat ditekan, sehingga potensi penolakan ekspor akibat ketidaksesuaian standar dapat diminimalkan.

Selain aspek teknis budidaya, optimasi produksi pertanian juga berkaitan erat dengan efisiensi penggunaan faktor produksi. Dalam perspektif ekonomi produksi, petani dituntut untuk mencapai kombinasi input yang optimal agar biaya produksi dapat ditekan tanpa mengorbankan mutu hasil. Standar mutu berperan sebagai acuan dalam menentukan batas toleransi kualitas, sehingga petani dapat menyesuaikan teknik produksi secara lebih terukur. Dengan demikian, standar mutu membantu mengarahkan proses produksi menuju efisiensi ekonomi sekaligus kualitas yang dapat diterima pasar.

Namun, tantangan utama dalam optimasi produksi pertanian terletak pada heterogenitas kapasitas petani, khususnya petani kecil. Keterbatasan akses terhadap informasi teknis, sarana produksi, dan pembiayaan sering kali menyebabkan penerapan standar mutu berjalan tidak merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan variasi mutu bahan baku yang tinggi, sehingga menyulitkan proses pengendalian mutu pada tahap berikutnya. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan teknis, dan fasilitasi input menjadi faktor kunci keberhasilan optimasi produksi di tingkat hulu.

➤ Optimasi Produksi Pengolahan

Optimasi produksi pengolahan merupakan tahap lanjutan yang berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu komoditas perkebunan setelah melalui proses budidaya. Pada tahap ini, bahan baku diubah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang siap dipasarkan, sehingga standar mutu menjadi semakin spesifik dan terukur. Proses pengolahan yang tidak terkendali dapat menurunkan kualitas produk, meskipun bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar (Ulum, 2018).

Penerapan standar proses seperti *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengolahan berlangsung secara higienis, aman, dan konsisten. Standar ini membantu pelaku usaha mengidentifikasi titik kritis yang berpotensi menurunkan mutu atau membahayakan keamanan produk. Dengan adanya standar yang jelas, proses produksi menjadi lebih terstruktur dan risiko kegagalan mutu dapat dikendalikan secara sistematis. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi produksi, yaitu menghasilkan output berkualitas dengan tingkat efisiensi yang optimal.

Dari sisi biaya, optimasi produksi pengolahan juga berkaitan dengan efisiensi penggunaan teknologi dan tenaga kerja. Investasi pada peralatan pengolahan yang sesuai standar memang memerlukan biaya awal yang relatif tinggi, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat kehilangan hasil (*losses*) dan meningkatkan konsistensi mutu produk. Produk dengan mutu stabil memiliki peluang lebih besar untuk diterima pasar ekspor dan mendapatkan harga yang lebih baik. Dengan demikian, pengolahan yang terstandar dapat dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar biaya tambahan (Sutrisno & Hamdani, 2019).

Meski demikian, tidak semua pelaku usaha mampu menerapkan standar pengolahan secara optimal, terutama usaha kecil dan menengah. Keterbatasan modal, teknologi, dan akses terhadap informasi teknis sering menjadi kendala utama. Akibatnya, proses pengolahan masih dilakukan secara tradisional dengan tingkat variasi mutu yang tinggi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menyediakan fasilitas pengolahan bersama, pelatihan teknis, serta insentif bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan kapasitas pengolahan sesuai standar.

➤ **Optimasi Produksi Pemasaran**

Optimasi produksi pemasaran merupakan tahap akhir dalam sistem produksi yang menentukan keberhasilan komoditas perkebunan di pasar ekspor. Pada tahap ini, mutu produk yang telah dibangun sejak proses budidaya dan pengolahan harus dapat dikomunikasikan secara efektif kepada konsumen dan importir (Susilawati dkk, 2023). Standar mutu dan sertifikasi berfungsi sebagai sinyal kualitas (*quality signal*) yang membantu mengurangi asimetri informasi antara produsen dan pembeli.

Optimasi pemasaran juga berkaitan dengan pemilihan saluran distribusi dan mitra dagang yang tepat. Pasar ekspor dengan persyaratan mutu tinggi umumnya memiliki sistem seleksi pemasok yang ketat dan mengutamakan konsistensi pasokan. Dalam hal ini, pelaku usaha yang mampu menjamin mutu dan volume produksi secara berkelanjutan akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Standar mutu berperan sebagai dasar untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pembeli dan mengurangi ketidakpastian transaksi.

Namun demikian, tantangan pemasaran masih dihadapi oleh banyak pelaku usaha perkebunan Indonesia, khususnya dalam mengakses informasi pasar dan jaringan distribusi internasional. Produk yang telah memenuhi standar mutu sering kali belum dipasarkan secara optimal karena keterbatasan promosi dan negosiasi dagang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu harus diiringi dengan penguatan kapasitas pemasaran agar manfaat ekonomi dari standar dapat dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha.

➤ Studi Kasus

Dalimunthe (2025) melihat daya saing ekspor minyak atsiri Indonesia di pasar Tiongkok dengan menggunakan pendekatan daya saing perdagangan internasional. Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen minyak atsiri karena ketersediaan bahan baku dan keragaman jenis tanaman penghasil minyak atsiri. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh daya saing yang stabil di pasar ekspor, terutama karena adanya fluktuasi kualitas produk dan perbedaan standar mutu yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor.

Dalimunthe (2025) mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi daya saing minyak atsiri Indonesia di pasar Tiongkok adalah pemenuhan standar mutu dan spesifikasi teknis, seperti tingkat kemurnian, kandungan senyawa aktif, serta konsistensi kualitas antar-pengiriman. Pasar Tiongkok menerapkan persyaratan mutu yang ketat, sehingga produk yang tidak memenuhi standar tersebut cenderung mengalami hambatan masuk pasar atau hanya dapat dijual dengan harga yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan pengendalian mutu memiliki peran

sentral dalam menentukan posisi kompetitif Indonesia di pasar tersebut.

Indonesia mampu bersaing dari sisi volume produksi, kelemahan dalam standarisasi dan pengolahan pascapanen menyebabkan daya saing ekspor tidak berkelanjutan. Negara pesaing seperti Jerman dan Prancis dinilai lebih unggul dalam menjaga konsistensi mutu melalui penerapan standar pengolahan dan sertifikasi yang ketat. Hal ini mengindikasikan bahwa optimasi produksi pengolahan, termasuk penerapan standar mutu dan sistem pengujian kualitas, menjadi aspek penting yang perlu diperkuat agar produk minyak atsiri Indonesia mampu bersaing secara berkelanjutan.

Dalimunthe (2025) menegaskan bahwa peningkatan daya saing ekspor minyak atsiri Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada keunggulan sumber daya alam, tetapi harus didukung oleh penguatan standar mutu, sertifikasi, dan sistem pengendalian kualitas yang terintegrasi. Studi kasus ini memperkuat argumen bahwa standar mutu berperan strategis dalam mengoptimalkan produksi dan memperluas akses pasar ekspor. Dengan demikian, pengalaman ekspor minyak atsiri Indonesia ke pasar Tiongkok menjadi bukti empiris bahwa pemenuhan standar mutu merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar internasional.

➤ Ringkasan

Penguatan standar mutu dan sertifikasi memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan sistem produksi perkebunan, mulai dari tahap produksi pertanian, pengolahan, hingga pemasaran. Standar mutu berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendalian kualitas, tetapi juga sebagai sarana peningkatan efisiensi produksi dan daya saing ekspor. Implementasi standar yang terintegrasi mampu meningkatkan konsistensi mutu produk, memperluas akses pasar internasional, serta memperkuat kepercayaan konsumen dan importir. Namun, keberhasilan penerapan standar sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, kapasitas pelaku usaha, serta integrasi antar-tahap produksi agar peningkatan mutu dapat diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang nyata.

BAB VIII

Tantangan dan Peluang Dalam Penguatan Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan

Setiap negara bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan negaranya sendiri, yang sering memerlukan perdagangan internasional karena keterbatasan sumber daya domestik (Ezer, 2024). Perdagangan internasional merupakan pilar penting bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana sektor perkebunan memberikan kontribusi signifikan melalui produk seperti minyak sawit, karet, kopi, teh, dan kakao. Produk-produk ini tidak hanya memainkan peran strategis dalam menjaga kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga merupakan bagian penting dari rantai pasokan global, terutama bagi negara-negara maju seperti Jepang yang memiliki sumber daya alam terbatas (Wikipedia contributors, 2025).

Ekspor produk perkebunan memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sektor ini menyumbang lebih dari 25% ekspor nonmigas nasional, dengan total nilai mencapai USD 22 miliar

pada 2023, dan diperkirakan tumbuh 5-10% pada 2024-2025 jika didukung oleh standar kualitas tinggi. Produk ini menghasilkan devisa signifikan, berkontribusi terhadap ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 16 juta petani, dan membantu mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Meningkatnya tuntutan pasar internasional terhadap kualitas dan keberlanjutan telah menjadi isu sentral, dengan konsumen semakin peka terhadap isu lingkungan dan etika (FAO, 2024). Sertifikasi internasional seperti GAP, HACCP, RSPO, ISPO, Rainforest Alliance, dan Fair Trade menjadi krusial untuk memastikan keamanan pangan dan keberlanjutan, membuka akses ke pasar premium dan menghindari penolakan ekspor (WTO, 2021).

Penguatan standar mutu penting untuk mempertahankan daya saing, terutama menghadapi persaingan dari negara seperti Brasil dan Malaysia. Tanpa standar ini, produk Indonesia berisiko ditolak atau kehilangan akses pasar premium. Namun, tantangan seperti biaya sertifikasi tinggi, akses petani kecil, dan infrastruktur terbatas masih menghambat implementasi.

➤ **Standar Mutu Dan Sertifikasi Produk Ekspor**

Mutu merupakan derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Maksud derajat atau tingkat berarti selalu ada peningkatan setiap saat. Sedangkan karakteristik berarti hal-hal yang dimiliki produk, yang terdiri dari karakteristik fisik, karakteristik perilaku dan karakteristik sensori.

Teori standar mutu merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memastikan suatu organisasi mampu memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan. Pendekatan ini mencakup pengelolaan risiko, manajemen proses, serta

pengukuran kinerja agar produk atau jasa yang dihasilkan konsisten sesuai dengan harapan pelanggan. Dalam praktiknya, teori ini diperkuat dengan penerapan standar internasional seperti ISO 9001, yang menekankan pentingnya sistem manajemen mutu melalui prosedur terdokumentasi, pengendalian proses, dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, di bidang pangan dikenal sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) merupakan suatu sistem manajemen mutu dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional dan sistematis. Tujuan adanya HACCP yaitu untuk mengidentifikasi, memonitor dan mengendalikan bahaya (hazard). Sistem HACCP mulai dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi/pengolahan, manufaktur, hingga penanganan produk akhir. Kunci utama HACCP adalah analisa bahaya dan identifikasi titik kendali kritis. Konsep HACCP ini disebut rasional karena pendekatannya didasarkan pada data historis tentang penyebab suatu penyakit yang timbul dan kerusakan pangan (Ratih,2013).

➤ **Penguatan Standar Mutu dalam Ekspor**

Penguatan standar mutu meliputi kategori kualitas (ISO 9001), keamanan (HACCP), dan keberlanjutan (RSPO/ISPO). Implementasi di komoditas seperti HACCP untuk kopi meningkatkan kepatuhan 50% di perkebunan besar, namun biaya audit dan infrastruktur lemah menghambat adopsi (FAO, 2024). Dampaknya positif, dengan peningkatan ekspor bersertifikasi 25% dalam lima tahun (BPS, 2024), membuka pasar premium.

Dampaknya terhadap ekspor sangat positif, dengan data BPS (2024) menunjukkan peningkatan nilai ekspor bersertifikasi sebesar 25% dalam lima tahun terakhir, membuka akses ke pasar premium di Eropa dan AS yang memprioritaskan produk

berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, penguatan standar mutu tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir utama, meskipun diperlukan investasi dalam teknologi digital untuk mengoptimalkan proses ini.

➤ Ringkasan dan Rekomendasi

Penguatan standar mutu dan sertifikasi produk ekspor komoditas perkebunan merupakan strategi penting untuk menjawab tantangan perdagangan global. Dari pendahuluan hingga manfaat, terlihat benang merah yang jelas: sertifikasi mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga jual yang lebih tinggi dan akses pasar premium, memperkuat daya saing industri dengan reputasi merek yang lebih baik, serta memberikan kontribusi signifikan bagi negara melalui devisa dan penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka panjang, sertifikasi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan mendorong inovasi teknologi. Dengan demikian, sertifikasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Penguatan standar mutu dan sertifikasi untuk produk ekspor komoditas perkebunan (seperti kopi, teh, kakao, kelapa sawit, dan karet) merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing global, memastikan keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Ini melibatkan adopsi standar seperti ISO, HACCP, dan sertifikasi keberlanjutan seperti Fairtrade, yang didukung oleh organisasi global seperti WTO dan FAO. Penguatan ini tidak hanya membuka akses ke pasar premium tapi juga mendorong inovasi dalam praktik pertanian berkelanjutan, dengan potensi peningkatan nilai ekspor hingga 20-30% berdasarkan data WTO.

Standar mutu dan sertifikasi internasional untuk produk ekspor komoditas perkebunan mencakup aspek kualitas, keamanan, keberlanjutan, dan kepatuhan global, dengan standar utama seperti ISO 9001, HACCP, GMP, Fairtrade, dan Rainforest Alliance. Organisasi seperti ISO, Codex Alimentarius, FAO, WTO, dan Fairtrade International mengembangkan dan mengawasi standar ini, memfasilitasi perdagangan melalui harmonisasi regulasi dan preferensi tarif.

Studi kasus dari Indonesia (kopi), Ghana (kakao), dan Malaysia (kelapa sawit) menunjukkan bahwa sertifikasi meningkatkan harga ekspor (15-30%), pendapatan petani (10-20%), dan akses pasar premium, sambil mendorong praktik ramah lingkungan seperti pengurangan deforestasi dan emisi karbon. Secara keseluruhan, sertifikasi ini mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, dengan data dari WTO dan FAO menunjukkan peningkatan akses ekspor hingga 20-30% melalui preferensi global.

Menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam sertifikasi ekspor ini, rekomendasi utama yang dapat diterapkan adalah pemerintah meningkatkan subsidi dan pelatihan bagi petani kecil melalui program seperti GNS, dengan alokasi anggaran hingga 20% dari dana pertanian untuk membangun laboratorium sertifikasi di daerah pedesaan (Kementerian Pertanian RI, 2024). Industri perkebunan disarankan untuk meng-adopsi teknologi digital seperti aplikasi mobile dan blockchain guna memudahkan proses sertifikasi dan traceability, sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi (World Bank, 2024).

Petani perlu diberdayakan melalui pendidikan berkala tentang standar internasional, sementara kolaborasi internasional dengan organisasi seperti FAO dan RSPO dapat membantu benchmarking dengan negara pesaing. Secara

jangka panjang, penguatan regulasi nasional yang selaras dengan standar global akan memastikan keberlanjutan ekspor, dengan target peningkatan sertifikasi hingga 50% dalam tiga tahun ke depan untuk mendukung SDG terkait kemiskinan dan lingkungan (ITC, 2024). Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan hingga 15% per tahun, sekaligus membangun ketahanan terhadap tantangan global.

➤ **Tantangan dan Peluang Dalam Penguatan Standar Mutu dan Sertifikasi Produk Ekspor Komoditas Perkebunan**

Penguatan standar mutu dan sertifikasi tidak lepas dari tantangan. Tantangan utama dalam penguatan standar mutu dan sertifikasi produk ekspor komoditas perkebunan meliputi biaya sertifikasi yang tinggi, yang mencapai Rp 50-100 juta per petani kecil, sehingga hanya 30% komoditas yang bersertifikasi menurut laporan Kementerian Perdagangan RI (2022). Biaya sertifikasi yang relatif tinggi menjadi hambatan bagi petani kecil. Ketimpangan akses terutama di daerah terpencil seperti Sulawesi dan Sumatera, diperburuk oleh regulasi global yang berubah-ubah, seperti larangan ekspor sawit mentah oleh Uni Eropa, yang menyebabkan penolakan produk dan kerugian ekonomi.

Infrastruktur yang lemah, termasuk laboratorium pengujian dan akses teknologi digital, juga menjadi hambatan, sementara persaingan dengan negara seperti Brasil dan Malaysia menuntut inovasi cepat untuk menghindari kehilangan pangsa pasar. Di sisi lain, kompleksitas regulasi internasional yang terus berubah menuntut adaptasi cepat, sementara sebagian pelaku usaha masih menunjukkan resistensi karena berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Lee dkk, (2020) menunjukkan bahwa negara eksportir sukses cenderung

memiliki ekosistem inovasi yang kuat dan kolaboratif antara petani, koperasi, lembaga riset, dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing ekspor tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, tetapi juga oleh efisiensi dan kualitas sepanjang rantai pasok. Tantangan ini diperparah dengan kurangnya laboratorium pengujian terakreditasi di sentra produksi dan lemahnya kapasitas tracing produk.

Di sisi lain, peluang yang ada sangat menjanjikan, seperti akses ke pasar premium melalui sertifikasi organik atau halal, yang dapat meningkatkan harga jual hingga 20% dan mendukung permintaan global akan produk berkelanjutan yang bernilai USD 2,3 triliun (UN SDG, 2023). Inovasi teknologi seperti blockchain untuk traceability dan dukungan pemerintah melalui program GNS menawarkan potensi pengurangan biaya hingga 30%, serta peluang investasi asing yang dapat memperkuat rantai pasok dan mengurangi dampak perubahan iklim terhadap produksi.

Menurut FAO (2022), Thailand sebagai penghasil karet alam terbesar pertama di dunia telah memproduksi 4,8 juta ton karet alam. Indonesia diperingkat kedua telah menghasilkan 3,1 juta ton karet alam. Vietnam diperingkat ketiga telah memproduksi 1,3 juta ton dan Malaysia di peringkat kesembilan telah menghasilkan 377 ribu ton pada tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi penghasil dan eksportir karet terbesar dunia, mengingat potensi pengembangan negara pesaing utama yaitu Thailand dan Malaysia semakin kekurangan lahan dan sulit mendapatkan tenaga kerja yang murah (Ezar, 2024).

Dukungan global terhadap pencapaian SDGs membuka akses pendanaan dan kerja sama internasional. Inovasi teknologi digital seperti blockchain dan Internet of Things (IoT) dapat memperkuat sistem mutu dan ketelusuran produk. Selain

itu, masuknya investasi asing pada perkebunan berkelanjutan menjadi peluang strategis untuk memperkuat sektor ini. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, penguatan standar mutu dan sertifikasi akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan agribisnis sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

BAB IX

Panduan untuk Meningkatkan Daya saing dan Kualitas Produk Perkebunan

Sektor perkebunana merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian di Indonesia melalui kegiatan ekspor komoditas unggulan. Komoditas unggulan pada sektor Perkebunan Indonesia antaranya seperti kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan sawit. Kontribusi nilai ekspor Perkebunan yang stabil dapat menunjukkan bahwa produk Perkebunan Indonesia masih menjadi andalan dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Sektor Perkebunan juga memiliki kontribusi yang tinggi dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan industri hilir. Perannya yang signifikan turut membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui peningkatan pendapatan dan peluang usaha bagi masyarakat lokal.

Sektor Perkebunan memiliki potensi besar dalam perekonomian di Indonesia, namun sektor perkebunan Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama pada sektor perkebunan adalah rendahnya kualitas dan konsistensi hasil perkebunan. Rendahnya hasil perkebunan disebabkan adanya praktik

budidaya dan kegiatan pascapanen yang belum mengikuti standar internasional. Ketidakkonsistennan kualitas hasil perkebunan seringkali menyebabkan produk Indonesia kurang kompetitif di pasar internasional dan cenderung memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara pesaing. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu serta perbaikan system produksi menjadi dasar kebutuhan yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

Permasalahan terkait adanya standar mutu produk juga menjadi salah satu kendala pada sektor perkebunan Indonesia dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional. Adanya tuntutan global terhadap keberlanjutan dan standar internasional yang meningkat, terutama pada sertifikasi seperti ISPO, RSPO, Rainforest Alliance, dan Fairtrade. Sertifikasi produk tidak hanya berfungsi sebagai bukti berkelanjutan, tetapi juga dapat menunjang persyaratan dalam menjual produk perkebunan ke pasar global, sehingga masih banyak petani kecil yang mengalami hambatan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi produk. Hal ini disebabkan keterbatasan terkait biaya, minimnya pengetahuan teknis terkait sertifikasi produk, hingga adanya persoalan legalitas lahan yang masih belum terselesaikan.

Tantangan struktural seperti rendahnya inovasi teknologi, lemahnya system *traceability*, dan kurangnya branding juga menghambat kemampuan produk perkebunan Indonesia untuk bersaing di segmen pasar premium. Negara-negara lain telah lebih maju dalam pengembangan produk bernilai tambah, seperti *single origin*, *specialty product*, dan *certified sustainable commodities*, yang membuat produk mereka lebih diminati konsumen global. Indonesia perlu merespons perubahan ini dengan strategi komprehensif agar tidak tertinggal dalam persaingan internasional.

Konteks ini menuntut upaya untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman para pelaku perkebunan mengenai pentingnya standar mutu dan sertifikasi karena pengetahuan tentang standar seperti ISO, HACCP, ISPO, dan RSPO menjadi kunci dalam memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan global. Pemahaman yang kuat mendorong pelaku perkebunan agar tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga berorientasi terhadap peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penyusunan panduan yang jelas diperlukan untuk membantu pelaku perkebunan menerapkan standar mutu sekaligus memilih jenis sertifikasi yang sesuai kebutuhan perdagangan internasional. Panduan tersebut harus mencakup aspek teknis, administratif, dan manajerial yang mudah diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan.

➤ **Standar Mutu Produk Perkebunan**

Mutu produk merupakan kemampuan sebuah produk dalam menjalankan fungsinya. Mutu produk meliputi tahan lama, andal, teliti, kemudahan operasional dan perbaikan, serta atribut lainnya yang bernilai, dimaa pada kegiatan pemasaran mutu produk dinilai dari sisi pembelinya. Mutu dibagi menjadi dua, yaitu *performance quality* dan *conformance quality*. *Performance quality* merujuk pada Tingkat mana sebuah produk menjalankan fungsinya, sedangkan *conformance quality* merujuk pada konsistensi produk dalam menyerahkan performan tertentu (Mursalin, 2021).

Standarisasi dapat dikatakan sebagai usaha berdsama dalam membentuk standar. Standar merupakan sebuah aturan, yang biasanya digunakan untuk bimbingan tetapi juga dapat bersifat wajib, memberi batasan spesifikasi dan penggunaan sebuah objek atau karakteristik dalam sebuah metode (Saragih, 2020).

Standarisasi produk adalah ketentuan atau spesifikasi baku yang harus dipenuhi dalam pembuatan maupun penggunaan suatu produk. Standarisasi ini bertujuan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kinerja produk, agar produk dapat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan konsumen. Salah satu contoh penerapan standar yaitu standar ISO, dimana standar ini terbukti dapat meningkatkan kualitas serta citra perusahaan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Standar produk juga dapat membantu dalam mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Manfaat dari standarisasi produk diantaranya adalah dapat memperbaiki kualitas produk, meningkatkan keamanan produk, meningkatkan kompatibilitas, serta dapat memfasilitasi dalam kegiatan perdagangan internasional (Sudarni dkk, 2023).

Standar mutu produk adalah acuan atau rujukan teknis yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan kualitas suatu produk. Standar ini ditetapkan melalui kesepakatan bersama dan didasarkan pada pengetahuan serta teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Standar mutu diakui oleh lembaga berwenang pada tingkat nasional hingga internasional sehingga dapat memastikan bahwa produk memiliki spesifikasi yang sesuai, layak dikonsumsi atau digunakan, serta memenuhi harapan konsumen. Dengan adanya standar mutu, konsistensi kualitas produk dapat dipertahankan dan daya saing produk dapat meningkat (Rahman, 2021).

Standar mutu produk perkebunan merupakan kriteria terukur yang dijalankan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan konsistensi hasil perkebunan. Standar mutu produk perkebunan dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen serta memenuhi harapan konsumen. Penerapan standar mutu pada konteks ketahanan pangan seperti

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan keamanan konsumsi terhadap produk perkebunan yang sekaligus dapat memperkuat daya saing produk perkebunan di pasar internasional (Pardamean, 2024).

Standar mutu perkebunan juga dapat mengarahkan proses pengolahan hasil perkebunan agar dapat memperpanjang daya simpan, meminimalisir kerusakan produk, mengurangi kehilangan mutu, serta menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi (Krismen, 2021). Penerapan standar mutu juga dapat ditujukan untuk memastikan jaminan kualitas dalam tahapan produksi dan pengolahan. Dengan demikian, standar mutu tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kualitas produk, tetapi juga dapat menjadi fondasi untuk mengintegrasikan standar produksi dan standar proses sehingga seluruh tahapan dari hulu ke hilir dapat menghasilkan produk perkebunan yang unggul (Juansa dkk, 2025).

➤ **Sertifikasi Produk Perkebunan**

Sertifikasi produk merupakan kegiatan penilaian kesesuaian suatu produk terhadap persyaratan yang telah ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan seperti audit, pengujian, atau inspeksi. Sertifikasi produk dapat dikatakan sebagai suatu proses atau metode yang digunakan untuk menentukan kualifikasi produk tertentu yang telah lulus uji kinerja, uji jaminan, atau spesifikasi yang lebih dikenal sebagai sertifikasi. Sertifikasi produk dapat mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pelanggan bahwa produk akan kinerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Mulyaningrum dkk., 2023).

Sertifikasi produk merupakan salah satu indikator penting dalam kinerja inovasi yang menunjukkan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk terhadap standar tertentu. Proses sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas produk serta dapat menjadi bukti bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Bagi UMKM dan perusahaan besar, sertifikasi produk dapat menjadi peluang tersendiri seperti membuka peluang pasar di pasar global. Sertifikasi produk juga dapat mendorong perusahaan maupun UMKM untuk terus meningkatkan standar kualitas dan proses produksi produk yang dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk mendorong perusahaan terus berinovasi dalam membuat produk baru serta produk yang lebih aman dan kompetitif di mata konsumen. Sertifikasi produk dapat diartikan sebagai tolak ukur penting dalam menilai sebuah produk baik dari perusahaan besar maupun UMKM, serta dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan usaha secara berkelanjutan (Fatkhurrahman, 2025).

Sertifikasi produk perkebunan memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing komoditas unggulan di pasar global, hal ini karena sertifikasi produk tidak hanya menjadi penanda mutu, tetapi juga menjadi jaminan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial bagi petani. Sertifikasi produk dapat memberikan kepercayaan bagi konsumen, bahwa produk yang dihasilkan telah melalui tahapan produksi yang bertanggung jawab sesuai dengan standar internasional, hal ini dapat menjadikan produk yang dihasilkan dapat memiliki peluang dipasar global. Dengan demikian, petani dan pelaku agribisnis perlu memilih sertifikasi yang paling relevan dengan karakteristik produk dan segmen pasar yang dituju, karena selain membuka peluang pemasaran yang lebih luas, sertifikasi juga memungkinkan produk dijual dengan harga premium

mengingat meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek keberlanjutan dan etika produksi (Rusman, 2025).

➤ **Daya Saing Produk Perkebunan**

Daya saing produk merupakan kemampuan suatu produk untuk bersaing dengan produk lain, baik dari segi harga maupun kualitas dari produk yang dihasilkan. Produk yang memiliki daya saing tinggi dapat dengan mudah diterima oleh konsumen, selain itu produk yang memiliki daya saing tinggi dapat memiliki peluang untuk masuk ke pasar global. Tingginya daya saing juga dapat menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang dan memperluas pangsa pasar, semakin luas pangsa pasar yang berhasil dikuasai maka semakin tinggi penjualan dan keuntungan yang diperoleh, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan (Sarmawa dkk., 2025).

Daya saing produk perkebunan merupakan kemampuan komoditas perkebunan untuk bersaing di pasar internasional maupun pasar domestik. Indonesia memiliki daya saing pada beberapa komoditas seperti minyak sawit dan rempah-rempah, karena produksinya yang besar serta sesuai dengan iklim tropis. Komoditas perkebunan yang melimpah di Indonesia tidak menutup kekurangannya pada kegiatan ekspor komoditas perkebunan, dimana produk yang di ekspor masih berupa produk mentah sehingga nilai tambah yang dihasilkan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan kurangnya penggunaan teknologi pengolahan, serta tantangan lain pada proses produksi komoditas secara berkelanjutan. Proses produksi hasil perkebunan yang masih memiliki beberapa kendala dapat menyebabkan rendahnya nilai daya saing yang dihasilkan (Raharjo dkk., 2024).

➤ Kesadaran dan Pemahaman Pentingnya Standar Mutu

Kesadaran tentang standar mutu merupakan langkah awal bagi setiap pelaku rantai nilai perkebunan untuk memasuki dan mempertahankan akses ke pasar global maupun pasar domestik. Pemahaman terkait standar mutu yang masih kurang akan menyebabkan baik perusahaan maupun UMKM mengalami kehilangan peluang pasar dan nilai tambah. Berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik di lapangan: meskipun sebagian petani telah mengetahui prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP), penerapannya masih rendah akibat keterbatasan kapasitas dan sumber daya (Istriningsih dkk., 2022).

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran petani terhadap standar mutu umumnya berkaitan dengan akses informasi, pelatihan, serta dukungan institusional. Prasyarat pra-sertifikasi dan kesiapan smallholder menunjukkan bahwa banyak kelompok tani belum memahami persyaratan RSPO/ISPO sebelum memulai proses sertifikasi. Kurangnya pemahaman ini membuat proses sertifikasi menjadi mahal, rumit, dan sering kali menurunkan motivasi petani untuk mengadopsi standar mutu. Karena itu, program peningkatan kesadaran perlu dirancang secara komprehensif melalui pelatihan teknis, pendampingan administratif, serta dukungan pembiayaan agar pengetahuan dapat diimplementasikan dalam praktik yang terukur. Pemahaman terhadap standar mutu tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan teknis, tetapi juga persepsi terhadap manfaat ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Determinan adopsi praktik berkelanjutan menemukan bahwa petani cenderung menerapkan standar mutu ketika mereka melihat insentif ekonomi yang jelas, seperti harga jual yang lebih tinggi, akses

pasar premium, atau manfaat non-moneteris seperti bantuan teknis dan pasokan input. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran perlu berfokus pada penyampaian bukti nyata mengenai nilai tambah yang diperoleh dari pemenuhan standar mutu, sehingga kesadaran tersebut dapat berkembang menjadi komitmen praktis (de Vos dkk., 2023).

Peran aktor perantara seperti perusahaan perkebunan, koperasi, pemerintah daerah, dan lembaga sertifikasi sangat penting dalam mengubah kesadaran menjadi kapasitas operasional yang nyata. Temuan dari sektor pangan menunjukkan bahwa meningkatnya tuntutan konsumen dan regulasi mendorong perlunya produk tersertifikasi yang dapat dibuktikan melalui dokumentasi, *traceability*, dan audit berkala. Untuk itu, penguatan rantai pasok melalui digitalisasi data, pencatatan produksi yang sistematis, serta penerapan standar pengendalian mutu internal menjadi langkah penting yang dapat mempercepat peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan (Miftari dkk, 2024).

Secara keseluruhan, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang standar mutu bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi merupakan strategi fundamental dalam membangun daya saing produk perkebunan. Dengan dukungan informasi, pelatihan, insentif ekonomi, serta sistem rantai pasok yang kuat, pelaku usaha dapat bertransisi dari sekadar mengetahui keharusan standar mutu menuju kemampuan nyata dalam memenuhinya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan akses pasar, kepercayaan pembeli, serta keberlanjutan usaha perkebunan di tingkat nasional maupun internasional.

➤ **Pemahaman Sertifikasi Produk Perkebunan**

Pemahaman terhadap sertifikasi produk perkebunan sangat krusial karena sertifikasi seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) bukan hanya sekadar label, tetapi representasi komitmen terhadap standar keberlanjutan, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Bagi banyak petani kelapa sawit, terutama kecil (swadaya), pemahaman “apa itu sertifikasi” masih sangat terbatas. Tanpa pemahaman yang cukup, sulit bagi mereka untuk menilai keuntungan, biaya, dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan sertifikat. Hal ini kemudian menjadi hambatan utama dalam adopsi sertifikasi, meski tekanan pasar global terhadap produk berkelanjutan semakin besar.

Strategi Peningkatan Pemahaman Petani terhadap Sertifikasi ISPO-RSPO oleh (Nainggolan dkk, 2024) ditemukan bahwa tingkat pemahaman petani rakyat terhadap sertifikasi masih rendah. Banyak petani tidak sepenuhnya tahu manfaat sertifikasi berkelanjutan, atau bagaimana proses sertifikasi itu berjalan (misalnya tahapan audit, persyaratan dokumentasi, dan biaya). Kondisi ini diperparah oleh kurangnya penyuluhan dan pendidikan berkelanjutan dari institusi terkait, sehingga sertifikasi kadang dilihat sebagai kewajiban administratif tanpa keuntungan ekonomi yang jelas di mata petani. Pentingnya strategi edukasi yang sistematis dan terus-menerus agar pemahaman sertifikasi bisa meningkat.

Sementara itu, di sisi implementasi, studi pada petani swadaya di Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan ISPO adalah rendahnya pengetahuan tentang kriteria ISPO serta kelemahan dalam struktur kelembagaan petani seperti kelompok tani atau koperasi. (Yurisinthae & Oktoriana, 2021) Tanpa institusi yang kuat, petani kesulitan mengorganisir diri untuk memenuhi

persyaratan sertifikasi, seperti pencatatan lahan, audit internal, dan pemantauan berkelanjutan. Banyak petani belum memiliki pemahaman yang jelas tentang aspek legalitas lahan, yang merupakan bagian penting dari persyaratan sertifikasi berkelanjutan (Utomo dkk., 2025).

Upaya memperkuat pemahaman sertifikasi juga dilakukan melalui pelatihan langsung kepada petani. Misalnya, program pelatihan ISPO bagi petani swadaya telah terbukti meningkatkan pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip manajerial usaha tani yang selaras dengan kriteria sertifikasi, seperti transparansi, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola usaha yang berkelanjutan (Apriyanto dkk, 2024). Selain pelatihan teori, praktik lapangan sangat diperlukan agar petani tidak hanya “tahu secara konsep”, tetapi bisa menerapkan persyaratan sertifikasi dalam kegiatan kebunnya sehari-hari. Kelembagaan lokal juga perlu diperkuat agar pendampingan dan audit internal berjalan secara konsisten.

Pemahaman sertifikasi produk perkebunan di kalangan petani, terutama petani kecil, masih menjadi tantangan besar yang menghambat adopsi ISPO dan RSPO. Untuk mengatasinya, perlu sinergi antara pendidikan formal, pendampingan lembaga, penguatan kelompok tani, dan dukungan kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih baik, petani tidak hanya akan mampu mengikuti proses sertifikasi, tetapi juga dapat merasakan manfaat jangka panjang berupa akses pasar, harga premium, dan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.

➤ Panduan dan Informasi tentang Standar Mutu Produk Perkebunan

Panduan dan informasi tentang standar mutu adalah kunci agar pelaku usaha perkebunan, terutama petani kecil dapat memahami langkah konkret yang harus ditempuh untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan masuk ke pasar yang menuntut produk berkelanjutan. Tanpa panduan yang jelas dan informasi yang mudah diakses, pengetahuan tentang standar seperti ISPO atau RSPO seringkali hanya berhenti pada tingkat konseptual sehingga implementasi di lapangan menjadi terhambat.

Panduan yang efektif harus menyajikan informasi langkah demi langkah yang praktis: penjelasan persyaratan dasar, daftar dokumen yang perlu disiapkan, prosedur audit, dan contoh praktik kebun yang memenuhi standar. Pendekatan modul untuk manajemen lahan, pencatatan, pengelolaan limbah, dan aspek sosial memudahkan petani menerapkan satu per satu sehingga proses sertifikasi terasa lebih terjangkau dan tidak membebani. Percepatan model ISPO menunjukkan bahwa pembagian materi menjadi bagian praktis sangat membantu *smallholder* dalam memahami dan memenuhi kriteria sertifikasi (Hadi dkk, 2024).

Saluran penyampaian informasi juga harus beragam: kombinasi pelatihan tatap muka, pendampingan lapangan oleh penyuluh/kooperasi, dan platform digital (mis. aplikasi perekaman produksi dan video tutorial) terbukti meningkatkan jangkauan dan efektivitas transfer pengetahuan. Kajian tentang digitalisasi pertukaran pengetahuan menunjukkan bahwa platform digital mempercepat akses informasi dan mempermudah dokumentasi untuk keperluan audit, terutama bila diintegrasikan dengan dukungan teknis langsung dari lembaga pembina. Namun, perlu diperhatikan hambatan akses digital di

beberapa wilayah sehingga model hibrida (offline +online) tetap diperlukan (Ahmadi dkk, 2025).

Panduan dan informasi tentang standar mutu harus: (1) bersifat praktis dan modular; (2) disampaikan melalui saluran yang sesuai konteks lokal (tatap muka + digital); dan (3) dipadukan dengan insentif dan penguatan kelembagaan. Implementasi panduan semacam ini, jika didukung oleh kebijakan dan mitra teknis yang kuat, akan mempercepat adopsi standar mutu di kalangan petani perkebunan dan membuka akses pasar yang lebih luas serta nilai tambah yang lebih baik.

➤ **Panduan Proses Sertifikasi**

Proses sertifikasi biasanya dimulai sejak organisasi menentukan standar mana yang akan dipenuhi, misalnya ISO 9001, ISO 27001, atau standar lainnya, setelahnya akan mengajukan permohonan ke badan sertifikasi terakreditasi. Pada tahap awal, tim sertifikasi akan melakukan penilaian dokumen dan kesiapan organisasi. Setelah itu, akan dilakukan audit sesuai standar yang telah ditentukan. Audit pertama yang dilakukan adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan dilakukannya audit penuh.

Audit pertama yang dilakukan pada suatu organisasi telah memenuhi standar, maka akan dilakukan tahap audit selanjutnya. Audit tahap 2 dilakukan oleh auditor eksternal yang bertujuan mengevaluasi implementasi sistem manajemen secara langsung. Kegiatan audit dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi proses operasional di lokasi, pemeriksaan rekaman, dan konfirmasi terkait sistem yang akan dijalankan dengan kesesuaian standar yang ditentukan. Bila audit sukses (tidak ada ketidaksesuaian mayor), maka sertifikat resmi akan diterbitkan. Sertifikat ini biasanya berlaku untuk periode tiga tahun, dengan kewajiban organisasi menjalani audit

pemeliharaan (surveillance) secara berkala agar kepatuhan terus dijaga.

Sertifikasi yang telah diperoleh, maka organisasi tetap perlu melakukan audit internal berkala, tinjauan manajemen, dan tindakan perbaikan bila diperlukan agar sistem tetap efektif dan sesuai standar. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mempertahankan kualitas, konsistensi, dan kredibilitas jangka panjang sekaligus memberi kejelasan bahwa proses dan prosedur dijalankan secara sistematis dan diaudit secara independen.

➤ **Strategi Peningkatan Kualitas Produk Perkebunan**

Peningkatan kualitas produk perkebunan menjadi aspek krusial untuk meningkatkan daya saing komoditas di pasar domestik maupun ekspor. Kualitas yang lebih baik bukan hanya menaikkan harga jual tetapi juga mengurangi kerugian pascapanen, memenuhi standar keberlanjutan, dan membuka akses ke rantai pasok modern. Oleh karena itu strategi peningkatan kualitas perlu menyentuh aspek teknis di lapangan, tata kelola rantai pasok, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan pasar (Touch dkk, 2024).

Langkah pertama adalah memperkuat penerapan GAP (pemilihan benih/bibit unggul, pengaturan pemupukan dan pengendalian hama terintegrasi, serta praktik panen tepat waktu) yang terbukti meningkatkan mutu bahan baku dari sumbernya; dilengkapi program sertifikasi (misalnya, ISPO, RSPO atau sertifikat organik bila relevan) untuk menjamin standar lingkungan dan pasar. Sertifikasi juga membantu petani kecil meningkatkan akses pasar bernilai tambah dan mendorong perbaikan manajemen produksi yang langsung berdampak pada mutu produk. Upaya percepatan sertifikasi dan program adopsi GAP harus dipadukan dengan insentif

ekonomi serta asistensi teknis agar adopsi menjadi berkelanjutan (Ismail dkk, 2024).

Strategi kedua menekankan penguatan praktik pascapanen: sortir dan grading yang konsisten, pengeringan/penyimpanan yang sesuai, penggunaan fasilitas pengolahan sederhana hingga skala kecil-menengah, serta kemasan dan pengawetan yang mempertahankan mutu fisik dan mikrobiologis. Intervensi teknis ini mengurangi kehilangan, memperpanjang umur simpan, dan memungkinkan transformasi komoditas mentah menjadi produk bernilai (kopi olahan, kakao fermentasi, minyak nabati bermutu tinggi), sehingga meningkatkan pendapatan petani. Studi review dan kasus menunjukkan bahwa investasi pada teknologi pascapanen dan pengolahan sederhana memberi kenaikan signifikan pada mutu dan nilai jual produk perkebunan (Lalpekhlua dkk, 2024).

Strategi ketiga adalah mengintegrasikan sistem digital untuk traceability, monitoring kualitas, dan akses pasar, platform pencatatan produksi, QR code untuk asal-muasal, dan aplikasi manajemen pascapanen yang meningkatkan transparansi, keamanan pangan, dan kepercayaan pembeli. Selain teknologi, perlu program pelatihan, pembiayaan mikro untuk peralatan, dan skema kemitraan yang menghubungkan petani ke pembeli modern (certified buyers, cooperatives, atau eksportir). Adopsi traceability dan layanan digital terbukti memperbaiki kontrol mutu serta membuka peluang premium pricing di pasar yang menuntut keberlanjutan dan jejak produk jelas (Israel & Siwandeti, 2024).

Peningkatan kualitas produk perkebunan efektif apabila ketiga strategi di atas dijalankan secara sinergis: GAP & sertifikasi (membangun mutu dari hulu), pascapanen & nilai tambah (menjaga dan menaikkan mutu di tengah proses), serta

digitalisasi & akses pasar (mengamankan nilai dan permintaan). Kebijakan pendukung, pembiayaan terarah, dan pembinaan berkelanjutan kepada petani/kelompok tani menjadi kunci agar strategi ini menghasilkan dampak ekonomi dan lingkungan yang nyata.

➤ **Upaya Meningkatkan Daya Saing di Pasar Internasional**

Meningkatkan daya saing produk perkebunan di pasar internasional memerlukan kombinasi perbaikan mutu produk, kepatuhan terhadap regulasi mutu/ keamanan pangan, efisiensi rantai pasok, dan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Upaya ini harus bersifat terpadu menyentuh hulu (produksi), tengah (pascapanen & pengolahan) dan hilir (akses pasar & branding) agar menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Langkah pertama yang krusial adalah memperkuat mutu produk melalui penerapan standar mutu dan keamanan pangan internasional (SPS/TBT), sistem sertifikasi keberlanjutan, serta praktik manajemen mutu sepanjang rantai nilai; kepatuhan semacam ini membuka akses ke pasar premium dan mengurangi risiko penolakan di bea cukai tujuan (Wang dkk, 2024). Selain itu, upaya diferensiasi produk, misalnya pengolahan nilai tambah, sertifikat organik/berkelanjutan, atau penegasan asal geografis (*geographical indication*) mampu menciptakan niche pasar dan premium pricing yang memperkuat posisi tawar eksportir. Studi tentang upgrading rantai nilai menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk dan sertifikasi terkoordinasi secara langsung meningkatkan kemampuan pemasaran internasional dan margin usaha (Allali dkk, 2024).

Di sisi hilir, strategi memperluas dan menstabilkan akses pasar melalui diversifikasi tujuan ekspor, pemanfaatan perjanjian perdagangan, serta adopsi digitalisasi pemasaran

(platform *e-commerce & traceability*) menjadi sangat penting untuk menangkap permintaan baru dan mempertahankan pelanggan internasional. Perbaikan infrastruktur logistik (*cold chain, handling*, transportasi) dan fasilitasi perdagangan (prosedur ekspor yang efisien, sertifikasi terakselerasi) juga mengurangi biaya dan kehilangan serta meningkatkan ketepatan mutu saat produk tiba di pasar tujuan faktor yang sering menentukan keberhasilan bersaing di pasar global.

Kombinasi peningkatan mutu & sertifikasi, diferensiasi produk bernilai tambah, serta penguatan akses pasar lewat logistik yang efisien dan strategi pemasaran modern membentuk kerangka kerja yang pragmatis untuk meningkatkan daya saing produk per-kebunan di pasar internasional. Keberhasilan memerlukan sinergi antara pemerintah (kebijakan & fasilitasi), pelaku usaha (investasi & penerapan standar), dan lembaga pendukung (pelatihan, R&D, serta pembiayaan).

➤ Studi Kasus Keberhasilan

Meningkatkan Daya Saing Ekspor Sawit Melalui Strategi Pemasaran Yang Efektif membahas upaya PTPN IV Regional 7 dalam meningkatkan daya saing ekspor produk sawit di pasar internasional. Indonesia sebagai produsen sawit terbesar menghadapi tantangan serius berupa persaingan global dengan Malaysia serta semakin ketatnya standar kualitas dan keberlanjutan di negara-negara tujuan ekspor. Kondisi pasar yang fluktuatif, terutama perubahan harga CPO, juga menjadi hambatan penting dalam menjaga kestabilan dan daya saing perusahaan.

Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur, kajian ini mengidentifikasi dua tantangan utama: volatilitas harga CPO dan tuntutan sertifikasi kualitas internasional. Untuk menjawab tantangan ini, PTPN IV Regional 7 menerapkan sejumlah strategi pemasaran, mulai dari peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi seperti ISO 9001, ISO 22000, ISCC, dan Rainforest Alliance. Di samping itu, perusahaan juga menguatkan citra merek melalui partisipasi dalam pameran internasional serta promosi berkelanjutan di pasar global.

Strategi lainnya mencakup kerja sama dengan KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) sebagai pihak pemasaran yang memiliki jaringan luas dan pengalaman dalam distribusi komoditas secara internasional. Kolaborasi ini membantu memperluas akses pasar, memperkuat hubungan dengan pembeli global, serta menyediakan informasi pasar yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Selain itu, PTPN Group juga melakukan diversifikasi produk, termasuk ekspor palm kernel meal, untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan nilai tambah produk sawit.

Implementasi strategi pemasaran tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing ekspor sawit PTPN IV. Fokus pada kualitas, branding, kerja sama strategis, dan diversifikasi produk terbukti mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepercayaan pembeli internasional, serta memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis keberlanjutan, PTPN IV diharapkan dapat terus mendukung perkembangan industri sawit Indonesia dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Pratiwi dkk, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, S., Amendolagine, V., & Lasala, P. (2025). Unpacking The Impacts Of Digitalization Of Knowledge Transfer In Agri-Food Sector, Through Sociotechnical Systems Theory: A Systematic Literature Review. In *Agricultural And Food Economics* (Vol. 13, Issue 1). Springer Science And Business Media Deutschland GmbH.
- Aisyah, A. S., Pratama, L. R., Nugraha, H., & Miqdar, M. S. (2025). Implementasi Sertifikasi Halal Internasional pada Produksi Makanan Ringan Sajodo Snack Tasikmalaya. *Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 30-37.
- Allali, T., Colabianchi, M., Moretti, M., & Brunori, G. (2024). Towards A New Framework To Assess Agri-Food Value Chains' Sustainability – The Case Of Chestnut Value Chain. *Heliyon*, 10(7).
- Apriyanto, M., Fitriani, D., Mardesci, H., Novyar Satriawan Fikri, K., Puspitasari, F., & Azhar, A. (2024). Pelatihan Dan Pengenalan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil Tingkat Petani. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3).
- Astagia, A., Nurani, T. W., & Kurniawati, V. R. (2022). Persyaratan Ekspor Tuna Tujuan Uni Eropa, Amerika Serikat, Dan Jepang. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 6(1), 057-066.
- Badan Karantina Indonesia. (2018). Tingkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Ekspor, Ini yang Dilakukan
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Januari-Maret 2024. Jakarta: BPS.

- Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Ambon. (2025). Meningkatkan Daya Saing Global: Pelatihan Pascapanen dan Pengawasan Mutu Komoditas Barantan. Diakses pada <https://karantinaindonesia.go.id/detailberita/tingkatkanmutu-dan-keamanan-pangan-segar-ekspor-ini-yangdilakukan-barantan>
- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Dalimunthe*, N. R. (2025). Competitiveness of Indonesian essential oil exports in the Chinese market. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 8(3), 885–897.
- De Vos, R. E., Suwarno, A., Slingerland, M., Van Der Meer, P. J., & Lucey, J. M. (2023). Pre-Certification Conditions Of Independent Oil Palm Smallholders In Indonesia. Assessing Prospects For Rspo Certification. *Land Use Policy*, 130.
- Djafri, M. S., Harianto, H., & Syaukat, Y. (2016). Optimasi Produksi Usahatani Sayuran Organik (Studi Kasus Yayasan Bina Sarana Bakti, Cisarua, Bogor). In *Forum Agribisnis: Agribusiness Forum* (Vol. 6, No. 1, pp. 111-129).
- Erina, N. G. F. (2024). Peran RSPO dan ISPO Pada Keberlanjutan Industri Minyak Kelapa Sawit di Indonesia: Studi Kasus Indofood. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 9(2), 290298.
- Ezer, P. E. (2024). Analisis Perbandingan Daya Saing Ekspor Komoditi Perkebunan.
- FAO. (2022). *Sustainability in Agriculture*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2024). *The State of Food and Agriculture 2024*. Rome: FAO. International Trade Centre (ITC). (2023). *Sustainability Standards and Trade*. Geneva: ITC.

- Fatkhurahman. (2025). Inovasi Umkm. Unilak Press.
- Hadi, S., Kusumawaty, Y., Bakce, D., & Yusri, J. (2024). Development Of An Accelerated Model For Ispo Certification In Independent Palm Oil Plantations. *Kne Social Sciences*.
- Felix, M. (2024). Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia. *Perspektif*, 13(3), 793-810.
- Garvin, D. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. *Harv. Bus. Rev.* 101-109.
- Hadi, S. (2023). Strategi percepatan sertifikasi ISPO di Indonesia. *Jurnal E-Publikasi Pertanian*, 7(2), 45-56.
- Hadi, S., Backe, D., Muwardi, D., Yusri, J., & Septya, F. (2023). Strategi Percepatan Sertifikasi ISPO di Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1): 21-42.
- Hamid, A., Adim, A., & Gymnastiar, A. U. (2025). Peran Sertifikasi Halal Untuk Mendorong Bisnis Global di Pasar Pakong, Pamekasan. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 279- 291.
- Hartini. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen: Prinsip dan Teori*. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA.
- Harwina, Y. (2022). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Perkebunan Nusantara V Pabrik Palm Karnael Oil Tandun Rokan Hulu. *Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 13(3), 279-289.
- <https://balaiaibon.ditjenbun.pertanian.go.id/?p=4170>
- <https://multisertifikasi.co.id/penerapan-iso-9001-perkebunan-sawit/>
- Husna, S. A., Deli, A., & Hakim, L. (2023). Analisis Tingkat Penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pada Ketenagakerjaan di Kebun Kelapa Sawit PT. Usaha Semesta Jaya Kabupaten Nagan Raya. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA PERTANIAN*, 8(4).

- Ibnu, M. (2023). Penerapan standar dan sertifikasi dalam rantai nilai komoditas perkebunan. *Jurnal Litbang Daerah*, 12(1), 15–27.
- Ichsan, L. (2020). Audit Implementasi ISO 9001: 2015: Studi Kasus Prosedur Pembelian di PT. Power Konstruksi Utama (Doctoral dissertation, Podomoro University).
- International Trade Centre (ITC). (2024). Trade Performance Report 2024. Geneva: ITC.
- Irawan, D., Dewi, R. A. S., Rijal, M. S., & Fiddin, A. N. (2024). Perkembangan Kelembagaan Petani Terhadap Bantuan Pemerintah. *Agroteksos*, 34(2), 744-752.
- Irham, F., Fauzan, R. G., & Pramasha, R. R. (2024). Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Ismail, M., Alimin, N. S. N., & Bathaei, A. (2024). Improving The Quality And Productivity Of Palm Oil Through Mechanisation In Palm Oil Companies. *International Journal Of Industrial Management*, 18(4), 212–222.
- ISO. (2023). ISO Standards for Quality Management. Geneva: International Organization for Standardization.
- Israel, B., & Siwandeti, M. (2024). Agri-Food Supply Chain Capabilities And Smallholders' On-Farm Economic Viability: A Moderated Mediation Analysis Of Subsidy Schemes And Dynamic Pricing. *Cogent Food And Agriculture*, 10(1).
- Istriningsih, Dewi, Y. A., Yulianti, A., Hanifah, V. W., Jamal, E., Dadang, Sarwani, M., Mardiharini, M., Anugrah, I. S., Darwis, V., Suib, E., Herteddy, D., Sutriadi, M. T., Kurnia, A., & Harsanti, E. S. (2022). Farmers' Knowledge And Practice Regarding Good Agricultural Practices (Gap) On Safe Pesticide Usage In Indonesia. *Heliyon*, 8(1).

- Juansa, A., Maulana, A. W., Lubis, M. M., Wijaya, A. A., Minarsi, A., Juran, J. (1999). JURAN'S QUALITY HANDBOOK.
- Kansil, C. T. (2021). Tindak Pidana dalam Pemasaran Hasil Kementerian Pertanian Indonesia. (2022). Laporan Sertifikasi Komoditas Perkebunan. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. (2025). Sepanjang 2024, Sektor Perkebunan Menjadi Pilar Utama Ekspor Indonesia. Diakses pada <https://perkebunan.brmp.pertanian.go.id/berita/sepanjang2024>
- Krismen, Y. (2021). Delik-Delik Ekonomi Di Luar Kuhp Jilid 1. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Kusumastuti, D., MH, S. (2022). Peran koperasi dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Unisri Press.
- Lalpekhlu, K., Tirkey, A., Saranya, S., & Babu, P. J. (2024). Post-Harvest Management Strategies For Quality Preservation In Crops. In International Journal Of Vegetable Science (Vol. 30, Issue 5, Pp. 587–635). Taylor And Francis Ltd.
- Lee, J., Kim, M., & Park, H. (2020). Postharvest innovation for enhancing fruit export quality in tropical regions: Evidence from Southeast Asia. International Journal of Agricultural Economics, 6(3), 145–156.
- Manahawu, C. M., Mandagi, J., & Kaawoan, J. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran persyaratan ekspor barang. Lex Privatum, 12(1), 115–124.
- Manalu, D. S. T. (2022). Analisis daya saing serta faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia. Buletin Perdagangan, 16(1), 53–67.

- Maulani, R. R., Alfianny, R., Rahmani, A. A. N., Haitami, M. N., & Wibisono, D. S. (2025). Perbaikan Keterampilan Petani Dalam Budidaya Dan Penanganan Pascapanen Padi Untuk Meningkatkan Kualitas Beras. In Prosiding Seminar Teknologi Pertanian Indonesia (STPI) (Vol. 3, No. 1, pp. 70-82).
- Muh. Al Aswar Rusman. (2025). Agribisnis Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura Berkelanjutan. Cv. Azka Pustaka.
- Multi Sertifikasi Indonesia. (2024). Ini Dia Dampak dari Penerapan ISO 9001 di Industri Perkebunan Sawit. Diakses dari
- Mulyaningrum, Pangestu, E. S., Rusliati, E., Koesworodjati, Y., & Indah, D. Y. (2023). Strategi Bisnis Untuk Usaha Kecil Menengah. Deepublish.
- Mursalin, A. (2021). Manajemen Pemasaran Islam - Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.
- Nafis, B. (2025). Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI/ISO 9001:2015 Di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Jurnal Perpustakaan Dan Informasi, 19(2): 333-359.
- Nainggolan, H. L., Marito Butar-Butar, K., Lawolo, O., Benget, J., Sitompul, M., Lamtiur, D., & Nainggolan, H. (2024). Strategi Peningkatan Pemahaman Petani Terhadap Sertifikasi Ispo-Rspo Untuk Mendukung Sawit Rakyat Berkelanjutan Strategy To Increase Farmers' Understanding Of Ispo-Rspo Certification To Support Sustainable Smallholder Palm Oil. Jurnal Agrikultura, 2024(3), 517-528.
- Nasution, E. W., & Ningsih, T. (2025). Optimalisasi Manajemen Rantai Pasok dalam Agribisnis: Studi Kasus Produksi Kelapa Sawit di Negara Berkembang. Tabela Jurnal Pertanian Berkelanjutan, 3(1), 23-31.

- Nasution, S. N., Harianto, D., & Leviza, J. (2022). Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang dalam Kerangka Perdagangan Bebas World Trade Organization (Wto) dan Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 294-312.
- Notohamijoyo, A. (2023). Reaktualisasi poros maritim. Mcl Publisher. Pandang, I. V., & Pawenang, T. (2025). Ekspor Perikanan Indonesia: Peluang dan Tantangan Global. Star Digital Publishing.
- Pardamean, M. (2024). Best Management Practice Kelapa Sawit. Andi Offset.
- Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 41-50.
- Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. *Lex Crimen*, 10(3).
- Perkebunan Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah. Universitas Brawijaya.
- Pratiwi, V. A. P., Ayunda, M. R. Y., & Sari, N. A. (2024). Meningkatkan Daya Saing Ekspor Sawit Melalui Strategi Pemasaran Yang Efektif: Studi Kasus: PTPN IV REGIONAL 7. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Pratiwi, V. A. P., Ayunda, M. R. Y., & Sari, N. A. (2024). Pt. Media Akademik Publisher Meningkatkan Daya Saing Ekspor Sawit Melalui Strategi Pemasaran Yang Efektif (Studi Kasus : Ptpn Iv Regional 7) Oleh. *Jma*, 2(11), 3031–5220.
- Prayitno, S. A., Utami, D. R., Patria, D. G., Putri, S. N. A., Ningrum, S., Jumadi, R., & Al Fatina, A. (2022). Good Manufacturing Practices (GMP) Produksi Teh Hitam (Black Tea) Di PTPN XII Malang Jawa Timur. *JUSTI (Jurnal Sistem dan Teknik Industri)*, 3(3), 343-351.

- Putra, M. F., Santoso, H., & Usman, R. (2023). Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Perusahaan X. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Putro, F. A., Putri, A. L., & Prawira, G. (2024). Daya Saing dan Determinan Ekspor Kopi Indonesia di Jepang. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 12(1): 27-36.
- Radiyyah, A. F., Manurung, N. T. N., Hasibuan, S. M. A., & Suhairi, S. (2024). Kebijakan Produk Standarisasi International. *Informatika*, 12(1), 32-38.
- Raharjo, S., Mashyuri, Pertiwinigrum, A., Purnomo, Julia, M., Kumorotomo, W., Maksum, M., & Baiquni, M. (2024). *Pangan Berdaulat, Generasi Sehat, Bangsa Bermartabat*. Ugm Press.
- Rahman, S. (2021). *Buku Ajar Membangun Spirit Dan Kompetensi Agrotechnopreneurship*. Deepublish.
- Rahmawati, N. (2021). Penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Integritas*, 7(1), 55–70
- Ratih Deswanti. (2013). HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). *Pendekatan Sistematis Pengendalian Keamanan Pangan*.
- Rouf, A. A. (2025). Sertifikasi Produk Pertanian untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pertanian Indonesia. *IPB*, 7(1): 1154-1157.
- Ruslin. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan Dihubungkan Dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1): .
- Saputra, D. A. (2023). Efektivitas sanksi administratif dalam penegakan perizinan usaha perkebunan di Kota Batu. *Jurnal Humani*, 3(2), 45–55

- Saragih, B. (2020). Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. Deepublish. Sarmawa, I. W. G., Ningsih, N. L. A. P., & Sugianingrat, I. A. P. W.(2025). Manajemen Operasional Teori Dan Empiris (Operation Management Theoretical And Empirical). Cv. Intelektual Manifes Media.-sektor-perkebunan-menjadi-pilar-utama-eksporindonesia
- Setyowati. (2006). Peran Pengukuran Standarisasi, Pengujian, dan Jaminan Mutu (MSTQ) dalam Usaha Peningkatan Mutu. *Jurnal Standarisasi*, 8(1): 35-42.
- Sitompul, M. G. (2023). Perubahan nilai ekspor kopi Indonesia pasca kebijakan standardisasi mutu. *Jurnal AgriHumanis*, 5(1),30–38.
- Sudarni, A. A. C., Faisol, F., Suhadarliyah, S., Irwansyah, R., Ibadurrahman, I., Supriadi, Y. N., Anwar, A., Yusuf, S. Y. M., Sijabat, F. N., & Sushardi, S. (2023). *Manajemen Strategik (Teori Dan Analisis)*. Seval Literindo Kreasi.
- Sugama, D., Ayu, I. W., Rianty, E., & Murwanti, R. (2025). Ketahanan Pangan: Swasembada Pangan Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Pt. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.
- Susanto, D. A., Habiebie, M. H., & Basuki, B. (2024). Peran Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 93-106.

- Susilawati, D., Anugrah, R. A., & Ningsih, E. R. (2023). Optimalisasi Produksi Pemasaran Melalui Branding Awareness dan Digitalisasi Marketing Produk Sabun Cuci Piring Desa Tridadi Sleman. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 431-446.
- Sutrisno, N., & Hamdani, A. (2019). Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk meningkatkan produksi pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(2), 73-88.
- Transformasi Ekonomi Global. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Trimadya, N. M. (2024). Pengembangan standardisasi pertanian dan potensi penerapan SNI dalam meningkatkan daya saing ekspor. *Jurnal Standardisasi Nasional*, 2(1), 1–11.
- Trimadya, N. M., Savanty, T., Widyaningsih, W., & Krisianto, A. (2024). Pengembangan Standarisasi Bidang Pertanian dan Kebutuhan Penilaian Kesesuaian. *Warta Agrostandar*, 1(1): 4-9.
- Trimadya, N. M., Savanty, T., Widyaningsih, W., & Krisianto, A. (2024). PENGEMBANGAN STANDARDISASI BIDANG PERTANIAN DAN KEBUTUHAN PENILAIAN KESESUAIAN. *Warta Agrostandar*, 1(1): 4-9.
- Trimadya, N. M., Savanty, T., Widyaningsih, W., & Krisianto, A. (2024). Pengembangan Standardisasi Bidang Pertanian dan Kebutuhan Penilaian Kesesuaian. *Warta Agrostandar*, 1(1), 4- 9.
- Ulum, M. B. (2018). Desain Internet Of Things (IoT) Untuk Optimasi Produksi Pada Agroindustri Karet. *Sebatik*, 22(2), 69-73.
- United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG). (2023). *Progress Towards the SDGs*. New York: UN.

- Utomo, S., Siswadi, & Sitorus, A. P. M. C. (2025). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Tanah Pada Implementasi Ispo Di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (Jpkmn)*, 06(03), 3738–3745.
- Wang, G., Wang, Y., Li, S., Yi, Y., Li, C., & Shin, C. (2024). Sustainability In Global Agri-Food Supply Chains: Insights From A Comprehensive Literature Review And The Abcde Framework. In *Foods* (Vol. 13, Issue 18). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Mdpi).
- Wardana, B. E. (2023). Certified Analysis of Economic Industries: Challenges and Opportunities in the Globalization Era. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(2), 123-130.
- Widyatmoko, B., Nurlia, A., & Siregar, H. (2023). The implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil certification (ISPO): Opportunity for inclusion of palm oil smallholders in Riau Province. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 49(2), 233–248.
- Wisnubroto, M. P., Sibarani, E. M., Murrinie, E. D., Yuniarsih, E. T., & Najib, M. (2025). *Manajemen Perkebunan*. CV Hei Publishing Indonesia.
- World Bank. (2024). *Indonesia Economic Quarterly: Navigating Global Uncertainty*. Washington DC: World Bank
- WTO. (2021). *Trade and Environmental Sustainability*. Geneva: World Trade Organization.
- Wulandari, R. A., & Dilova, G. (2025). *Dasar-Dasar Hukum Perkebunan*.
- Yahman, Y. (2024). Understanding Law Enforcement in the Perspective of Expediency and Justice. *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 26-34.

- Yuliani, F. (2025). Kebijakan hilirisasi dan pemanfaatan perjanjian perdagangan terhadap produk pertanian Indonesia. *Buletin Perdagangan*, 17(1), 22–35
- Yurisinthae, E., & Oktoriana, S. (2021). Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (Ispo) Pada Petani Kelapa Sawit Swadaya Di Kabupaten Sanggau
Implementation Of Indonesian Sustainable Palm Oil System (Ispo) Certification For Independent Oil Palm Smallholders In Sangau Regency.

BIODATA PENULIS



Dr. Gyska Indah Harya, SP., M.Agr.

Penulis lahir pada 04 Juli 1991 di Surabaya, Jawa Timur. Berasal dari keluarga yang berkultur Jawa. Meraih Sarjana Pendidikan S1 dan S2 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan meraih Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap UPN” Veteran” Jawa Timur. Penulis lebih banyak menghabiskan waktu untuk penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, menulis artikel dan mengajar di Agribisnis dari tahun 2017-2023 dan Pascasarjana Magister Agribisnis Fakultas Pertanian dari tahun 2023 hingga sekarang.



Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP.

Penulis lahir di Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Pertanian di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” JATIM tahun 1984. Pendidikan S2 Jurusan Ekonomi Pertanian di Fakultas Pertanian-UGM Yogyakarta tahun 1994 dan Pendidikan S3 di selesaikan tahun 2004 Jurusan Ekonomi Manajemen di Fakultas Ekonomi-Universitas Brawijaya Malang. Menjadi Dosen Program Studi Agribisnis di Fakultas Pertanian UPN “Veteran” JATIM sejak tahun 1987.



Prof. Dr. Ir. Hamidah Hendrarini, M.Si.

Penulis lahir di Surabaya tanggal 27 Desember 1960. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 pada bidang ilmu Sosial Ekonomi Pertanian di Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 1987. Melanjutkan Program Studi Magister pada bidang ilmu Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2003. Melanjutkan studi Doktorat pada bidang Ilmu Pertanian di Universitas Sebelas Maret dan lulus pada tahun 2014. Sebagai Guru Besar di bidang Agribisnis Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2024.